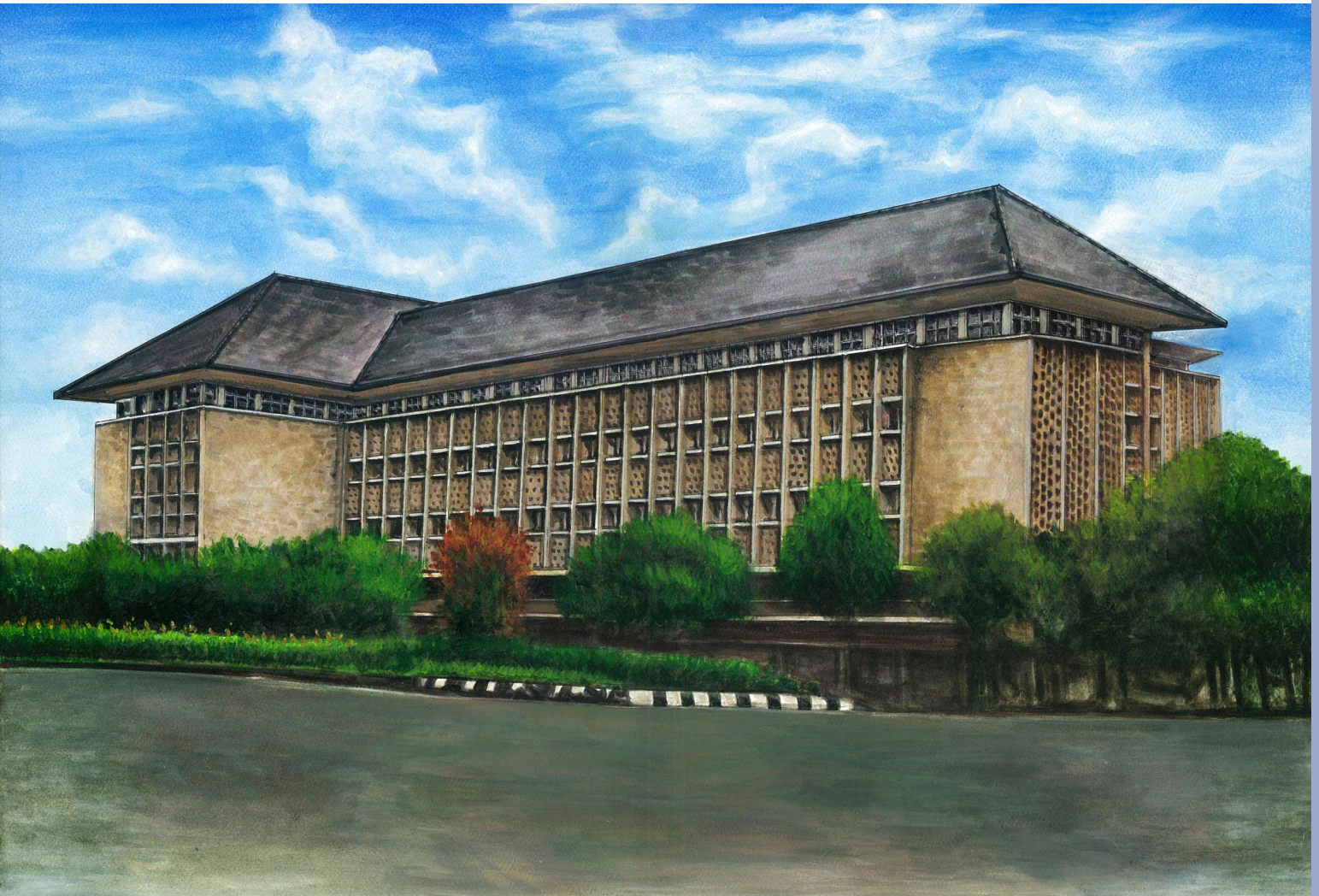


LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2012

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS BANK INDONESIA 2012





DAFTAR ISI

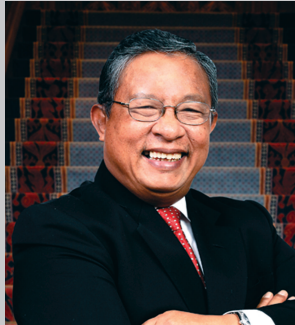
Table of Contents

Kata Pengantar <i>Preface</i>	iii
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan <i>Independent Auditor's Report on the Financial Statements</i>	v
Neraca <i>Balance Sheets</i>	1
Laporan Surplus Defisit <i>Surplus Deficit Statement</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal <i>Statement of Changes in Equity and Capital Ratio</i>	4
Laporan Arus Kas <i>Cash Flow Statement</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan <i>Notes to Financial Statements</i>	7
A. Umum <i>General</i>	7
B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan <i>Significant Accounting Policies</i>	14
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal <i>Notes to Balance Sheet, Surplus Deficit Statement and Statement of Changes in Equity and Capital Ratio</i>	27
D. Penjelasan Lainnya <i>Others</i>	88
E. Komitmen dan Kontijensi <i>Commitments and Contingencies</i>	93
Lampiran <i>Appendixes</i>	111
Lampiran 1: Struktur Organisasi Bank Indonesia <i>Appendix 1: Organization Structure of Bank Indonesia</i>	111
Lampiran 2: Daftar Singkatan <i>Appendix 2: List of Abbreviations and Acronyms</i>	113



DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Board of Governors of Bank Indonesia



Darmin Nasution
Gubernur
Governor



Hartadi A. Sarwono
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Halim Alamsyah
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Ronald Waas
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Muliaman D. Hadad
Deputi Gubernur
Deputy Governor

s.d. Juli 2012
up to July 2012



Budi Mulya
Deputi Gubernur
Deputy Governor

s.d. November 2012
up to November 2012



Ardhayadi M.
Deputi Gubernur
Deputy Governor

s.d. November 2012
up to November 2012





KATA PENGANTAR

Preface

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2012 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2012, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, berikut Catatan atas Laporan Keuangan.

Tahun 2012 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Bank Indonesia sebagai dampak dari perekonomian global. Atas kondisi tersebut, Bank Indonesia merespon melalui bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar dan kebijakan makroprudensial. Efektivitas atas bauran kebijakan dimaksud, juga didukung oleh penajaman strategi komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah. Di samping itu, Bank Indonesia berhasil menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada level yang relatif rendah meskipun nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2012 terdepresiasi dibandingkan akhir tahun 2011. Semua dinamika tersebut di atas, pada akhirnya akan mempengaruhi besaran-besaran dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2012 yang disusun sebagai wujud akuntabilitas Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2012 ini memperoleh Pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK. Perolehan pendapat tersebut secara berturut-turut dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan sekaligus mencerminkan kesungguhan dan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kredibilitas sebagai Bank Sentral tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, tetapi juga oleh penerapan

It is with thanks to the Almighty God that we herewith present the Annual Financial Statements of Bank Indonesia for 2012, as audited by the State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The Financial Statements include the Balance Sheet as at December 31, 2012, as well as the Statements of Surplus Deficit, Changes in Equity, and Cash Flow for the period of January 1 to December 31, 2012, along with the Notes to the Financial Statements.

The year 2012 was a challenging year for Bank Indonesia with respect to the impact of global economy conditions. In responding these conditions, Bank Indonesia has implemented a range of policies consisting of interest rate policy, exchange rate policy, and macro-prudential policy. The effectiveness of these policies was supported by sharpening communication and coordination strategies with the Government. In addition, Bank Indonesia has been succeeded in maintaining Rupiah's exchange rate volatility at a relatively low level despite the exchange rate at the end of 2012 was depreciated, if compared with the exchange rate at the end of 2011. All of the above dynamics have affected the magnitudes in the Annual Financial Statements of Bank Indonesia in 2012, which has been prepared as a form of Bank Indonesia's accountability as an independent institution.

*The Annual Financial Statements of Bank Indonesia for 2012 has been given an **Unqualified Opinion** by the BPK. This marks the tenth consecutive year that Bank Indonesia's Financial Statements have received an Unqualified Opinion, an achievement that we can be proud of and which demonstrates Bank Indonesia's commitment to transparency and accountability in the context of implementing good governance. Through the application of continuing good governance, Bank Indonesia will be able to perform its duties more effectively, and avoid the misuse of resources. In turn, we expect that this will help increasing stakeholders*

tata kelola dalam mencapai tujuan dimaksud. Dengan penerapan tata kelola yang baik secara berkesinambungan, tugas Bank Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari penyalahgunaan sumber daya. Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*, sehingga Bank Indonesia dapat mencapai misi dan visi yang dicanangkan serta melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan BPK bagi perbaikan pelaksanaan tugas yang terus menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan BPK, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Di samping itu, sebagai wujud pelaksanaan pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2012 dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui media massa dan situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

trust in Bank Indonesia so that it will be able to achieve its proclaimed vision and mission and to perform its duties in the future even more effectively.

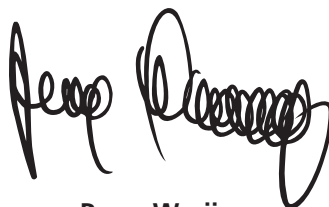
On this occasion, the Board of Governors of Bank Indonesia would like to express sincere appreciation to the BPK for their advice and recommendations for the bringing about of continuing improvements at Bank Indonesia. Our sincere gratitude also goes to the heads of all line units and all employees of Bank Indonesia, who have shown consistent commitment and cooperation in performing their duties and implementing the advice and recommendations of the BPK with the result that Bank Indonesia has been able to maintain its Unqualified Opinion.

In addition, in implementation of article 61(4) of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as amended by Act Number 6 of 2009 on the Ratification into Law of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2008 concerning the Second Amendment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, the 2012 Annual Financial Statements have also been published by Bank Indonesia in the media and on the official website of Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

In conclusion, we hope that these financial statements will serve as beneficial references and will provide added value to the public.

Jakarta, Juni 2013
Jakarta, June 2013

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA
DEPUTY GOVERNOR OF BANK INDONESIA



Perry Warjiyo

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Independent Auditor's Report on the Financial Statements





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
State Audit Board of the Republic of Indonesia

Nomor/Number: 24/01a/LHP/XV/04/2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Independent Auditor's Report on the Financial Statements

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) telah memeriksa Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Bank Indonesia, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem

Pursuant to Law Number 15 of 2004 on the Audit of State Financial Management and Responsibilities, Law Number 15 of 2006 on the State Audit Board and Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia as most recently amended by the Law Number 6 of 2009, the BPK RI has audited the Bank Indonesia Balance Sheets as per 31 December 2012 and 2011, the Statements of Surplus (Deficit), Changes in Equity, and Cash Flows for the years ended on the same dates and Notes of the Financial Statements. These financial statements are the responsibility of Bank Indonesia. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audits in accordance with the State Financial Audit Standards. The standards require us to plan and perform audits to obtain reasonable assurances that the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by Bank Indonesia, evaluating the reliability of internal control system which have material impacts on the financial statements, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. The BPK-RI

pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Surplus Defisit, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan bank sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern disajikan dalam Laporan Nomor 24/01b/LHP/XV/04/2013 dan Nomor 24/01c/LHP/XV/04/2013 tanggal 18 April 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

believes that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements as mentioned above presents fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as at 31 December 2012 and 2011, the Statements of Surplus (Deficit), as well as cash flows of the years ended in conformity with generally accepted accounting principles and specific accounting policies generally adopted by Central Banks, as discussed in Note B to the Financial Statements.

The report on findings of our test of compliance with the laws and regulations in effect, and the report on findings of our test of Bank Indonesia's internal control system are presented in reports Number 24/01b/LHP/XV/04/2013 and Number 24/01c/LHP/XV/04/2013 both dated April 18, 2013 respectively, which are integral part of these statements.

Jakarta, 18 April 2013
Jakarta, April 18, 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan
Deputy in Charge of Audit:

Signed

Harry Purwaka, SE, MSF, Ak.
Register Negara No. D-38431
State Register Number D-38431

LAPORAN KEUANGAN
Financial Statements



BANK INDONESIA

NERACA | BALANCE SHEET

Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)As at December 31, 2012 and December 31, 2011
(IDR million)

AKTIVA	Catatan Notes	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	ASSETS
1. Emas	B.6, C.1	38.248.767	33.510.109	1. Gold
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.2	11.842	4.010	2. Foreign Currencies
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.3	26.254.734	24.445.657	3. Holdings of Special Drawing Rights
4. Giro	B.4, B.9, C.4	55.434.566	22.514.306	4. Demand Deposits
5. Deposito	B.4, B.10, C.5	98.062.115	76.659.783	5. Time Deposits
6. Surat Berharga	B.4, B.11, C.6	874.344.507	843.126.744	6. Marketable Securities
7. Surat Berharga Negara Republik Indonesia	B.12, C.7	108.430.258	82.402.779	7. Government Bonds
8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	B.13, C.8	0	0	8. Securities Purchased Under Resale Agreements
9. Tagihan		252.760.307	258.789.993	9. Claims
9.1. Kepada Pemerintah	B.14, C.9	243.056.782	247.552.945	9.1. on Government
9.2. Kepada Bank	B.15, C.10	3.225.921	4.398.970	9.2. on Banks
9.3. Kepada Lainnya	B.16, C.11	6.477.604	6.838.078	9.3. Others
10. Penyertaan	B.17, C.12	675.212	628.952	10. Equity Participations
11. Aktiva Lain-lain	B.18, B.32, B.33, C.13, C.29	77.595.949	41.022.806	11. Other Assets
12. Penyisihan Aktiva	B.20, C.14	(12.292.109)	(11.263.320)	12. Allowance for Bad Debts
JUMLAH AKTIVA		1.519.526.148	1.371.841.819	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA NERACA BALANCE SHEET Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 As at December 31, 2012 and December 31, 2011 (Dalam Jutaan Rupiah) (IDR million)				
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan Notes	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	LIABILITIES AND EQUITY
A. KEWAJIBAN				A. LIABILITIES
1. Uang dalam Peredaran	B.21, C.15	439.730.814	372.982.462	1. Currency in Circulation
2. Giro		345.491.704	343.132.261	2. Demand Deposits
2.1. Pemerintah	B.4, B.22, C.16	53.919.048	90.371.330	2.1. Government
2.2. Bank	B.4, B.22, C.17	290.364.048	251.387.574	2.2. Banks
2.3. Lainnya	B.4, B.22, C.18	1.208.608	1.373.357	2.3. Others
3. Sertifikat Bank Indonesia	B.23, C.19	77.282.423	117.367.163	3. Bank Indonesia Certificates
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	B.24, C.20	3.455.000	3.476.000	4. Bank Indonesia Sharia Certificates
5. Penempatan Berjangka	B.25, C.21	208.511.902	152.839.020	5. Term Deposits
6. Penempatan Dana	B.26, C.22	69.024.266	152.474.286	6. Deposit Facilities
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	B.27, C.23	15.582.200	17.403.100	7. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	B.28, C.24	99.591.644	68.752.428	8. Securities Sold Under Repurchase Agreements
9. Pinjaman dari Pemerintah	B.4, B.29, C.25	98.086	119.084	9. Loans from Government
10. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.30, C.26	3.427.704	4.477.603	10. Foreign Borrowings
11. Alokasi Hak Tarik Khusus	B.8, C.27	29.520.637	27.483.875	11. Allocation of Special Drawing Rights
12. Kewajiban Lain-lain	B.19, B.32, C.28, C.29	61.341.300	21.762.262	12. Other Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		1.353.057.680	1.282.269.544	TOTAL LIABILITIES
B. EKUITAS				B. EQUITY
1. Modal	C.30	17.114.024	16.876.926	1. Capital
2. Cadangan Umum	C.31	17.145.069	41.555.776	2. General Reserves
3. Cadangan Tujuan	C.31	13.168.140	13.906.146	3. Statutory Reserves
4. Keuntungan Atau Kerugian Yang Belum Direalisasi	B.31, C.32	113.221.542	42.382.140	4. Unrealized Gains/Losses
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		5.819.693	(25.148.713)	5. Current Year Surplus (Deficit)
JUMLAH EKUITAS		166.468.468	89.572.275	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.519.526.148	1.371.841.819	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
 See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA				
LAPORAN SURPLUS DEFISIT		SURPLUS DEFICIT STATEMENT		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)		For the Period of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 (IDR million)		
	Catatan <i>Notes</i>	1 Januari - 31 Desember 2012 <i>January 1 - December 31, 2012</i>	1 Januari - 31 Desember 2011 <i>January 1 - December 31, 2011</i>	
PENERIMAAN				REVENUES
1. Pengelolaan Moneter		39.478.797	15.999.584	1. Monetary Operations
1.1. Pengelolaan Devisa	C.33	24.697.913	23.421.345	1.1. Foreign Reserves Management
1.2. Pengelolaan SSB Dalam Negeri	C.34	7.074.621	3.756.152	1.2. Domestic Securities
1.3. Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.35	289.421	515.888	1.3. Credit and Financing
1.4. Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	C.36	7.416.842	(11.693.801)	1.4. Exchange Differences
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	C.37	241.272	223.897	2. Payment System Services
3. Pengawasan Perbankan	C.38	26.264	17.467	3. Banking Supervision
4. Lainnya	C.39	289.262	1.108.197	4. Others
JUMLAH PENERIMAAN		40.035.595	17.349.145	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
1. Pengendalian Moneter		19.273.675	30.357.609	1. Monetary Operations
1.1. Operasi Moneter	C.40	19.006.279	30.092.015	1.1. Monetary Operations
1.2. Pengelolaan Devisa	C.41	143.487	67.827	1.2. Foreign Reserves Management
1.3. Pinjaman Luar Negeri	C.42	92.384	178.422	1.3. Foreign Borrowing Management
1.4. Lainnya		31.525	19.345	1.4. Others
2. Jasa Giro Pemerintah	C.43	4.156.871	4.666.712	2. Interest Expenses on Government Accounts
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.44	1.464.402	2.010.016	3. Payment System Operations
3.1. Sistem Pembayaran Tunai		1.439.975	1.987.204	3.1. Currency Circulation
3.2. Sistem Pembayaran Non Tunai		24.427	22.812	3.2. Payment System Sponsoring
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	C.45	183.002	174.917	4. Banking Regulations and Supervision
5. Umum dan Lainnya	C.46	6.861.415	5.352.895	5. General and Others
5.1. SDM dan Logistik		5.726.167	4.294.839	5.1. Human Resources and Logistics
5.2. Lainnya		1.135.248	1.058.056	5.2. Others
JUMLAH BEBAN		31.939.365	42.562.149	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		8.096.230	(25.213.004)	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAX
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		(2.276.537)	64.291	INCOME TAX REVENUES (EXPENSES)
SURPLUS (DEFISIT)		5.819.693	(25.148.713)	SURPLUS (DEFICIT)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA					
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL			STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AND CAPITAL RATIO		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)			For the Period of January 1 to December 31, 2012 (IDR Million)		
	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>	Penambahan <i>Addition</i>	Pengurangan <i>Deduction</i>	31 Desember 2012 <i>December 31, 2012</i>	
I. EKUITAS					I. EQUITY
1. Modal	16.876.926	541.342	304.244	17.114.024	1. <i>Capital</i>
2. Cadangan Umum	41.555.776	738.006	25.148.713	17.145.069	2. <i>General Reserves</i>
3. Cadangan Tujuan	13.906.146	0	738.006	13.168.140	3. <i>Statutory Reserves</i>
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	42.382.140	70.839.402	0	113.221.542	4. <i>Unrealized Gains/Losses</i>
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(25.148.713)	5.819.693	(25.148.713)	5.819.693	5. <i>Current Year Surplus (Deficit)</i>
	89.572.275	77.938.443	1.042.250	166.468.468	
II. KEWAJIBAN MONETER (Catatan C.47)				1.257.699.156	II. MONETARY LIABILITIES (Note C.47)
III. RASIO MODAL SEBELUM DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.47)				3,14%	III. CAPITAL RATIO BEFORE DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS (Note C.47)
IV. SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH				0	IV. TRANSFER OF SURPLUS TO GOVERNMENT
V. RASIO MODAL SETELAH DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH				3,14%	V. CAPITAL RATIO AFTER DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)

CASH FLOW STATEMENT

For the Period of 1 January to December 31, 2012
(IDR Million)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		1. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM OPERATIONS
1.1. Surplus	5.819.693	1.1. Surplus
1.2. Kenaikan Emas	(4.738.658)	1.2. Increase in Gold
1.3. Kenaikan Uang Asing	(7.832)	1.3. Increase in Foreign Currencies
1.4. Kenaikan Hak Tarik Khusus	(1.809.077)	1.4. Increase in Special Drawing Rights
1.5. Kenaikan Giro	(32.920.260)	1.5. Increase in Demand Deposits
1.6. Kenaikan Deposito	(21.402.332)	1.6. Increase in Time Deposits
1.7. Kenaikan Surat Berharga	(31.217.763)	1.7. Increase in Marketable Securities
1.8. Kenaikan Surat Berharga Negara Republik Indonesia	(26.027.479)	1.8. Increase in Government Bonds
1.9. (Kenaikan) Penurunan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	0	1.9. (Increase) Decrease in Securities Purchased Under Resale Agreements
1.10. Penurunan Tagihan:	6.029.686	1.10. Decrease in Claims:
1.10.1. Penurunan Tagihan kepada Pemerintah	4.496.163	1.10.1. Decrease in Claims on Government
1.10.2. Penurunan Tagihan kepada Bank	1.173.049	1.10.2. Decrease in Claims on Banks
1.10.3. Penurunan Tagihan Kepada Lainnya	360.474	1.10.3. Decrease in Claims on Others
1.11. Kenaikan Aktiva Lain-lain	(36.135.159)	1.11. Increase in Other Assets
1.12. Penyesuaian-penyesuaian	1.534.106	1.12. Adjustments
1.12.1. Penyisihan Aktiva	1.028.789	1.12.1. Allowance for Bad Debts
1.12.2. Penyusutan Aktiva Tetap	482.956	1.12.2. Fixed Assets Depreciation
1.12.3. Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	22.361	1.12.3. Intangible Assets Amortization
1.12.4. Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha	0	1.12.4. Capital Lease Amortization
1.13. Kenaikan Uang dalam Peredaran	66.748.352	1.13. Increase in Currency in Circulation
1.14. Kenaikan Giro	2.359.443	1.14. Increase in Demand Deposits
1.14.1. Penurunan Giro Pemerintah	(36.452.282)	1.14.1. Decrease in Government Demand Deposits
1.14.2. Kenaikan Giro Bank	38.976.474	1.14.2. Increase in Bank Demand Deposits
1.14.3. Penurunan Giro Pihak Swasta Lainnya	(164.749)	1.14.3. Decrease in Other Private Parties Demand Deposits
1.15. Penurunan Sertifikat Bank Indonesia	(40.084.740)	1.15. Decrease in Bank Indonesia Certificates
1.16. Penurunan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	(21.000)	1.16. Decrease in Bank Indonesia Sharia Certificates
1.17. Kenaikan Penempatan Berjangka	55.672.882	1.17. Increase in Term Deposits
1.18. Penurunan Penempatan Dana	(83.450.020)	1.18. Decrease in Deposit Facilities
1.19. Penurunan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	(1.820.900)	1.19. Decrease in Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
1.20. Kenaikan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	30.839.216	1.20. (Increase) Decrease in Securities Purchased Under Resale Agreements
1.21. Kenaikan Alokasi Hak Tarik Khusus	2.036.762	1.21. Increase in Special Drawing Rights
1.22. Kenaikan Kewajiban Lain-lain	39.579.038	1.22. Increase in Other Liabilities
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(69.016.042)	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Operating Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS CASH FLOW STATEMENT Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 For the Period of 1 January to December 31, 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) (IDR Million)		
2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		2. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM INVESTING ACTIVITIES
2.1. Kenaikan Penyertaan	(46.260)	2.1. Increase in Equity Participation
2.2. Kenaikan Aktiva Tetap	(871.693)	2.2. Increase in Fixed Assets
2.3. (Kenaikan) Penurunan Aktiva Sewa Guna Usaha	0	2.3. (Increase) Decrease in Leasing Assets
2.4. Kenaikan Aktiva Tidak Berwujud	(71.608)	2.4. Increase in Intangible Assets
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(989.561)	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Investing Activities
3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		3. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM FINANCING ACTIVITIES
3.1. Kenaikan Modal	237.098	3.1. Increase in Capital
3.2. Penurunan Pinjaman dari Pemerintah	(20.998)	3.2. Decrease in Loans from Government
3.3. Penurunan Pinjaman Luar Negeri	(1.049.899)	3.3. Decrease in Foreign Borrowings
3.4. Penurunan Cadangan Umum	(24.410.707)	3.4. Decrease in General Reserves
3.5. Penurunan Cadangan Tujuan	(738.006)	3.5. Decrease in Statutory Reserves
3.6. Kenaikan Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	70.839.402	3.6. Increase in Unrealized Gains/Losses
3.7. Defisit Tahun Lalu	25.148.713	3.7. Previous Year's Deficit
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	70.005.603	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Financing Activities
4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS	0	4. NET INCREASE/DECREASE IN CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
 See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Notes To Financial Statements



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

A. UMUM**1. Organisasi Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU, yang selanjutnya disebut UU Bank Indonesia.

Sesuai Pasal 7 UU Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, Bank Indonesia melaksanakan semua kegiatannya tidak atas dasar pertimbangan komersial untuk mencari keuntungan, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

A. GENERAL**1. Organization of Bank Indonesia**

Bank Indonesia is the Central Bank of The Republic of Indonesia and was established based on Indonesia Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia as amended by Act Number 6 of 2009 on the Ratification into Law of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2008 regarding the Second Amendment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia.

In accordance with Article 7 of Republic of Indonesia the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of Rupiah. To achieve the objective Bank Indonesia has the following duties:

- a. Formulating and implementing monetary policies;*
- b. Regulating and safeguarding the smooth operation of the payment system; and*
- c. Regulating and supervising the banking sector.*

In relation to the above duties, the activities of Bank Indonesia are not performed on a commercial basis, but are aimed at controlling the Rupiah and maintaining financial system stability.

In performing the duties, Bank Indonesia is led by the Board of Governors, consisting of a governor, a Senior Deputy Governor and a maximum of 7 (seven) Deputy Governors. The members of the Board of Governors as at December 31, 2012 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Gubernur : Darmin Nasution
Deputi Gubernur Senior : -
Deputi Gubernur : Hartadi A. Sarwono
Halim Alamsyah
Ronald Waas

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Khusus untuk Deputi Gubernur, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

Pada 31 Desember 2012, susunan Dewan Gubernur terdiri dari seorang Gubernur dan tiga orang Deputi Gubernur. Berkurangnya jumlah Anggota Dewan Gubernur ini disebabkan belum ditetapkannya pengganti Sdr. Budi Mulya dan Sdr. Ardhayadi M. yang telah habis masa jabatannya sejak tanggal 28 November 2012. Selain itu Sdr. Muliaman D. Hadad sesuai Keputusan Presiden Nomor 68/P tahun 2012, sejak tanggal 18 Juli 2012 diberhentikan dari Jabatan Deputi Gubernur. Selanjutnya sesuai Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012, sejak tanggal 18 Juli 2012 Sdr. Muliaman D. Hadad diangkat menjadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 14/3/PDG/2012 tentang Pangkat, Jabatan, Satuan Kerja, Unit Kerja dan Eselon di Bank Indonesia, terdapat perubahan penyebutan Direktorat menjadi Departemen serta perubahan penyebutan Kantor Bank Indonesia serta Kantor Perwakilan menjadi Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Kantor Perwakilan Luar Negeri. Bank Indonesia memiliki 41 Kantor Perwakilan Dalam Negeri yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Governor : Darmin Nasution
Senior Deputy Governor : -
Deputy Governors : Hartadi A. Sarwono
Halim Alamsyah
Ronald Waas

Under Article 41(1) of the Bank Indonesia Act, it is said that Governor, Deputy Senior Governors and Deputy Governors are proposed and appointed by the President upon approval of the House of Representatives. In particular, the candidates of deputy Governors are proposed by the President based on the recommendation of the Governor, as stipulated in Article 41 (2).

As at December 31, 2012, the membership of the Bank Indonesia's Board of Governors consist of 1 (one) Governor and 3 (three) deputy governors. The decrease of the number of the Deputy Governors due to the substitution of Mr. Budi Mulya has not been determined, also for Mr. Ardhayadi M. whose the term of office expired on 28 November 2012. Besides, Mr. Muliaman D. Hadad as at Presidential Decree Number 68/P of 2012 was dismissed from Deputy Governor's position. Further, as at Presidential Decree Number 67/P of 2012 effective on 18 July 2012 Mr. Muliaman D. Hadad was appointed as the Head of Commissioner Board of Financial Services Authority (OJK).

Bank Indonesia's headquarters are located in M.H. Thamrin No. 2 Jakarta. Based on Board of Governors regulation Number 14/3/PDG/2012 concerning Rank, Position, Task Force and Echelon in Bank Indonesia, there are some changes in the terms of Directorate which is changed into Department and Bank Indonesia's Office and Representative Office which are changed into Domestic Representative Office and Foreign Representative Office of Bank Indonesia. Bank Indonesia has 41 Domestic Representative Offices around Indonesia

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

empat Kantor Perwakilan Luar Negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.607 pegawai.

2. Kebijakan Bank Indonesia yang Berimplikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Tahunan

Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah penguatan operasi moneter dengan sasaran akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi pengelolaan eksekusi likuiditas, upaya pendalaman pasar uang domestik, dan upaya meminimalkan dampak negatif aliran modal asing jangka pendek, serta mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Moneter. Adapun kebijakan yang dikeluarkan antara lain:

- a. Implementasi kebijakan moneter ke sektor riil akan berjalan sempurna apabila transmisi kebijakan moneter optimal melalui implementasi *Global Master Repo Agreement* (GMRA), penyusunan *Bye Laws*, pengaktifan Pasar Repo, pengembangan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) sebagai *reference rate* dan asesmen *Central Counter Party* (CCP) dan *Electronic Trading Platform* (ETP). Di pasar valas, upaya pendalaman pasar dilakukan melalui evaluasi ketentuan transaksi valas domestik, pengaktifan pasar *swap* dan transaksi *hedging*, serta pengembangan sistem monitoring antar valas.
- b. Bank Indonesia pada tanggal 8 Juni 2012 mengeluarkan instrumen Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) valas Bank Indonesia yang diatur dalam SE Nomor 14/18/DPM tanggal 8 Juni 2012 perihal Perubahan Keempat atas SE Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

and 4 Foreign Representative Offices with the current total of 5,607 employees.

2. *Bank Indonesia Policies with Implications for the Presentation of the Annual Financial Statements*

During 2012, Bank Indonesia has implemented some efforts to strengthen the monetary operations with the final aim to achieve and maintain the Rupiah stability. The efforts have been done using excess liquidity management strategy, domestic financial markets penetration, minimizing negative impacts on short term offshore capital inflows and optimizing the use of monetary operation instruments. Some policies have been implemented as follows:

- a. *The implementation of monetary policies to real sector will run seamlessly if the use of monetary policies transmission is in optimum way by implementing Global Master Repo Agreement (GMRA), the arrangement of Bye Laws, activation of Repo Market, development of Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) as reference rate and assessment of Central Counter Party (CCP) and Electronic Trading Platform (ETP). In foreign currency markets, the market penetration has been done using domestic foreign currency transactions evaluation, activation of swap market and hedging transactions, and development of inter currency monitoring system.*
- b. *In June 8, 2012 Bank Indonesia has issued Bank Indonesia Foreign Currency Term Deposit Instrument and regulated by Bank Indonesia Circular Number 14/18/DPM dated June 8, 2012 concerning the 4th Amendment on Bank Indonesia Circular Number 12/18/DPM dated July 7, 2010 on Open Market Operations.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

- c. Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan sebagai upaya dalam mendukung pendalaman pasar valas domestik yang diarahkan untuk tetap mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah, yang terdiri dari:
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/10/PBI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.
 - PBI Nomor 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa.
- d. Salah satu instrumen penyerapan eksekusi likuiditas adalah melalui transaksi reverse repo Surat Berharga Negara (SBN). Penyerapan eksekusi likuiditas melalui reverse repo SBN dilakukan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) konvensional maupun OPT syariah. Peningkatan penggunaan SBN sebagai instrumen operasi moneter sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sangat tergantung pada SBN yang dimiliki Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pembelian SBN (building stock) dalam kerangka strategi operasi moneter yang secara bertahap akan menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan SBN sebagai instrumen operasi moneter utama penyerap likuiditas. Strategi pembelian SBN oleh Bank Indonesia harus memperhatikan volume dan timing pembelian SBN dengan mempertimbangkan antara lain likuiditas pasar, perkembangan nilai tukar dan kondisi pasar SBN (harga dan supply SBN). Terdapat peningkatan reverse repo SBN sebesar Rp30.839.216 juta yaitu dari Rp68.752.428 juta pada tahun 2011 menjadi Rp99.591.644 juta pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menggantikan secara bertahap instrumen SBI sebagai instrumen utama dengan SBN.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- c. Bank Indonesia has issued some regulations for supporting the domestic foreign currency markets in order to keep on encouraging economic activities and Rupiah exchange stability. The regulations were as follows:
- Bank Indonesia Regulation Number 14/10/PBI/2012 dated August 8, 2012 on the Limitation of Rupiah Transactions and Lending in Foreign Currencies.
 - Bank Indonesia Regulation Number 14/21/PBI/2012 dated December 21, 2012 on Reporting of Foreign Exchange Activities.
- d. One of liquidity excess instruments is the use of reverse repo transactions of Government bonds. The absorption of excess liquidity through reverse repo transactions of Government bonds has been done by conventional or Sharia Open Market Operations. The increase in the use of Government bonds as monetary operations instrument as mandated by Law Number 1 year 2004 concerning State Treasury, is entirely depending on the Government bonds owned by Bank Indonesia. Bank Indonesia has bought Government bonds (building stock) within the Monetary Operations Strategy and will gradually substitute Bank Indonesia Certificates as the main instrument in Monetary Operations to absorb excess validity. The strategy in purchasing Government bonds by Bank Indonesia should consider volume and timing of the purchase. It should also consider liquidity in the markets, foreign exchange rates and market condition of Government bonds (price and supply). There is an increase of reverse repo of Government bonds by IDR30,839,216 million from IDR68,752,428 million in year 2011 to IDR99,591,644 million in year 2012. This is in line with the efforts of Bank Indonesia to gradually substitute Bank Indonesia Certificates with Government bonds as the main instrument.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- e. Dalam Operasi Moneter Syariah, Bank Indonesia tetap melakukan pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek di pasar perdana untuk mendukung pencapaian target operasional pengendalian moneter syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan beberapa peraturan terkait upaya pengembangan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), yaitu SE Nomor 14/3/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah dan SE Nomor 14/2/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.
- f. Dalam PBI Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan GWM dalam valas.
- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari:
- GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah.
 - GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah.
 - GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank dan KPM Insentif. Kewajiban pemenuhan GWM LDR berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011.
- e. *In Sharia Monetary Operations, Bank Indonesia keeps on purchasing short-term Sharia Government Bonds on the primary market to support the achievement of Sharia monetary control operations. In addition, Bank Indonesia has also issued some regulations in relation with the effort to develop Inter Sharia Banks Money Market (Pasar Uang Antar Bank Syariah - PUAS), which are Bank Indonesia Circular Number 14/3/DPM dated January 4, 2012 concerning Commodity Trade Certificates Based on Sharia Principles and Bank Indonesia Circular Number 14/2/DPM dated January 4, 2012 concerning Inter Banks Mudharabah Investment Certificates.*
- f. *Under Bank Indonesia Regulation Number 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010 concerning Bank Minimum Reserve Requirements (Giro Wajib Minimum – GWM) of in Rupiah and foreign currencies as most recently amended by Bank Indonesia regulation Number 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011 banks are required to maintain GWM both in Rupiah and foreign currencies.*
- 1) *The GWM which should be maintained in Rupiah consists of:*
- Primary GWM in Rupiah is 8% of Third Party Funds;*
 - Secondary GWM in Rupiah is 2.5% of Third Party Funds;*
 - GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) is calculated using Lower and Upper Disincentive Parameters of the differences between Bank LDR and Targeted LDR and considering the difference between Capital Adequacy Ratio (CAR) of Bank and CAR of Incentive. LDR GWM obligation has been enforced since March 1, 2011.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

- 2) Ketentuan pemenuhan GWM dalam valas ditetapkan sebesar 8% dari DPK.

Bank Indonesia memberikan jasa giro dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. Bagian tertentu yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam rupiah maupun valas dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valas bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam rupiah bagi perbankan syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas sebesar 1% dari DPK dalam valas. Disamping itu, bagi perbankan syariah yang memiliki DPK diatas Rp1triliun dan memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah (*financing to deposit ratio*) kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp1 triliun s.d. Rp10 triliun maka bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 1% dari DPK. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp10 triliun s.d. Rp50 triliun maka bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 2% dari DPK. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp50 triliun maka bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 3% dari DPK. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- 2) *GWM in foreign currencies is 8% of Third Party Funds.*

Bank Indonesia also provides interest for bank demand deposits on working days of 2.5% per annum for particular amount of compulsory primary GWM in Rupiah. This particular number is determined at 3% from Third Party Funds in Rupiah. Interest is given when bank has fulfilled all obligations of GWM in Rupiah.

The obligation to maintain GWM in Rupiah and in foreign currencies also applied to banks which perform their activities based on Sharia Principles; Commercial Sharia Banks and Sharia Business (Unit Usaha Syariah – UUS). As at Bank Indonesia Regulation Number 6/21/2004 dated August 3, 2004 concerning Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for commercial banks performing their activities based on Sharia Principles, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008, GWM in Rupiah for Sharia Banks is determined at 5% of Third Party Funds in Rupiah and GWM in foreign currencies is determined at 1% of Third Party Funds in foreign currencies. Besides, for Sharia Banks with Third Party Funds more than IDR1 trillion and the Financing to Deposit Ratio in Rupiah is less than 80%, additional GWM in Rupiah is also applied at 1%, 2% and 3%, depending on the amount of Third Party Funds of the banks. If a bank has Third Party Funds more than IDR1 trillion to up to IDR10 trillion the bank should maintain additional GWM of 1% of Third Party Funds. If the bank has the Third Party Funds is between IDR10 trillion and IDR50 trillion the bank should maintain additional GWM of 2% of Third Party Funds. And if the bank has the Third Party Funds more than IDR50 trillion, it should maintain additional GWM of 3% of Third Party Funds. Bank Indonesia does not provide deposit account to Sharia banks.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

3. Kondisi Keuangan Bank Indonesia

Sebagai dampak dari kondisi perekonomian global, pada semester pertama tahun 2012 Indonesia mengalami aliran keluar dana asing (*net capital outflow*) terkait pelepasan aset keuangan domestik dan masih tingginya eksese likuiditas di sektor perbankan, namun secara tahunan selama tahun 2012 Indonesia mengalami *net capital inflow*.

Atas kondisi tersebut, Bank Indonesia merespon dengan bauran kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan *capital flows*, dan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan likuiditas serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Inflasi tahun 2012 (yoy) tercatat sebesar 4,30% atau berada pada kisaran target inflasi Bank Indonesia sebesar $4,5\% \pm 1\%$. Sedangkan nilai tukar rupiah pada akhir 2012 mengalami depresiasi sebesar 5,9% dibandingkan pada akhir tahun 2011. Namun demikian, selama tahun 2012 Bank Indonesia berhasil menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada level yang relatif rendah.

Outstanding eksese likuiditas yang diserap melalui instrumen moneter tercatat turun sebesar 24%, yaitu dari Rp512 triliun pada akhir tahun 2011 menjadi Rp473 triliun pada akhir tahun 2012. Selain itu, sejalan dengan semakin menurunnya porsi SBI dalam operasi moneter, maka penyerapan eksese likuiditas lebih banyak dilakukan melalui instrumen *reverse repo* SBN dan Penempatan Berjangka yang memiliki *rate* lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Selama tahun 2012, Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan penurunan BI *rate* sebesar 25 bps sejak Februari 2012 serta penyesuaian suku bunga Penempatan Dana yang menyebabkan suku bunga

3. Bank Indonesia's Financial Condition

As an impact of the global economic conditions, in the first semester of 2012 Indonesia experienced net capital outflow related to the release of domestic financial assets and banking excess liquidity which was relatively high. But in the year term, during 2012 Indonesia has experienced net capital inflow.

In responding these conditions, Bank Indonesia has implemented a range of policies consisting of interest rate policy, exchange rate policy, macroprudential policy for managing capital inflows, macroprudential policy to managing liquidity and coordinating policies with the Government.

Bank Indonesia has set some policies to control inflation rate and stabilizing the exchange rate. Year on year Inflation rate in 2012 was 4.30% or within the target of Bank Indonesia of $4.5\% \pm 1\%$. And the exchange rate of Rupiah at the end of 2012 lowered by 5.9% if compared to the end of 2011. However, during 2012 Bank Indonesia has succeeded in maintaining Rupiah's exchange rate volatility at a relatively low level.

Outstanding liquidity excess which was absorbed by monetary instrument has been lowered by 24%; from IDR512 trillion on the end of 2011 to IDR473 trillion in the end of 2012. Besides, in accordance with the decrease of Bank Indonesia Certificates in the monetary operations, the absorption of excess liquidity mostly done with Government bonds reverse repo instrument and Term Deposits with lower interest rate if compared to those in 2011. During 2012 Bank Indonesia has also implemented policies to lower the BI rate by 25 basis points since February 2012 and adjustment to interest rate in Term Deposits. These caused the overall interest

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

operasi moneter secara keseluruhan turun dan berimbas pada turunnya beban operasi moneter. Beban Operasi Moneter selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 menurun sebesar Rp11.085.736 juta (36,84%) dibandingkan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 sebesar Rp30.092.015 juta.

Laporan Surplus (Defisit) Bank Indonesia periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 menunjukkan surplus sebelum pajak sebesar Rp8.096.230 juta yang berasal dari penerimaan sebesar Rp40.035.595 juta dikurangi beban sebesar Rp31.939.365 juta. Adapun surplus setelah pajak adalah sebesar Rp5.819.693 juta yang berasal dari surplus sebelum pajak sebesar Rp8.096.230 juta dikurangi Beban Pajak Tangguhan sebesar Rp2.276.537 juta.

Bagian terbesar beban Bank Indonesia selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012, adalah beban Operasi Moneter sebesar Rp19.006.279 juta atau 59,51% dari total beban Bank Indonesia. BI rate periode 1 Januari s.d. 8 Februari 2012 sebesar 6,00%, sedangkan BI rate periode 9 Februari s.d. 31 Desember 2012 adalah sebesar 5,75%.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Bank Indonesia menyusun Laporan Keuangan Tahunan (LKTBI) berdasarkan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. PAKBI selalu disempurnakan agar senantiasa sejalan dengan perkembangan bisnis Bank Indonesia. Untuk hal-hal

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

rate of monetary operations has been decreased and has an impact in the decrease of monetary operations' cost. The cost of Monetary Operations as at January 1 to December 31, 2012 decreased by IDR11,085,736 million (36.84%) compared to January 1 to December 31, 2011 of IDR30,092,015 million.

Surplus (Deficit) Statement of Bank Indonesia as at January 1 to December 31, 2012 shows a surplus before tax by IDR8,096,230 million. This is from the revenue of IDR40,035,595 million minus IDR31,939,365 million of costs. And the surplus after tax shows at IDR5,819,693 million coming from the surplus before tax of IDR8,096,230 million minus Deferred Tax of IDR2,276,537 million.

The biggest part of Bank Indonesia's cost as at January 1 – December 31, 2012 is at Monetary Operations of IDR19,006,279 million or 59.51% of total cost of Bank Indonesia. BI rate as at January 1 – February 8, 2012 is 6.00%, and as at February 9 – December 31, 2012 is 5.75%.

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Bank Indonesia Annual Financial Statements (LKTBI) have been prepared based on the Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines (PAKBI). PAKBI is in conformity with generally accepted accounting principles as set out in the Indonesian Financial Accounting Standards (Standar Akuntansi Keuangan – SAK), International Accounting Standard (IAS), Bank Indonesia's internal regulations and best practices in other central banks, as well as the agreements between Bank Indonesia, the State Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan – BPK RI) and the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia – IAI). PAKBI is continuously revised for it is always in accordance with

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

yang belum diatur dalam PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan akuntansi yang signifikan secara konsisten dalam penyusunan LKTBI untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

Bank Indonesia menyajikan LKTBI dalam mata uang pelaporan rupiah, dan menyusun LKTBI atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

2. Taksiran Manajemen

Bank Indonesia menyusun LKTBI sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum yang mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, mengungkapkan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan, serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Bank Indonesia mengakui pendapatan bunga dari penanaman dana secara akrual. Akualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *non-performing*.

4. Transaksi dalam Valuta Asing

Bank Indonesia membukukan transaksi valas dengan metode pembukuan *multi currency accounting*.

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

the business development of Bank Indonesia. In the case of any matters not provided for in the PAKBI, Bank Indonesia's Accounting Policy adheres to generally accepted accounting principles.

Bank Indonesia had consistently applied significant accounting policies in preparing the Financial Statements for the period of January 1 – December 31, 2012 were as follows:

1. Basis for Preparation of Financial Statements

Bank Indonesia presents this Financial Statements in Rupiah and prepared on the accrual basis with historical cost concept, except for certain accounts which are presented using other measurements as stated in the accounting policy of each account.

2. Management Estimations

Bank Indonesia has prepared the Financial Statements as at generally accepted accounting principles which requires the management to make estimations and assumptions that may affect the amount of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amount of revenues and expenses reported during the period or reporting.

3. Recognition of Interest Income

Bank Indonesia has recognized the interest income from the investment on an accrual basis. Accrued interest that was previously recognized is reversed at the time when the placements are classified as non-performing.

4. Transactions in Foreign Currencies

Bank Indonesia records transactions in foreign currencies using multi currency accounts. Transactions

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Transaksi valas dibukukan dalam *original currency* maupun dalam valuta rupiah. Transaksi valas dibukukan dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valas dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs neraca (kurs tengah valas yang dijadikan referensi) yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valas yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valas. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valas dihitung dari perkalian antara posisi netto valas dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valas.

Kurs Neraca Bank Indonesia untuk valas utama pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp9.670,00/USD, Rp12.809,86/EUR, Rp15.578,86/GBP, Rp10.025,39/AUD, Rp7.930,86/NZD, Rp14.906,11/SDR, Rp11.196,68/JPY100, dan Rp9.722,03/CAD.

5. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Keuangan. Hubungan istimewa dengan Kementerian Keuangan diwujudkan antara lain dengan adanya kewajiban pemenuhan modal Bank Indonesia, pemberian jasa giro atas penyimpanan dana di

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

in foreign currencies are recorded in the original currency or in Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah using the exchange rate prevailing at the transaction date. For the financial reporting purposes, assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rate prevailing at the balance sheet date (median exchange rate used as reference). The differences of amount rising from the periodical translations area recorded at the Unrealized Gains/Losses in the Equity section until the foreign exchanges are decreased. Bank Indonesia uses Net Currency Position (NCP) method in administering and recording foreign currency assets and liabilities. With this method, the result of the revaluation of foreign currency assets and liabilities is calculated from the multiplication of the net position of the foreign currency assets and liabilities with the difference between the balance sheet exchange rate and average cost of the foreign exchange currencies.

The rates of major foreign exchange as at December 31, 2012 are IDR9,670.00/USD, IDR12,809.86/EUR, IDR15,578.86/GBP, IDR10,025.39/AUD, IDR7,930.86/NZD, IDR14,906.11/SDR, IDR11,196.68/JPY100, and IDR9,722.03/CAD.

5. Transactions with Related Parties

Related parties of Bank Indonesia were as follows:

- a. *Government of the Republic of Indonesia here represented by the Ministry of Finance. The special relationship with the Ministry of Finance is realized among other things with the obligation to fulfill Bank Indonesia's capital requirements, to provide demand deposit services, and*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Bank Indonesia serta kesepakatan persyaratan dan rate khusus untuk Surat Utang Pemerintah.

- b. Karyawan Bank Indonesia dan badan/yayasan/perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).
- c. Badan/lembaga/yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

6. Emas

Emas dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang Asing disajikan di Neraca sebesar nilai nominal.

8. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota *International Monetary Fund* (IMF) atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, dan EUR) milik negara

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

conditional agreements and special rates for Government Bonds.

- b. The employees of Bank Indonesia and entities/foundation/enterprises representing the interests of the employees of Bank Indonesia. These include among others the Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia - DAPENBI) and Bank Indonesia Employees Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia - YKKBI).*
- c. Entities/institutions/foundations which are established to support activities of Bank Indonesia, among others including the Indonesian Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia - YPPI).*

All significant transactions with related parties whether or not made under similar terms and conditions as those conducted with third parties, are disclosed in the Financial Statements.

6. Gold

Gold is periodically evaluated at fair market values. The differences due to gold market price changes are recorded in the Equity account under Unrealized Gains/Losses.

7. Foreign Currencies

Foreign currencies are presented on the balance sheet at nominal value.

8. Holding on Special Drawing Rights

Special Drawing Rights (SDR) holding represents a potential claim to International Monetary Fund (IMF) countries on freely usable currencies (USD, JPY, GBP, and EUR) owned by other IMF members as SDR

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

anggota IMF lain sesama partisipan SDR *Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi. Hak Tarik Khusus disajikan di Neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akualisasi *interest on SDR holdings* dan *remuneration* yang masih harus diterima dan dikurangi dengan hasil akualisasi *assessment fee* dan *charges*. Alokasi Hak Tarik Khusus merupakan rekening lawan atas klaim di IMF, dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan di Neraca sebagai kewajiban pada pos Alokasi Hak Tarik Khusus.

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valas pada bank sentral negara lain atau pada bank komersial di luar negeri disajikan di Neraca sebesar nilai nominal.

10. Deposito

Deposito Bank Indonesia dalam valas pada bank di luar negeri disajikan di Neraca sebesar nilai nominal ditambah akualisasi bunga yang masih harus diterima.

11. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam rupiah dan valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Hold to Maturity*), Diperdagangkan (*Trading*), dan Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale*). SSB kelompok Dimiliki Hingga Jatuh Tempo disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto. SSB kelompok Diperdagangkan disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan (kerugian) tahun berjalan. SSB kelompok Tersedia untuk Dijual disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Department member when those countries agree to convert. SDR are presented at their nominal value plus interest accruing on SDR holdings and remuneration receivable, minus assessment fees and charges. The allocation of special drawing rights takes the form of a counter account to IMF claims, and are recorded based on their nominal value as presented on the Balance Sheet as liabilities in the Special Drawing Right Allocations item.

9. Demand Deposits

Bank Indonesia Demand Deposits in foreign currencies in other central banks or correspondent banks are presented on the balance sheet at nominal value.

10. Time Deposits

Bank Indonesia Time Deposits in foreign currencies in correspondent banks are presented on the balance sheet at nominal value together with the accrued interest.

11. Marketable Securities

Marketable Securities (SSB) in Rupiah and foreign currencies are classified based on the purpose of ownership; i.e. Hold to Maturity (HTM), Trading (T) and Available for Sale (AFS). HTM is presented at cost after premium/discount amortization. Trading securities is presented at fair market price value. The differences due to the market price changes of trading securities are recorded as gains or losses for the current year. AFS securities are presented at fair market price value. The differences due to the market price changes of AFS securities are presented in Unrealized Gains/Losses item in the Equity section.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Dalam kelompok SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Tersedia Untuk Dijual, terdapat SSB yang ditempatkan kepada agen peminjam dalam transaksi peminjaman surat berharga (*securities lending*) sebesar nilai tercatat. Atas transaksi peminjaman surat berharga tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* dan *non-cash*. Perolehan agunan tunai (*cash collateral*) yang diinvestasikan kembali dicatat sebagai nilai nominal dana yang diinvestasikan, sedangkan agunan non-tunai dari agen peminjam tidak diakui sebagai aset Bank Indonesia.

Within the HTM securities group are securities that are placed with agents as part of securities lending transactions. These are recorded at listing value. Bank Indonesia receives both cash and non-cash collaterals. A gain on cash collateral which is reinvested is recorded at the nominal value of the invested funds while non cash collateral from agents is not recognized as a Bank Indonesia's asset.

12. Surat Berharga Negara Republik Indonesia

Bank Indonesia memiliki Surat Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON). SPN adalah SUN dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. Sedangkan ON adalah SUN dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

12. Government Bonds

Bank Indonesia holds Government Bonds (Surat Utang Negara - SUN) and Sharia Government Bonds (Surat Berharga Syariah Negara - SBSN). SUN consist of Treasury Bills (Surat Perbendaharaan Negara - SPN) and Marketable Treasury Bond (Obligasi Negara - ON). Treasury Bills (SPN) are State Debt Securities with up to one year tenor while Marketable Treasury Bonds (ON) is State Debt Securities with more than one year tenor.

SBSN merupakan SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valas, sebagaimana dimaksud dalam UU yang berlaku.

SBSN are Government Bonds issued according to Sharia principles as proof of participation in SBSN assets and are denominated in Rupiah or foreign currencies. These are in accordance with the relevant legislation.

SUN dan SBSN untuk operasi moneter diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual dan disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas. Bunga ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia.

SUN and SBSN for monetary operations are classified as AFS and presented at fair market value. The differences due to the market price changes are recorded in Unrealized Gains/Losses item in the Equity section. The accrued interest of ON is presented in the Government Bonds item.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

13. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga.

14. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah (SUP), Obligasi Negara (ON), dan Tagihan Lainnya kepada Pemerintah.

- a. Surat Utang Pemerintah
SUP adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. SUP disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.
- b. Obligasi Negara
ON yang termasuk dalam pos ini adalah SUN dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih *outstanding*.
- c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah
Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di Neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

13. Securities Purchased Under Resale Agreements

Securities Purchased Under Resale Agreements owned by banks and sold to Bank Indonesia with an agreement to repurchase under a specific price and terms. These securities are presented under selling price. The differences between the selling price and the repurchase price are recognized as interest income.

14. Claims to Government

Claims on Government consist of State Debt Securities (Surat Utang Pemerintah – SUP), Government Bonds (Obligasi Negara – ON) and other claims on Government.

- a. State Debt Securities
State Debt Securities are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-marketable, with regulated payment schedule of outstanding value and interest. State Debt Securities are presented at their outstanding nominal value.
- b. Government Bonds
Government Bonds in this item are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-marketable and presented at their outstanding nominal value.
- c. Other Claims on Government
Other claims on Government Including interest claims are presented on the balance sheet at the outstanding value of the claims.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

15. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di Neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima.

16. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan atas pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di Neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

17. Penyertaan

Sesuai UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (*cost*), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari anak perusahaan setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

18. Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap/aktiva tidak berwujud dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi, kecuali aktiva tetap yang dinilai kembali disajikan sesuai nilai revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

15. Claims on Banks

Claims on Banks are presented on the balance sheet at the outstanding value plus accrued interest.

16. Claims on Others

Claims on others which include claims in respect of channeling credits and remaining program credits are presented on the balance sheet at their gross outstanding value.

17. Equity Participation

In accordance with Bank Indonesia Act, Bank Indonesia may conduct equity participation in legal entities or other entities deemed necessary on the implementation of the tasks of Bank Indonesia under the approval of the republic of Indonesia House of Representatives (DPR).

Equity participation with less than 20% ownership is presented at cost; meanwhile equity participation with ownership more than 20% is presented at cost price added by profit or loss of the subsidiary company subsequent to the equity participation.

In case of permanent impairment in the value of equity participation, the recorded value of equity participation is adjusted accordingly.

18. Fixed Assets/Intangible Assets

Fixed Assets/Intangible Assets are presented on the balance sheet as part of other assets at cost less accumulated depreciation, save in case of revalued fixed assets, which are stated at the revalued amount less accumulated depreciation.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disusutkan/diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

19. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pascakerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Imbalan pascakerja Bank Indonesia antara lain berupa Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Tunjangan Hari Tua. Program Tunjangan Hari Tua terdiri dari program manfaat pasti Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan manfaat terukur untuk Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT). Berdasarkan paragraf 25 dan 27 PSAK 24 tentang Imbalan Kerja (revisi 2010), metode akuntansi yang digunakan untuk TKHT adalah skema imbalan pasti.

Jumlah beban dan kewajiban imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

Beban dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 tentang Imbalan Kerja (revisi 2010).

20. Penyisihan Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam rupiah maupun valas, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktiva tersebut yang tercermin antara lain dari *rating*

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Fixed assets/intangible assets are depreciated/amortized based on estimated useful life of the asset concerned using the straight-line method.

19. Employee Benefits

Bank Indonesia provides an allowance for long-term benefits and post-employment benefits for the employees who have rendered their services and are entitled to accept the future benefits. Bank Indonesia has a defined benefit plan which is funded through contributions to Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia) and House Ownership Loan (Tunjangan Pemilikan Rumah - Tuperum) and Pensioner Health Facilities (Tunjangan Kesehatan Hari Tua - TKHT). Based on paragraphs 24 and 25 of Statement of Financial Accounting Standards 24 on Employee Benefits (2010 revision), the accounting method used for Pensioner Health Facilities is Fixed benefits.

The amount of contribution and benefit liabilities are calculated periodically by an independent actuary.

The costs and liabilities of employee benefits are determined separately for each plan by using the projected unit credit in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 24 on Employee Benefits (2010 revision).

20. Allowance for Bad Debts

Bank Indonesia provides a combined allowance for bad debts including allowance for claims, placements, and other assets in order to present the assets fairly. The allowance percentage is decided by considering the inherent rate of risk in each particular asset, which are reflected by some factors e.g. investment rating, debtors' financial position, performance of

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam, dan faktor-faktor relevan lainnya.

prior payment, bank's composite grade, relationship and agreement between Bank Indonesia and debtors, and other relevant factors.

21. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

21. Currency in Circulation

Currency in circulation is presented as liabilities at total nominal value of bank notes and coins which has been declared as legal tender by Bank Indonesia and is not in the possession of Bank Indonesia.

22. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia, baik dalam rupiah maupun dalam valas, disajikan sebesar nilai nominal.

22. Demand Deposits

Demand deposits of other parties in Bank Indonesia consist of demand deposits in Rupiah and foreign currencies which are presented at nominal value.

23. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di Neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

23. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia-SBI) are securities in Rupiah and issued by Bank Indonesia to recognized short-term payables. SBIs are presented on the balance sheet at nominal value deducted by a discount paid in advance.

24. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara *cash basis*.

24. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia Syariah - SBIS) are short-term certificates issued by Bank Indonesia based on Sharia principles in Rupiah. SBISs are presented at nominal value. SBISs bonuses are recorded on a cash basis.

25. Penempatan Berjangka (Term Deposit)

Merupakan penempatan dana dalam rupiah dan valas milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. Penempatan Berjangka dalam Rupiah berjangka waktu paling singkat satu hari dan paling lama 12 bulan. Penempatan Berjangka dalam Valas berjangka waktu paling singkat 7 hari dan

25. Term Deposits

A term deposit is one of the Open Market Operations instruments where Monetary Operation participants place their funds in Bank Indonesia for a certain period of time with the minimum period of one day and the maximum of 12 months. A term deposit is presented at nominal value deducted by discount.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

paling lama 30 hari, mulai dilakukan pada tanggal 13 Juni 2012. Penempatan Berjangka dalam Rupiah disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto. Penempatan Berjangka dalam Valas disajikan sebesar nilai nominal ditambah bunga yang masih harus dibayarkan.

26. Penempatan Dana (*Deposit Facility*)

Merupakan penempatan dana rupiah milik bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*), berjangka waktu *overnight* dan disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

27. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facility* syariah. FASBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus FASBIS dicatat secara *cash basis*.

28. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto yang belum diamortisasi.

29. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valas yang disajikan di Neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi diskonto.

26. Deposit Facilities

Deposit facilities are the facilities given to banks to place their funds overnight at Bank Indonesia. Deposit facilities are presented at nominal value deducted by discount.

27. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities

Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) are deposit facilities provided by Bank Indonesia to the banks placing funds in Bank Indonesia in the framework of Sharia Standing facilities. FASBIS are presented at nominal value and the bonuses are recorded on a cash basis.

28. Securities Sold Under Repurchase Agreements

Securities Sold Under Repurchase Agreements are Bank Indonesia securities which are purchased by banks with an agreement to resell under an agreed price and terms. These securities are presented at cost less unamortized discount.

29. Loans from Government

Loans from Government consist of loans as part of Two Step Loan (TSL) program in Rupiah and Government Bonds in foreign currencies which are presented on the balance sheet at the outstanding amount after discount.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

30. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valas, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi dengan memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

31. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas hasil revaluasi surat berharga, selisih hasil penjabaran aktiva dan pasiva valas ke dalam nilai rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

32. Perpajakan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, surplus Bank Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 Tanggal 1 Desember 2006, Bank Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bank Indonesia sejak tahun 2009 telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tanggungan terhadap surplus (defisit) tahun berjalan.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan:

- a. Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut Laporan Keuangan Tahunan (*audited*)

30. Foreign Borrowings

Foreign borrowings or loan facilities received by Bank Indonesia from foreign parties in foreign currencies are presented at the outstanding amount after calculation of accrued interest.

31. Unrealized Gains/Losses

Unrealized Gains/Losses present the recognition of securities revaluation, translation of assets and liabilities in foreign exchange into Rupiah, and is presented in the Equity section.

32. Taxation

In accordance with Republic of Indonesia Act number 36 of 2008, Bank Indonesia is a Tax Subject. Therefore, Bank Indonesia's surplus is an object of Income tax (Pajak Penghasilan – PPh). Based on Letter for Taxable Employers Number PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 dated December 1, 2006 Bank Indonesia has been confirmed as Taxable Employer (Pengusaha Kena Pajak – PKP).

As at 2009 Bank Indonesia has adopted PSAK Number 46 concerning Accounting of Income tax. Based on PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit) for the current year.

Bank Indonesia's income tax liability is further regulated by Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010 on the Calculation and Redemption of Income tax in the Current Year, specifically through article 7:

- a. *Bank Indonesia's surplus object of income tax is a BI's surplus according to audited financial statements after adjustment or fiscal correction*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan UU Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

- b. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia antara lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

33. Aktiva Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

based on the income tax regulations and having regard to BI's characteristics.

- b. Procedures for calculating and paying income tax applied to BI's surplus as stated in article 7 (1) is regulated in Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.03/2011 dated July 11, 2011.*

The elucidation on Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010 concerning the Calculation and Redemption of Income Tax in the Current Year explains that BI's characteristics related to surplus consist of exchange rate differences, allowance for bad debts, and fixed assets depreciation.

Current tax for the operative and previous periods are recognized as the amount of tax payable, calculated using the prevailing tax rate (tax regulation) or that which was substantively applicable on the date of the Balance Sheet.

A correction of tax liabilities is recognized when Tax Imposition Letter is received, or, if Bank Indonesia raises an objection or appeal, at the time a decision is made on the objection or appeal.

33. Deferred Tax Assets

Deferred tax is calculated using the prevailing tax rate at the time when the asset was recovered or the obligation was settled, that is, using the prevailing tax rate (tax regulation) or the tax rate (tax regulation) or the tax rate that was substantively applicable on the date of the Balance Sheet.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset and Liability Method*). Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah surplus fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS (DEFISIT), DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL

1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar TOZ2,377,046.3100 dan TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp38.248.767 juta dan Rp33.510.109 juta. Pada tahun 2012 Bank Indonesia membeli emas (*allocated gold*) sebesar TOZ30,000.0000 sebagai salah satu strategi diversifikasi investasi yang umumnya dilakukan oleh sebagian besar bank sentral dalam upaya menjaga nilai cadangan devisa (*preserve capital*). Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu sebesar USD1,664.00/TOZ.

2. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing setara dengan Rp11.842 juta dan Rp4.010 juta.

All temporary differences between the asset and liabilities amounts recorded for the financial statements on the basis of tax liability shall be recognized as deferred taxes using the Asset and Liability Method. This method also provides for the recognition of deferred tax benefits as compensation for fiscal losses.

Deferred tax assets are recognized if there is a significant possibility that a fiscal surplus during the coming period will be sufficient to compensate for the deferred tax assets which have been recognized.

C. NOTES TO THE BALANCE SHEET, SURPLUS DEFICIT STATEMENT AND STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AND CAPITAL RATIO

1. Gold

The gold balance as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were TOZ2,377,046.3100 and TOZ2,347,046.3100, respectively or the equivalent of IDR38,248,767 million and IDR33,510,109 million. In year 2012 Bank Indonesia has purchased gold (allocated gold) of TOZ30,000.0000 as one of many diversification strategies and generally implemented by most of central banks in order to maintain the value of preserved capital. The value of gold was presented based on the current market price for gold available on the London market as at December 31, 2012 which was USD1,664.00/TOZ.

2. Foreign Currencies

The balances of foreign currencies as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were equal to IDR11,842 million and IDR4,010 million respectively, and with the details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012		31 Desember 2011 December 31, 2011		Description
	Valas Currency	Rp juta IDR Million	Valas Currency	Rp juta IDR Million	
Uang Asing dalam persediaan:					Foreign Currencies in vault:
USD	1,220,568.23	11.803	437,533.00	3.967	USD
JPY	190,510.00	21	236,128.00	28	JPY
GBP	1,137.01	18	1,074.79	15	GBP
SGD	45.76	0	45.76	0	SGD
		11.842		4.010	

3. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota IMF atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota SDR *Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi.

Hak Tarik Khusus diperhitungkan sebagai cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus berasal dari alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta penerimaan dalam SDR seperti *interest on SDR holdings*, *remuneration*, dan *refund of charges*. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti *commitment fee*, *service charges*, *periodic charges*, *charges* alokasi SDR, dan *assessment fee*. Alokasi SDR dijelaskan dalam Catatan C.27.

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2012 sebesar SDR1,761,340,445.00 atau setara dengan Rp26.254.734 juta dan per 31 Desember 2011 sebesar SDR1,761,510,149.00 atau setara dengan Rp24.445.657 juta.

3. Holdings of Special Drawing Rights (SDR)

Special Drawing Rights (SDR) holding represents a potential claim to International Monetary Fund (IMF) countries on freely usable currencies (USD, JPY, GBP, and EUR) owned by other IMF members as SDR *Department* members when those countries agree to do the conversion.

SDR is part of foreign exchange reserves. The SDR balance is derived from the SDR allocations and its increase is due to addition of SDR allocation, SDR purchase and SDR income such as interest on SDR holdings, remuneration, and refund of charges. The balance decreases due to various payments in SDR such as commitment fee, service charges, periodic charges, SDR allocation charges, and assessment fees. SDR allocation is explained in Note C.27.

The balance of SDR as at December 31, 2012 was SDR1,761,340,445.00 or the equivalent of IDR26,254,734 million and as at December 31, 2011 was SDR1,761,510,149.00 or the equivalent of IDR24,445,657 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Hak Tarik Khusus	26.255.207	24.446.489	- Special Drawing Rights
- Penerimaan YMH Diterima	3.153	7.796	- Accrued Income
- Biaya YMH Dibayar	(3.626)	(8.628)	- Payment Due
Saldo Hak Tarik Khusus	26.254.734	24.445.657	Special Drawing Rights Balance

4. Giro

Jumlah giro valas Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank komersial di luar negeri per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing setara dengan Rp55.434.566 juta dan Rp22.514.306 juta dengan rincian sebagai berikut:

4. Demand Deposits

Demand deposits in foreign currencies in central banks and overseas correspondent banks as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR55,434,566 million and IDR22,514,306 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012			Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Description
	Valas Currency					
	Bank Sentral Central Banks	Bank Komersial Commercial Banks	Jumlah Total			
USD	3,571,932,695.96	127,423,174.17	3,699,355,870.13	35.772.771	14.934.645	USD
JPY	40,454,611,263.00	13,521,445,066.00	53,976,056,329.00	6.043.526	3.756.925	JPY
EUR	264,639,270.90	34,334,475.31	298,973,746.21	3.829.812	1.669.962	EUR
GBP	75,084,834.23	18,184,695.30	93,269,529.53	1.453.033	512.509	GBP
AUD	245,873,368.73	129,380,853.22	375,254,221.95	3.762.070	921.108	AUD
CNY	1,816,148,064.79	0.00	1,816,148,064.79	2.792.255	0	CNY
Valas Lainnya				1.781.099	719.157	Other Currencies
				55.434.566	22.514.306	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Di antara saldo giro pada Bank Sentral, terdapat giro yang oleh Federal Reserve Bank, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, ditempatkan pada *reverse repo* dan/atau *overnight* masing-masing sebesar USD3,570,900,000.00 atau setara dengan Rp34.530.603 juta, dan sebesar JPY40,450,520,966.00 atau setara dengan Rp4.529.115 juta. Pendapatan atas *reverse repo* dan/atau *overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

The demand deposits in central banks including placements in Reverse Repo and Overnight, among them in the Federal Reserve Bank, New York and Bank of Japan, Tokyo, amounted to USD3,570,900,000.00 or the equivalent of IDR34,530,603 million and JPY40,450,520,966.00 or the equivalent of IDR4,529,115 million. Income from Reverse Repo and Overnight were recognized on the due date.

5. Deposito

Saldo deposito dalam valas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing setara dengan Rp98.062.115 juta dan Rp76.659.783 juta dengan rincian sebagai berikut:

5. Time Deposits

The balances of time deposits in foreign currencies as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were IDR98,062,115 million and IDR76,659,783 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012		31 Desember 2011 December 31, 2011		Description
	Valas Currency	Rp juta IDR Million	Valas Currency	Rp juta IDR Million	
USD	4,757,000,000.00	46.000.190	4,145,500,000.00	37.591.394	USD
AUD	4,168,300,000.00	41.788.833	2,524,900,000.00	23.235.821	AUD
NZD	938,520,000.00	7.443.271	811,220,000.00	5.683.732	NZD
EUR	0.00	0	792,500,000.00	9.303.150	EUR
Valas lainnya		2.274.513		359.833	Other Currencies
		97.506.807		76.173.930	
Deposito Khusus					Special Time Deposits:
IMF PRGF (SDR)	25,000,000.00	372.653	25,000,000.00	346.942	IMF PRGF (SDR)
IMF Trust for Special PRGF (SDR)	4,850,030.00	72.295	4,850,030.00	67.307	IMF Trust for Special PRGF (SDR)
		444.948		414.249	
Bunga Deposito yang Masih Harus Diterima		110.360		71.604	Accrued Interests
Total Deposito		98.062.115		76.659.783	Total Time Deposits

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Di antara saldo tersebut, terdapat deposito khusus pada IMF yang terdiri dari:

- a. Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) pada IMF sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp372.653 juta per tanggal 31 Desember 2012 dan setara dengan Rp346.942 juta pada tanggal 31 Desember 2011.
- b. Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) and *PRGF Subsidy Operations* ("the Trust") sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp72.295 juta per tanggal 31 Desember 2012 dan setara dengan Rp67.307 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:

Included in Time Deposit were special time deposits with the IMF and consist of:

- a. *Special time deposit with the IMF for Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) amounted to SDR25,000,000.00 or the equivalent of IDR372,653 million as at December 31, 2012 and the equivalent of IDR346,942 million as at December 31, 2011.*
- b. *The other special time deposits with the IMF were Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("the Trust") amounted of SDR4,850,030.00 or the equivalent of IDR72,295 million as at December 31, 2012 and the equivalent of IDR67,307 million as at December 31, 2011.*

The tenors and average interest rate range of the time deposits were as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
a. Deposito pada bank koresponden			a. Time deposits in correspondent banks
- Kurang dari 1 bulan	51.565.400	75.844.629	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	37.054.883	329.301	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	8.886.524	0	- More than 3 months
b. Deposito khusus			b. Special Time Deposits
- Kurang dari 1 bulan	0	0	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	0	0	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	444.948	414.249	- More than 3 months
	97.951.755	76.588.179	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Bunga Setahun Interest p.a	Bunga Setahun Interest p.a	
Kisaran tingkat suku bunga setahun			<i>Interest Rate Range</i>
a. USD			a. USD
- Kurang dari 1 bulan	0,20%	0,12%	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	0,28%	-	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
b. AUD			b. AUD
- Kurang dari 1 bulan	2,90%	4,35%	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	2,95%	-	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	3,06%	-	- More than 3 months
c. NZD			c. NZD
- Kurang dari 1 bulan	2,51%	2,63%	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	2,60%	2,83%	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	2,54%	-	- More than 3 months
d. EUR			d. EUR
- Kurang dari 1 bulan	-	0,30%	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	-	- 1 - 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
e. GBP			e. GBP
- Kurang dari 1 bulan	0,33%	0,51%	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	0,34%	-	- 1 - 3 month
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
f. SDR			f. SDR
- Kurang dari 1 bulan	-	-	- Less than 1 month
- 1 - 3 bulan	-	-	- 1 - 3 month
- Lebih dari 3 bulan	0,10%	0,11%	- More than 3 months

6. Surat Berharga

Saldo Surat-Surat Berharga (SSB) dalam valas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing setara dengan Rp874.344.507 juta dan Rp843.126.744 juta dengan rincian sebagai berikut:

6. Marketable Securities

The balance of marketable securities in foreign currencies as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were the equivalent of IDR874,344,507 million and IDR843,126,744 million respectively, with the details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012			31 Desember 2011 December 31, 2011			Description
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	
	<i>Acquisition cost (after premium/ discount amortization)</i>	<i>Revaluation</i>	<i>Fair value and Accrued Interest</i>	<i>Acquisition cost (after premium/ discount amortization)</i>	<i>Revaluation</i>	<i>Fair value and Accrued Interest</i>	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	101.980.184		101.980.184	68.161.609		68.161.609	<i>Held to Maturity</i>
Tersedia Untuk Dijual:							<i>Available for Sale:</i>
a. Portofolio BI	652.808.394	22.694.911	675.503.305	721.183.814	16.234.551	737.418.365	<i>a. BI Portofolio</i>
b. <i>External Portfolio Manager:</i>							<i>b. External Portfolio Manager:</i>
- <i>Counterparty</i>	75.952.491	2.413.830	78.366.321	26.835.324	176.702	27.012.026	- <i>Counterparty</i>
- <i>Asian Bond Fund</i>	4.351.501	1.107.521	5.459.022	1.360.200	744.630	2.104.830	- <i>Asian Bond Fund</i>
c. <i>Automatic Investment Trading</i>	8.219.052	(44)	8.219.008	2.092.777	1.360.136	3.452.913	<i>c. Automatic Investment Trading</i>
Bunga yang Masih Harus Diterima	0		0	0		0	<i>Accrued Interest</i>
			4.816.667			4.977.001	
	843.311.622		874.344.507	819.633.724		843.126.744	

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valas antara lain USD, GBP, CAD, EUR, AUD, NZD, dan JPY.

SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2012 sebesar Rp101.980.184 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp41.780.328 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp55.238.697 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp4.961.159 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Dalam SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan Tersedia Untuk Dijual tersebut termasuk alokasi penempatan

Marketable securities are placements denominated in foreign currencies, predominantly in USD, GBP, CAD, EUR, AUD, NZD, and JPY.

Hold-to-Maturity Securities' outstanding as at December 31, 2012 of IDR101,980,184 million, consist of: 1) IDR41,780,328 million due within less than a year; 2) IDR55,238,697 million due within 1 to 5 years; and 3) IDR4,961,159 due within 5 to 10 years. Included in Held-to-Maturity and Available for Sale securities there was Third Party Securities Lending (TPSL) allocation amounted to IDR92,270,673 million. From the portion

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp92.270.673 juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp72.464.315 juta dan Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* sebesar Rp55.094.624 juta sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.13 dan Catatan C.28, serta dalam bentuk SSB (*non cash*) sebesar Rp18.033.359 juta yang ditatausahakan secara *extra comtable*.

TPSL dilakukan dengan cara meminjamkan sementara SSB milik Bank Indonesia kepada peminjam (*borrower*) melalui lembaga perantara (*securities lending agent*). TPSL dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan peluang pasar dalam rangka optimalisasi pengelolaan cadangan devisa. Atas transaksi TPSL, Bank Indonesia menerima jaminan (*collateral*) dalam bentuk *cash collateral* dan *non cash collateral*.

Cash collateral yang diterima melalui *securities lending agent* direinvestasikan, sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan. Untuk transaksi TPSL tersebut, Bank Indonesia mendapatkan penjaminan ganda (*double indemnification*) dari *securities lending agent* baik dari sisi peminjaman SSB (*lending side*) maupun dari sisi reinvestasi. Dalam hal ini, apabila *borrower* mengalami *default*, maka kerugian akan ditanggung oleh *securities lending agent*.

SSB Tersedia untuk Dijual (Portofolio Bank Indonesia dan *Automatic Investment*) per 31 Desember 2012 sebesar Rp683.722.313 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp173.421.318 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp340.054.358 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp170.246.637 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

IDR72,464,315 million of the TPSL deals, Bank Indonesia received cash collateral of cash amounted to IDR55,094,624 million as explained in Notes C.13 and C.28, while non-cash securities collateral amounted to IDR18,033,359 million was administered on an extra comtable basis.

TPSL deals were carried by lending on a temporary basis securities held by Bank Indonesia to borrowers through securities lending agents. These deals were conducted so as to expand market opportunities in the context of optimizing foreign exchange reserves management. In respect of TPSL transactions, Bank Indonesia received cash collateral and non-cash collateral.

The cash collateral received through securities lending agent was reinvested so that Bank Indonesia gained additional revenues. In respect to such TPSL transactions, Bank Indonesia received double indemnification from securities lending agents both from lending side and reinvestment. In this respect, should a borrower default, the loss resulted would be borne by the securities lending agent.

The balances for Available for Sale securities in Bank Indonesia's portfolio and Automatic Investment as at December 31, 2012 amounted to IDR683,722,313 million, consisting of: 1) IDR173,421,318 million due within less than a year; 2) IDR340,054,358 million due within 1 to 5 years; and 3) IDR170,246,637 million due within 5 to 10 years.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

7. Surat Berharga Negara Republik Indonesia

Bank Indonesia memiliki SBN Republik Indonesia yang terdiri dari SUN dan SBSN. SUN terdiri dari SPN dan ON. SUN dan SBSN dapat diperjualbelikan dan dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual.

Saldo SBN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp108.430.258 juta dan Rp82.402.779 juta dengan rincian sebagai berikut:

7. Government Bonds

Bank Indonesia holds Government Securities (SUN) and Government Sharia Securities (SBSN). SUN consists of Treasury Notes (SPN) and Bonds (ON). SUN and SBSN can be traded and classified as Available for Sale Securities.

The balances for Government Bonds as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were IDR108,430,258 million and IDR82,402,779 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012			31 Desember 2011 December 31, 2011			Description
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	
	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
a. Surat Utang Negara							a. Government Securities:
1) Obligasi Negara							1) Government Bonds
- Tersedia untuk dijual	86.881.335	13.900.785	100.782.120	69.712.469	8.693.178	78.405.647	- Available for sale
- Bunga yang Masih Harus Diterima			2.135.399			1.995.874	- Accrued Interest
	86.881.335		102.917.519	69.712.469		80.401.521	
2) Surat Perbendaharaan Negara							2) Treasury Bills
- Tersedia untuk dijual	5.319.244	135.561	5.454.805	1.710.923	30.271	1.741.194	- Available for Sale
- Bunga yang Masih Harus Diterima			0			0	- Accrued Interest
	5.319.244		5.454.805	1.710.923		1.741.194	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012			31 Desember 2011 December 31, 2011			Description
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	
	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	Acquisition cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
b. Surat Berharga Syariah Negara							b. Government Sharia Securities
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)							Sharia Treasury Bills (SPNS)
- Tersedia untuk dijual	57.161	773	57.934	256.483	3.581	260.064	- Available for Sale
- Bunga yang Masih Harus Diterima			0			0	- Accrued Interest
	57.161		57.934	256.483		260.064	
	92.257.740		108.430.258	71.679.875		82.402.779	

SUN dan SBSN diperoleh Bank Indonesia dalam rangka *building stock*, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SUN jenis ON diperoleh melalui pembelian di pasar sekunder sejak bulan April 2005, SUN jenis SPN diperoleh Bank Indonesia di pasar perdana sejak bulan Mei 2008, dan SBSN jangka pendek atau SPNS diperoleh di pasar perdana sejak bulan Agustus 2011.

Surat berharga jenis ON sebesar Rp100.782.120 juta terdiri dari: (1) sebesar Rp1.857.976 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; (2) sebesar Rp7.449.432 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; (3) sebesar

SUN and SBSN were acquired by Bank Indonesia for building stock purpose and was intended to substitute Bank Indonesia Certificates (SBI) as monetary instruments and as required by State Treasury Act Number 1 of 2004. ON were acquired from the secondary market since April 2005 while SPN were acquired from primary market since May 2008. Short-term SBSN or SPNS were from primary market since August 2011.

Marketable Securities of ON amounted to IDR100,782,120 million consist of: (1) IDR1,857,976 million due within less than a year; (2) IDR7,449,432 million due within 1 to 5 years; (3) IDR14,835,057 million due within 5 to 10 years; and (4)

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Rp14.835.057 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun; dan (4) sebesar Rp76.639.655 juta akan jatuh tempo di atas 10 tahun. SUN Tersedia untuk Dijual jenis SPN sebesar Rp5.454.805 akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun. Sedangkan SBSN jangka pendek atau SPN Syariah per 31 Desember 2012 sebesar Rp57.934 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun.

IDR76,639,655 million due within more than 10 years. Available for Sale Securities classified as SPN amounted to IDR5,454,805 due within less than a year while short-term SBSN or Sharia SPN as at December 31, 2012 amounted to IDR57,934 million due within less than a year.

8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah nihil.

8. Securities Purchased under Resale Agreements

The balances of Securities Purchased under Resale Agreements as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were zero.

9. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp243.056.782 juta dan Rp247.552.945 juta, terdiri dari:

9. Claims on Government

Claims on Government as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR243,056,782 million and IDR247,552,945 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Surat Utang Pemerintah	113.753.686	117.938.490	- Government Bonds
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	126.390.779	126.697.948	- Treasury Bonds (ON) SRBI-01/MK/2003
- Tagihan Lainnya Kepada Pemerintah dalam Rupiah	2.912.317	2.916.507	- Other Claims on Government in Rupiah
	243.056.782	247.552.945	

a. Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

a. Government Bonds (SUP)

The values of SUP as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Nilai nominal:			Nominal value:
- SUP Nomor: SU-002/MK/1998	18.077.491	18.781.776	- SUP Number: SU-002/MK/1998
- SUP Nomor: SU-004/MK/1999	48.921.477	50.701.147	- SUP Number: SU-004/MK/1999
- SUP Nomor: SU-007/MK/2006	46.754.718	48.455.567	- SUP Number: SU-007/MK/2006
Jumlah	113.753.686	117.938.490	Total

1) SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia.

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-002 dengan total sebesar Rp1.922.509 juta sejak tanggal 1 April 2010 s.d. 1 Oktober 2012, yang di

1) SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in terms of Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 concerning Addition of the Republic of Indonesia's equity Participation in PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT. BEI).

The nominal value of SU-002 is IDR20,000,000 million, non-tradable and non-transferable.

Based on Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 concerning Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance has issued the 5th *addendum* of SU-002 which amends the annual interest rate from 1% to 0.1% and effective as at January 1, 2009.

The Government has paid the installment of SU-002 with the total amount of IDR1,922,509 million from April 1, 2010 to October 1, 2012, which was the

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

antaranya merupakan pembayaran angsuran SU-002 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp704.285 juta. Baki debit SU-002 per 31 Desember 2012 sebesar Rp18.077.491 juta.

payment of installment in 2012 amounted to IDR704,285 million. The outstanding balance of SU-002 as at December 31, 2012 was IDR18,077,491 million.

2) SUP Nomor SU-004/MK/1998 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

2) SUP Number SU-004/MK/1998 (SU-004)

SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the Form of Debt Securities in conjunction with the Agreement between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

The nominal value of SU-004 was IDR53,779,500 million, non-transferable and non-tradable.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Based on Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 concerning the Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-004 which amends the annual interest rate from 3% to 0.1% and has been effective as per January 1, 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-004 dengan total sebesar Rp4.858.023 juta sejak tanggal 1 Juni 2010 s.d. 1 Desember 2012, yang di antaranya merupakan pembayaran angsuran SU-004 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.779.670 juta. Baki debit SU-004 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp48.921.477 juta.

The Government has paid the installment of SU-004 with the total amount of IDR4,858,023 million from June 1, 2010 to December 1, 2012 with was the payment of installment in 2012 amounted to IDR1,779,670 million. The outstanding balance of SU-004 as at December 31, 2012 was IDR48,921,477 million.

3) SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998

3) SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 was issued on November 24, 2006 based on The Government of Republic of Indonesia Act Number 24 of 2002 concerning Government Bonds and Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia concerning the

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- (2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- (3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
- (4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- (2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- (3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. The nominal value of SU-007 is IDR54,862,150 million and it is non-tradable.

SU-007 was issued to substitute interest and indexation arrears on SU-002 and SU-004 up to December 31, 2005 with the details as follows:

- (1) SU-002 interest arrears amounted to IDR4,637,583 million.*
- (2) SU-004 interest arrears amounted to IDR12,291,887 million.*
- (3) SU-002 indexation arrears amounted to IDR11,231,072 million.*
- (4) SU-004 indexation arrears amounted to IDR26,701,608 million.*

Terms and conditions of SU-007 were as follows:

- (1) SU-007 became effective on January 1, 2006 and due on August 1, 2025.*
- (2) The SU-007 interest rate is 0.1% per annum, based on the remaining principal balances and paid in cash by the Government to Bank Indonesia in every 6 months (February 1 and August 1). The first interest payments was in December 1, 2006 for due dates of February 1, 2006 and August 1, 2006.*
- (3) Principal repayment of SU-007 is divided into 38 installments. The first installment was due and paid on February 1, 2007 and the next installments will due and get paid on every August 1 and February 1 each year until the final installment of August 1, 2025. Principal repayment may be settled in form of cash or in Marketable Treasury Bonds.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-007 dengan total sebesar Rp8.107.432 juta sejak 1 Februari 2007 s.d. 1 Agustus 2012, yang di antaranya merupakan pembayaran angsuran SU-007 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.700.848 juta. Baki debit SU-007 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp46.754.718 juta.

The Government has paid the installment of SU-007 with the total amount of IDR8,107,432 million from February 1, 2007 to August 1, 2012 and some of them were the installment of SU-007 for the year 2012 amounted to IDR1,700,848 million. The outstanding balance on SU-007 as at December 31, 2012 was IDR46,754,718 million.

b. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

b. Treasury Bond (ON) Number SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 was issued to substitute SUP Number SU-001/MK/1998 and Number SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of the Agreement between the Government and Bank Indonesia concerning the Settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003. The nominal value of SRBI-01 was IDR144,536,094 million.

Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut:

- 1) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- 3) Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah

Terms and conditions of SRBI-01 were as follows:

- 1) *SRBI-01 became effective on August 1, 2003 without indexation, has a 30 year maturity period and is extendable.*
- 2) *Interest rate on SRBI-01 was 0.1% per annum of the remaining principle balance and will be paid by the Government every 6 months in February and August.*
- 3) *SRBI-01 redemption is funded from the surplus of Bank Indonesia which is accruing from the Government and shall be performed in the event that the capital to monetary liabilities ratio of Bank Indonesia has exceeded 10%. If the capital to monetary liabilities ratio is less than 3%, the Government is obliged to pay a charge in order to maintain the 3% level. If the SRBI-01 redemption is accomplished before 30 years from the surplus of Bank Indonesia that is accruing to the Government, then SRBI-01*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

will be declared as settled and no longer effective.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat:

In July 31, 2012 an Agreement on the revision of 2003 Joint Agreement has been signed between the Governor of Bank Indonesia, the Minister of Finance and the Coordinating Minister for Economy, and covered the followings:

- 1) Penghapusan kewajiban Pemerintah untuk membayar *charge* kepada Bank Indonesia dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3% serta ketentuan lain dalam SKB tahun 2003 yang terkait dengan penenaan *charge* dimaksud.
- 2) Prosedur penambahan modal Bank Indonesia, dalam hal modal Bank Indonesia kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- 3) Merestrukturisasi Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem *self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) s.d. jatuh tempo tahun 2043.

- 1) *Writing off the Government obligation to pay charge to Bank Indonesia when the monetary liabilities ratio is less than 3% and other items in the 2003 Agreement related to the said charge;*
- 2) *Procedure on Capital Participation of Bank Indonesia, in the event of Bank Indonesia's capital is less than IDR2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah).*
- 3) *Restructuring ON Number SRBI-01/MK/2003 payment method formerly bullet payment with self-liquidity system at due date on the year 2033, becoming amortized method with due date on the year 2043.*

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SRBI-01 dengan total sebesar Rp18.145.315 juta. Pembayaran angsuran SRBI-01/MK/2003 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp307.169 juta. Baki debit SRBI-01 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp126.390.779 juta.

The Government has paid the installment of SRBI-01 with the total amount of IDR18,145,315 million. Installment of SRBI-01/MK/2003 on 2012 amounted to IDR307,169 million. The outstanding balance of SRBI-01 as at December 31, 2012 was IDR126,390,779 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah dalam Rupiah

c. Other Claims on Government in Rupiah

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
1) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956	1) Claims due to Government membership of international institutions
2) Tagihan bunga kepada Pemerintah	85.170	89.360	2) Claims due to loan interest
3) Tagihan lainnya	191	191	3) Other claims in Rupiah
Jumlah	2.912.317	2.916.507	Total

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan Lainnya kepada Pemerintah dalam Rupiah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UU Bank Indonesia. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah dalam Rupiah terdiri dari:

- a) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.862 juta, keanggotaan pada *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.660 juta. Tagihan tersebut berasal dari pembayaran secara tunai yang dilakukan Bank Indonesia atas nama Pemerintah atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional sejak tahun 1972 s.d 1999. Dalam rangka penyelesaian tagihan tersebut, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah melakukan verifikasi atas tagihan dana talangan tersebut. Dari nilai tagihan sebesar Rp2.826.956 juta, masih terdapat nilai yang belum disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp46.357 juta.

Other than claims due to loan interest, other claims on Government in Rupiah were claims effective before the enactment of the Bank Indonesia Act, with the details as follows:

- a) *Claims due to Government membership in International Institutions amounted to IDR2,826,956 million, consisting of IMF membership fee of IDR2,764,862 million, membership in the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) of IDR57,434 million and other memberships of IDR4,660 million. The claims originated from cash payment by Bank Indonesia on behalf of the Government as the Government Participation in an international financial institution from 1972 to 1999. In the frame of claim settlements, the Ministry of Finance and Bank Indonesia have implemented some verification upon the claims. From the outstanding claims amounted to IDR2,826,956 million, the IDR46,357 million of it not yet agreed by the Government and Bank Indonesia.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), mulai Laporan tahun 2009, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan telah mencatat Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/pasiva dalam pos “Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya”. Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini masih melakukan pembahasan terkait penyelesaian atas tagihan tersebut.

- b) Tagihan bunga kepada Pemerintah per 31 Desember 2012 sebesar Rp85.170 juta terdiri dari:
 - (1) Tagihan bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 sebesar Rp28.444 juta dan tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp52.548 juta
 - (2) Tagihan dalam rangka Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp4.178 juta.

In the Central Government’s Financial Statements since 2009, the Government through the Ministry of Finance recognized these claims as liabilities under “Other Domestic Long-Term Liabilities” item. Resolution of the claims is in under discussion between the Government and Bank Indonesia.

- b) *Claims due to loan interest as at December 31, 2012 amounted to IDR85,170 million consisting of:*
 - (1) Interest claims on SU-002, SU-004, and SU-007 amounted to IDR28,444 million and interest claim on SRBI-01 amounted to IDR52,548 million*
 - (2) Claims arising from Loan Subsidiary Program amounted to IDR4,178 million.*

10. Tagihan kepada Bank

Saldo Tagihan Kepada Bank per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp3.225.921 juta dan Rp4.398.970 juta dengan rincian sebagai berikut:

10. Claims on Banks

Claims on banks as at December 31, 2012 and December 31, 2011 in Rupiah were IDR3,225,921 million and IDR4,398,970 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Pinjaman Subordinasi (SOL)	2.137.993	2.927.101	- Subordinated loans (SOL)
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) <i>executing</i>	1.036.615	1.365.149	- Executing Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI)
- Pinjaman Dua Tahap (TSL)	0	10.142	- Two Step Loans (TSL)
- Tagihan Bunga SOL, KLBI, dan TSL	51.313	96.578	- Interest claims on SOL, KLBI, and TSL
	3.225.921	4.398.970	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Tagihan kepada Bank berupa SOL, KLBI dan TSL diberikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. KLBI adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah. TSL adalah pinjaman luar negeri dari *International Cooperation and Development Fund* (ICDF) yang diterima Bank Indonesia atas nama Pemerintah (lihat Catatan C.26) yang diteruskan kepada bank pelaksana atau proyek melalui Bank Indonesia, tagihan dimaksud telah dilunasi pada tanggal 27 April 2012. Pinjaman Subordinasi atau *Subordinated Loan* selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank. Sejak diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL, KLBI dan TSL. Per 31 Desember 2012, Bank Indonesia masih mengelola SOL dan KLBI tersebut sampai dengan jatuh tempo.

Claims on banks in the form of SOL, KLBI and TSL were extended based on Act Number 13 of 1968 concerning Central Bank. KLBI is credit or financing provided to banks from Bank Indonesia's own funds to support the implementation of Government programs. TSL is foreign loan from International Cooperation and Development Fund (ICDF) which has been received by Bank Indonesia on behalf of the Government (see Note C.26) which then has been channelled to the implementing banks or projects through Bank Indonesia. The said claims have been settled on April 27, 2012. Subordinated Loan (SOL) is credits provided to banks in the context of banks recovery. Since the enactment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Bank has not been allowed from providing SOL, KLBI and TSL credits. As at December 31, 2012, Bank Indonesia is currently managing the SOL and KLBI up to their maturity dates.

11. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp6.477.604 juta dan Rp6.838.078 juta, terdiri dari:

11. Claims on Others

Claims on others as at December 31, 2012 and December 31, 2011 are IDR6,477,604 million and IDR6,838,078 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 <i>December 31, 2012</i>	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>	Description
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
- Dalam Rupiah	6.470.002	6.816.630	- <i>In Rupiah</i>
- Dalam Valas	7.602	21.448	- <i>In Foreign Currency</i>
	6.477.604	6.838.078	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Tagihan kepada Lainnya dalam rupiah terdiri dari:

Claims on others in Rupiah consist of:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	201.952	420.990	- Claims on appointed State-Owned Enterprises due to credit program hand-over
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.838.267	5.842.935	- Claims on channeling loans
- Tagihan Lainnya	429.783	552.705	- Other claims
	6.470.002	6.816.630	

Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program adalah tagihan atas KLBI yang diberikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang selanjutnya sejak diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tagihan tersebut dialihkan pengelolaannya kepada PT Permodalan Nasional Madani sebagai BUMN Koordinator.

Claims on appointed state-owned enterprises due to credit program handover consisted of claims in respect with KLBI which had been extended based on Act Number 13 of 1968 concerning Central Bank. Since the enactment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, these claims have been transferred to PT Permodalan Nasional Madani as coordinator.

Tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.701.641 juta.

Claims on channeling loans are claims in respect of KLBI which was channeled through banks as channeling agents but which had not be settled as per due dates. Included in claims on channeling loans are areas from the Agriculture Enterprise Credit (KUT) scheme amounted to IDR5,701,641 million.

BPK telah melakukan penelitian atas tunggakan KUT untuk memenuhi permintaan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008. Tujuan penelitian tersebut adalah menilai tunggakan KUT tahun penyediaan 1998/1999 pola

The BPK RI has conducted an audit on the KUT arrears in accordance with the request from the Minister of Finance as set out in Letter Number S-152/MK.05/2008 dated April 3, 2008. The purpose of the audit was to assess the arrears from KUT

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

channeling per 31 Desember 2009 sesuai prosedur yang disepakati bersama (*agreed upon procedure*) dalam rangka *risk sharing* antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo.

BPK dengan surat Nomor 06/S/IV/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Utama Jamkrindo. Dalam LHP dimaksud, BPK menyimpulkan bahwa Program KUT tahun penyediaan (TP) 1998/1999 pola *channeling* mengandung beberapa kelemahan sistem pengendalian manajemen baik dari segi desain dan implementasinya yang meliputi kebijakan, organisasi, mekanisme penyaluran dan pelunasan KUT, pelaporan, pendokumentasian dan pengawasan. Kelemahan tersebut cenderung menjadi penyebab tingginya tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.

Sesuai LHP BPK Nomor 091/LHP/XV/12/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, nilai tunggakan KUT sebesar Rp5.708.469 juta. Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.701.641 juta diketahui antara lain:

- a. Sebesar Rp1.539.052 juta tidak didukung dengan dokumen penyaluran KUT yang lengkap di bank pelaksana, seperti surat perjanjian kredit, bukti transfer, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) atau rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi (Kakandepkop).
- b. Sebesar Rp266.869 juta merupakan tabungan beku di bank pelaksana.

Selanjutnya dalam rangka *risk sharing* BPK menyarankan agar Bank Indonesia, Pemerintah, dan Perum Jamkrindo untuk melakukan hal-hal antara lain:

channeling credits provided in 1998/1999 as at December 31, 2009 in accordance with the procedures agreed in the context of risk sharing between the Government, Bank Indonesia and Perum Jamkrindo.

The BPK RI with its Letter Number 06/S/IV/01/2011 dated January 14, 2011 submitted its audit report to the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia and the President Director of Jamkrindo. According to the report, BPK has concluded that the KUT arrears channeling credits program in 1998/1999 had some weaknesses in management control, design and implementation. Included in the implementation are policies, organization, channeling mechanism and KUT settlements, reporting, documentation and supervisory. The weaknesses assumed to be the cause of high outstanding of KUT channeling program in 1998/1999.

According to the BPK RI report Number 091/LHP/XV/12/12/2010 dated December 31, 2010, the KUT arrears of IDR5,708,469 million. The balance as at December 31, 2012 amounted to IDR5,701,641 million and the followings had been identified:

- a. *IDR1,539,052 million was not supported by full KUT documentation in the implementing banks, i.e. loan agreements, transfer slips, Farmers' Group Needs Definitive Plans (RDKK) or recommendations from the head of Ministry of Cooperative Office.*
- b. *IDR266,869 million was parked in frozen accounts in the implementing banks.*

As part of the risk sharing efforts, the BPK RI subsequently recommended that Bank Indonesia, the Government and Perum Jamkrindo to take the following actions, among others:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

- a. Menyetujui status tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling* yang tidak didukung dokumen penyaluran yang lengkap.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian saldo rekening milik Pemda pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pelunasan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.

Bank Indonesia telah meminta tanggapan kepada Kementerian Keuangan dan penegasan mengenai penyelesaian *risk sharing* tunggakan KUT 1998/1999 pola *channeling* melalui surat Nomor 13/3/GBI/DKBU tanggal 22 Juni 2011.

Pada tanggal 15 Agustus 2012 telah dilaksanakan rapat koordinasi Bidang Perekonomian yang membahas penyelesaian tunggakan KUT. Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Direktur Utama Jamkrindo, dan Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012 dilaksanakan pertemuan lanjutan membahas teknis penyelesaian tunggakan KUT dan penyusunan laporan sebagai bahan rapat dengar pendapat gabungan Komisi DPR-RI.

12. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- a. Agree on the status of KUT channeling arrears for 1998/1999 which are not supported by full documentation.
- b. Coordinate with the relevant local Governments and implementing banks for the purpose of settling the account balances of the local Governments in the implementing banks used to accommodate the payment of channeling KUT loans in 1998/1999.

Bank Indonesia has sought the response of the Ministry of Finance and stressed the need for risk sharing in respect of the 1998/1999 channeling KUT arrears through Letter Number 13/3/GBI/DKBU dated June 22, 2011.

On August 15, 2012 a coordinating meeting on economy sector was held to address the settlement of KUT outstanding claims. The meeting was attended by the Coordinating Minister for Economy, the Minister of Finance, the State Minister for Cooperative and SME, president director of Jamkrindo, and the Governor of Bank Indonesia. Also, a further meeting also held in August 30, 2012 to discuss the settlement techniques on the KUT outstanding claims and report preparation for the hearing with all Commissions of House of Representatives (DPR-RI).

12. Equity Participation

Bank Indonesia holds equity stakes in a number of banks and other financial institutions with the details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	31 Desember 2012 December 31, 2012	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	%	Rp juta IDR Million	%	Rp juta IDR Million	
Penyertaan pada:					Equity participation in:
- Bank for International Settlements	0,55	626.862	0,55	583.612	- Bank for International Settlements
- International Islamic Liquidity Management	6,67	48.350	6,67	45.340	- International Islamic Liquidity Management
		675.212		628.952	

a. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 setara dengan Rp626.862 juta.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM merupakan lembaga yang didirikan untuk mendorong perkembangan perbankan syariah khususnya dan industri keuangan syariah secara

a. Participation in Bank for International Settlements (BIS)

The purpose of the equity participation is to gain more access in BIS decision-making activities, to utilize provided the facilities, to increase international investors' confidence towards Indonesia and cooperation with other central banks concerning monetary policy, financial system stability, payment system and banking regulation. Bank Indonesia purchased 3,000 shares (0.55% of the total issued shares) on September 29, 2003 with a nominal value of SDR5,000.00/share and total acquisition cost of SDR42,054,000.00. The balance of the equity participation as at December 31, 2012 was equivalent to IDR626,862 million.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM is an institution which was established to encourage the development of Sharia banking in particular and the Sharia financial services

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

umum melalui peningkatan efisiensi pengelolaan likuiditas secara *cross-border*. Bank Indonesia dapat berinvestasi pada sukuk atau instrumen keuangan syariah lainnya yang diterbitkan oleh IILM.

industry in general through increased efficiency in the cross-border management of liquidity. Bank Indonesia may invest in sukuk or other sharia financial instruments provided by IILM.

Pada tahun 2011 Bank Indonesia melakukan penyertaan sebesar USD5,000,000.00. Posisi penyertaan tersebut per 31 Desember 2012 setara dengan Rp48.350 juta.

In 2011 Bank Indonesia made an investment in the amount of USD5,000,000.00. As at December 31, 2012, the value of this investment amounted to the equivalent of IDR48,350 million.

13. Aktiva Lain-lain

Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp77.595.949 juta dan Rp41.022.806 juta, dengan rincian sebagai berikut:

13. Other Assets

The balances of other assets as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were IDR77,595,949 million and IDR41,022,806, respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	55.094.624	16.841.761	- <i>Reinvestment of Cash Collateral</i>
- Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai Buku)	16.391.646	15.953.662	- <i>Fixed assets and intangible assets (book value)</i>
- Aktiva Lain-lain pada IPBV	384.907	362.039	- <i>Other assets in IPBV</i>
- Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang	392.495	289.367	- <i>Currency Inventory and Currency Procurement Advances</i>
- Aktiva Pajak Tangguhan	4.738.152	7.014.689	- <i>Deferred Tax Assets</i>
- Lainnya	594.125	561.288	- <i>Other assets</i>
	77.595.949	41.022.806	

a. Reinvestasi *Cash Collateral*

Saldo reinvestasi *cash collateral* yang berasal dari *cash collateral* program TPSL per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp55.094.624 juta dan Rp16.841.761 juta - lihat Catatan C.6 dan Catatan C.28.

a. *Reinvestment of Cash Collateral*

The balances for reinvestment of cash collateral originating from cash collateral of TPSL program as at December 31, 2012 and December 31, 2011 were IDR55,094,624 million and IDR16,841,761 million respectively, – see Notes C.6 and C.28.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

b. Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud

Nilai buku Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp16.391.646 juta dan Rp15.953.662 juta, dengan rincian sebagai berikut:

b. Fixed Assets and Intangible Assets

The book value of Fixed Assets and Intangible Assets as at December 31, 2012 and December 31, 2011 are IDR16,391,646 million and IDR15,953,662 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Harga Perolehan/Revaluasi Aktiva Tetap:			Cost of Fixed Assets/Revaluation of Fixed Assets Fixed Assets:
- Tanah dan Bangunan	15.635.793	14.888.080	- Land and Buildings
- Selain Tanah dan Bangunan	1.926.841	1.581.177	- Non-Land and Buildings
Aktiva Tidak Berwujud	266.938	215.176	Intangible Assets
Aktiva dalam Penyelesaian	296.446	498.284	Assets in Process
	18.126.018	17.182.717	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Tetap:			Accumulated Depreciation/Amortization Fixed Assets :
- Bangunan	364.228	34.082	- Buildings
- Selain Bangunan	1.213.327	1.060.517	- Non-Buildings
Aktiva Tidak Berwujud	156.817	134.456	Intangible Assets
	1.734.372	1.229.055	
Nilai Buku	16.391.646	15.953.662	Book Value

Pada tahun 2011 Bank Indonesia telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas nilai persil (tanah) dan bangunan untuk Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN), sedangkan revaluasi untuk Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) dilaksanakan pada tahun 2012. Tujuan dilakukannya revaluasi tersebut adalah agar nilai persil (tanah) dan bangunan lebih wajar (sesuai harga pasar), mengingat

In 2011 Bank Indonesia revaluated its land parcels and buildings for Headquarter and Domestic Representative Offices, while the revaluation for Overseas Representative Offices has been done in 2012. The objective was to ensure that the value of the said parcels and buildings are more reasonable (as at market prices), bearing in mind that the last revaluation was conducted in 2000. The revaluation was carried out based on Article

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

revaluasi persil (tanah) dan bangunan oleh Bank Indonesia terakhir dilaksanakan tahun 2000. Revaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut sejalan dengan Pasal 6 UU Bank Indonesia. Pelaksana pekerjaan revaluasi (*appraisal*) aktiva tetap Bank Indonesia adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.

c. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva Lain-lain pada IPBV merupakan tagihan kepada IPBV, suatu perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover Bank, yang terdiri dari tagihan *Floating Principal Note* (FPN) dan tagihan lainnya yang digunakan sebagai cadangan untuk biaya operasional IPBV.

Tagihan FPN merupakan tagihan yang berasal dari NPL eks Indover Bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV. Secara periodik (triwulanan), IPBV mengkinikan nilai FPN tersebut untuk menggambarkan nilai NPL terkini yang dikelola. Untuk pertama kali nilai FPN yang dikeluarkan IPBV pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar USD294,232,949.00 atau setara dengan Rp2.845.233 juta.

Berdasarkan laporan triwulanan IPBV tanggal 31 Desember 2012, IPBV masih mengelola NPL dari sebelas debitur senilai USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp373.244 juta dengan nilai FPN sebesar nilai NPL tersebut.

Sementara itu, nilai tagihan lainnya kepada IPBV adalah sebesar USD3,251.23 atau setara dengan Rp31 juta dan EUR908,026,36 atau setara dengan Rp11.632 juta. Dari jumlah tagihan lainnya tersebut oleh IPBV disimpan di Indover

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

6 of Bank Indonesia Act. The appraisal of Bank Indonesia's fixed assets was conducted by the Independent Public Appraisers.

c. Other Assets in IPBV

Other assets in IPBV are claims against IPBV, a company appointed to manage non-performing loan ex Indover Bank, consisting of Floating Principal Note (FPN) claim and other claims used as a reserve for IPBV's operational expenditures.

FPN claims are claims from Non-Performing Loans (NPL) of ex Indover Bank which have been transferred to IPBV. In quarterly basis IPBV updates the FPN values to represent the current NPL which IPBV manages. The first FPN issued on January 26, 2004 in the amount USD294,232,949.00 or the equivalent of IDR2,845,233 million.

Based on IPBV's latest quarterly report dated December 31, 2012, IPBV continues to manage NPL from 11 debtors in the amount of USD38,598,104.78 or the equivalent of IDR373,244 million with the FPN value being the same as NPL value.

Meanwhile, the balance of other claims to IPBV was USD3,251.23 or the equivalent to IDR31 million and EUR908,026.36 or the equivalent of IDR11,632 million. Of the said, those kept by IPBV in Indover Bank Amsterdam amount to

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Bank Amsterdam sebesar EUR273,643.47 atau setara dengan Rp3.505 juta serta di ING Bank Amsterdam sebesar USD3,251.23 atau setara dengan Rp31 juta dan EUR634,382.89 atau setara dengan Rp8.127 juta.

EUR273,643.47 or the equivalent of IDR3,505 million and in ING Bank Amsterdam amount to USD3,251.23 or the equivalent of IDR31 million and EUR634,382.89 or the equivalent of IDR8,127 million.

d. Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang

Nilai Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp392.495 juta dan Rp289.367 juta, dengan rincian sebagai berikut:

d. Supplies of Printed Money and Advance for Printed Money

The values of supplies of Printed Money and for Printed Money as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR392,495 million and IDR289,367 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Persediaan Bahan Uang	357.039	287.659	- Currency Inventory
- Uang Muka Pengadaan Uang	35.456	1.708	- Currency Procurement Advances
	392.495	289.367	

Nilai persediaan bahan uang per 31 Desember 2012 merupakan akumulasi jumlah persediaan bahan uang yang terdiri dari bahan kertas uang senilai Rp278.714 juta dan bahan logam uang sebesar Rp78.325 juta.

The values of supplies of printed money at December 31, 2012 was an accumulated amount of printed money reserves consisting of banknotes amounted to IDR278,714 million and coins amounted to IDR78,325 million.

Nilai uang muka pengadaan uang per 31 Desember 2012 merupakan nilai Letter of Credit (L/C) impor kepada pemasok bahan uang untuk pecahan Rp50.000 Tahun Emisi 2005 sebesar Rp22.630 juta dan untuk pecahan Rp5.000 Tahun Emisi 2001 sebesar Rp12.826 juta.

The value of advance for printed money as at December 31, 2012 was the value of import Letter of Credit (L/C) to the banknotes suppliers for IDR50,000 denomination year 2005 emission amounted to IDR22,630 million and for IDR5,000 year 2001 emission amounted to IDR12,826 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

e. Aktiva Pajak Tangguhan

Posisi Aktiva Pajak Tangguhan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp4.738.152 juta dan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp7.014.689 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai Aktiva Pajak Tangguhan dijelaskan dalam Catatan C.29.

f. Lainnya

Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam (IBA) yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp471.870 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp63.891 juta per 31 Desember 2012 serta Aktiva Lainnya sebesar Rp58.364 juta.

Pada tanggal 5 November 2009, dalam *Creditors Meeting* di Pengadilan Amsterdam, Belanda, tagihan Bank Indonesia di IBA ditetapkan sebagai *disputed claim also provisionally acknowledged*. Selanjutnya pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia telah mengajukan *Statement of Claim* ke Pengadilan Amsterdam untuk meminta agar *claim* Bank Indonesia di IBA tersebut dapat sepenuhnya diakui menjadi *acknowledged claim*. Berdasarkan *Fourteenth Public Liquidation Report* dari Stibbe tanggal 31 Januari 2013 untuk periode pelaporan tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 2012, proses pengadilan atas *claim* Bank Indonesia tersebut masih berlangsung – lihat Catatan E.4.

14. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp12.292.109 juta dan Rp11.263.320 juta, dengan rincian sebagai berikut:

e. Deferred Tax Assets

The balance of Deferred Tax Assets as at December 31, 2012 was IDR4,738,152 million and as at December 31, 2011 was IDR7,014,689 million. Further explanations on Deferred Tax Assets are provided in Note C.29.

f. Others

Included in Others is the placement of funds in Indover Bank Amsterdam (IBA) consisting of USD48,797,259.98 or the equivalent of IDR471,870 million and EUR4,987,667.93 or the equivalent of IDR63,891 million as at December 31, 2012 and other assets amounted to IDR58,364 million.

On November 5, 2009, at the Creditors Meeting in the Amsterdam Court in the Netherlands, Bank Indonesia's claims in IBA were stated as "disputed claim also provisionally acknowledged". In March 2010, Bank Indonesia proposed a Statement of Claim to Amsterdam Court requesting that Bank Indonesia's claim in IBA be declared an acknowledged claim. According to Fourteenth Public Liquidation Report from Stibbe dated January 31, 2013 for reporting period of October 1 to December 31, 2012, the hearing on Bank Indonesia's claim is still in progress – see Note E.4.

14. Allowance for Bad Debts

Total allowances for bad debts as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR12,292,109 million and IDR11,263,320 million, with the details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Saldo awal	11.263.320	15.649.892	- Beginning Balance
- Pemulihan penyisihan aktiva	0	0	- Asset Recovery
- Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(1.664)	(5.323.327)	- Assets write-off
- Pengurangan (penambahan) pembentukan penyisihan aktiva	1.030.453	936.755	- Decrease (addition) of allowance for bad debts
- Saldo akhir	12.292.109	11.263.320	- Ending Balance

15. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp439.730.814 juta dan Rp372.982.462 juta dengan rincian sebagai berikut:

15. Currency in Circulation

Currency in circulation consists of valid payment instruments not under the possession of Bank Indonesia, and with the position as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR439,730,814 million and IDR372,982,462 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Uang yang dicetak:	532.375.484	463.026.198	Printed Money:
- Uang Kertas	527.829.642	458.859.086	- Banknotes
- Uang Logam	4.535.314	4.156.584	- Coins
- Uang Khusus	10.528	10.528	- Special Editions
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran	(453)	(1.003)	Currency withdrawn from circulation
Uang dalam Persediaan	(92.628.114)	(90.027.554)	Currency Inventory
Lainnya	(16.103)	(15.179)	Others
Jumlah Uang dalam Peredaran	439.730.814	372.982.462	Currency in Circulation

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang antara lain diatur bahwa dalam kegiatan pemusnahan uang rupiah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah, dan pelaksanaan pemusnahannya didasarkan pada nota kesepahaman, yang berisi teknis pelaksanaan pemusnahan rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan rupiah. Selain itu, juga diatur bahwa jumlah dan nilai nominal rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI).

Dalam pelaksanaannya, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan berupa PBI Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal rupiah yang dimusnahkan harus ditempatkan dalam LNRI.

Pemusnahan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 adalah sebanyak 3.817.262.755 bilyet uang rupiah kertas dengan total nominal sebesar Rp47.565.579 juta, dan tidak terdapat pemusnahan uang rupiah logam. Bank Indonesia melalui surat Nomor 15/2/GBI/DHK tanggal 30 Januari 2013 telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menempatkan informasi tentang jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan selama tahun 2012 tersebut di atas dalam LNRI. Adapun rincian pemusnahan uang rupiah adalah sebagai berikut:

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Act Number 7 of 2011 on Currency governs, among other things, the destruction of Rupiah currency. This must be carried out by Bank Indonesia in coordination with the Government based on MoU setting out the technical details of the destruction operation, including the need to prepare an official report. In addition, the amount and nominal value of the Rupiah destroyed must be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

In the implementation of that Act, the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance on behalf of the Government have signed a Memorandum of Understanding Number 14/1/GBI/DPU/INK/MOU-5/MK.05/2012 dated June 27, 2012 concerning the Coordination of Planning, Printing and Destruction of Rupiah Banknotes and Coins. Hence, Bank Indonesia has issued Bank Indonesia Regulation Number 14/7/PBI/2012 dated June 27, 2012 concerning the Management of Rupiah.

As at article 18 (2) of Act Number 7 of 2011 concerning Currency, the amount and nominal value of Rupiah destroyed must be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Between January 1, 2012 to December 31, 2012 a total of 3,817,262,755 banknotes with a total value of IDR47,565,579 million were destroyed and no destruction in coins. Bank Indonesia through the Letter Number 15/2/GBI/DHK dated January 30, 2013 has requested the Ministry of Law and Human Rights to declare the information of the amount the value of the banknotes destroyed during 2012 in the Official Gazette of the Republic of Indonesia. The details of the Rupiah destroyed as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	Bilyet Notes	Nilai Nominal Nominal Value	Description
		Rp juta IDR million	
Uang Tidak Layak Edar	3.814.700.179	47.489.177	Money unfit for circulation
Uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran	2.562.576	76.402	Money withdrawn from circulation
	3.817.262.755	47.565.579	

16. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang Kas Pemerintah, mengelola Giro Pemerintah. Saldo Giro Pemerintah dalam rupiah dan valas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp53.919.048 juta dan Rp90.371.330 juta, dengan rincian sebagai berikut:

16. Government Demand Deposits

In performing its function as the account holder of the Government, Bank Indonesia manages Government Demand Deposits. The balances of Government Demand Deposits in Rupiah and foreign currencies as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR53,919,048 million and IDR 90,371,330 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Dalam Rupiah	29.913.656	56.494.255	- In Rupiah
- Dalam Valas	24.005.392	33.877.075	- In Foreign Currency
	53.919.048	90.371.330	

- a. Rekening Giro Pemerintah dalam rupiah per 31 Desember 2012, terdiri dari:
- 1) Rekening Kementerian Keuangan yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp2.199.992 juta.

- a. Government Demand Deposits in Rupiah as at December 31, 2012 consisting of:
- 1) Accounts of Ministry of Finance provided in Demand Deposits services by Bank Indonesia, consisting of:
 - a) General State Cash Account (RKUN) amounted to IDR2,199,992 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

- | | |
|--|---|
| <p>b) Rekening Penempatan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Rekening Kas Penempatan sebesar Rp940.127 juta. (2) Rekening selain Kas Penempatan yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan sebesar Rp26.737.626 juta. <p>2) Rekening Kementerian Keuangan dalam rupiah yang tidak diberikan jasa giro bersaldo nihil.</p> <p>3) Rekening Giro Pemerintah Lainnya dalam rupiah sebesar Rp35.911 juta.</p> <p>b. Rekening Giro Pemerintah dalam valas per 31 Desember 2012, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Rekening Kementerian Keuangan yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a) Rekening Kas Umum Negara dalam valas ekuivalen sebesar Rp1.086.314 juta. b) Rekening Penempatan dalam valas terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Rekening Kas Penempatan ekuivalen sebesar Rp5.550.351 juta. (2) Rekening selain kas penempatan yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan ekuivalen sebesar Rp17.111.482 juta. 2) Rekening Kementerian Keuangan dalam valas yang tidak diberikan jasa giro setara dengan Rp3.757 juta. 3) Rekening Giro Pemerintah Lainnya dalam valas sebesar Rp253.488 juta. | <p>b) <i>Placement Accounts consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Placement Cash Accounts amounted to IDR940,127 million.</i> (2) <i>Other accounts other than Placement Accounts categorized as Placement Accounts amounted to IDR26,737,626 million.</i> <p>2) <i>Accounts of Ministry of Finance in Rupiah without Demand Deposits facilities amounted to zero.</i></p> <p>3) <i>Other Government Demand Deposits in Rupiah amounted to IDR35,911 million.</i></p> <p>b. <i>Government Demand Deposits in foreign currencies as at December 31, 2012, consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Accounts of Ministry of Finance provided with Demand Deposits services by Bank Indonesia, consisting of:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>General State Cash Account in foreign currencies equivalent to IDR1,086,314 million.</i> b) <i>Placement Accounts in foreign currencies, consisting of:</i> <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Cash Placement Accounts equivalent to IDR5,550,351 million.</i> (2) <i>Other accounts categorized as Placement Accounts equivalent to IDR17,111,482 million.</i> 2) <i>Ministry of Finance's Accounts in foreign currencies without Demand Deposits facilities equivalent to IDR3,757 million.</i> 3) <i>Other Government Demand Deposits Accounts in foreign currencies equivalent to IDR253,488 million.</i> |
|--|---|

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

17. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum minimal berisi GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valas.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp290.364.048 juta dan Rp251.387.574 juta, dengan rincian sebagai berikut:

17. Bank Demand Deposits

Bank Demand Deposits are the balance of demand deposits of commercial banks in order to comply with the Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum – GWM) as at Bank Indonesia Regulation Number 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011 concerning Minimum Reserve Requirements of Commercial Banks in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies.

Bank Demand Deposits as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR290,364,048 million and IDR251,387,574 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Dalam Rupiah	239.956.602	207.537.910	- In Rupiah
- Dalam Valas	50.407.446	43.849.664	- In Foreign Currency
	290.364.048	251.387.574	

18. Giro Lainnya

Saldo Giro Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.208.608 juta dan Rp1.373.357 juta, dengan rincian sebagai berikut:

18. Other Demand Deposits

Other Demand Deposits as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR1,208,608 million and IDR1,373,357 million respectively, with details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Rekening Giro IMF	1.005.069	1.003.592	IMF
Rekening Giro Bank Dunia	61.661	57.421	World Bank
Rekening Giro ADB	2.153	196.480	ADB
Rekening Giro Lainnya	139.725	115.864	Others
	1.208.608	1.373.357	

Rekening giro IMF merupakan gabungan dari IMF *Account Number 1* dan IMF *Account Number 2*. IMF *Account Number 1* digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam rupiah, *purchases*, dan *repurchases* fasilitas IMF, sedangkan IMF *Account Number 2* digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF. Kurs yang ditetapkan oleh IMF untuk revaluasi per 30 April 2012 dan 30 April 2011 adalah masing-masing sebesar SDR0.0000701778 dan SDR0.0000719523. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Pemerintah dan Bank Indonesia. Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut, apabila diselesaikan dengan menerbitkan *promissory note*, akan menambah atau mengurangi nilai *promissory note* Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia.

Adapun total kuota Indonesia dan total nilai *promissory note* per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar SDR2,079,300,000 dan Rp26.550.675 juta.

The IMF Demand Deposits Accounts consist of IMF Account Number 1 and IMF Account Number 2. IMF Account Number 1 is for financial transactions related to quota's payments in Rupiah, purchases, and repurchases of IMF facilities, while IMF Account Number 2 is for IMF administrative transactions in Indonesia.

IMF Demand Deposits Account is revalued every April 30 based on the exchange rate set by IMF. The exchange rate set by IMF for evaluation purpose as at April 30, 2012 and April 30, 2011 were SDR0.0000701778 and SDR0.0000719523 respectively. This exchange rate adjustment concerns expenses or gains accruing to Bank Indonesia and the Government. The revaluation which the Government is liable for, if settled by Promissory Note, will increase or reduce the balance of the Government's promissory notes administered and kept by Bank Indonesia.

Indonesia's total quota and the total value of promissory notes as at December 31, 2012 amounted to SDR2,079,300,000 and IDR26,550,675 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

19. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 tercatat masing-masing sebesar Rp77.282.423 juta dan Rp117.367.163 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Nilai nominal SBI jangka waktu 9 bulan	78.872.500	119.776.999	BI Certificates Nominal Value for 9 Months Tenure
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar dimuka) yang belum di amortisasi	1.590.077	2.409.836	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	77.282.423	117.367.163	

19. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR77,282,423 million and IDR117,367,163 million respectively, with the details as follows:

20. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah jangka waktu sembilan bulan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 tercatat masing-masing sebesar Rp3.455.000 juta dan Rp3.476.000 juta.

20. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates with 9-month tenor as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR3,455,000 million and IDR3,476,000 million respectively.

21. Penempatan Berjangka

Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) terdiri dari Penempatan Berjangka rupiah dan valas. Penempatan Berjangka rupiah berjangka waktu paling singkat satu hari dan paling lama 12 bulan. Penempatan Berjangka valas berjangka waktu paling singkat tujuh hari dan paling lama 30 hari mulai dilakukan pada tanggal 13 Juni 2012.

21. Term Deposits

Term Deposits consist of Rupiah and foreign currencies. Term Deposits in Rupiah with minimum terms of one day and maximum terms of 12 months. Term Deposits in foreign currencies with minimum terms of seven days and maximum terms of 30 days has been effective on June 13, 2012.

Penempatan Berjangka dalam rupiah dan valas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing tercatat sebesar Rp208.511.902 juta

Term Deposits in Rupiah and foreign currencies as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR208,511,902 million and

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

dan Rp152.839.020 juta, dengan rincian sebagai berikut:

IDR152,839,020 million respectively, with the details as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Penempatan Berjangka:			Term Deposits
- Dalam Rupiah	180.515.989	152.839.020	- In Rupiah
- Dalam Valas	27.995.913	0	- In foreign currency
Jumlah	208.511.902	152.839.020	Total

a. Penempatan Berjangka Dalam Rupiah

a. Term Deposits in Rupiah

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Nilai Nominal			Nominal Value
- 2 s.d. 90 hari	180.797.500	154.381.100	- 2 - 90 days
- >90 hari	30.662.000	132.379.100	- >90 days
Dikurangi: Diskonto <i>Term Deposit</i> (bunga dibayar dimuka) yang belum diamortisasi	281.511	1.542.080	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
Jumlah	180.515.989	152.839.020	Total
	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	
Tingkat Diskonto			Discount Rate
- 2 s.d. 90 hari	4,25% - 4,43%	4,54% - 7,19%	- 2 - 90 days
- >90 hari	4,00% - 4,70%	4,59% - 7,40%	- >90 days

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Posisi Penempatan Berjangka dalam rupiah pada periode akhir 2012 meningkat dibandingkan periode akhir 2011. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan lelang *Term Deposit* dengan mayoritas dibuka dengan tenor jangka pendek (kurang dari 1 bulan) yang sesuai dengan preferensi perbankan. Dalam hal ini bank melakukan penempatan dana dari instrumen lainnya ke *Term Deposit*.

The balance of Term Deposits in Rupiah in the end of 2012 has increased if compared to those in the end of 2011. This is because of Term Deposits auctions were mostly opened with short term tenors (less than a month) and these matched with the banking preference. In this case banks placed their funds from other instruments to Term Deposits.

b. Penempatan Berjangka Dalam Valas**b. Term Deposits in Foreign Currencies**

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012		31 Desember 2011 December 31, 2011		Description
	Valas (USD) Foreign Currency	Rp juta IDR Million	Valas (USD) Foreign Currency	Rp juta IDR Million	
Nilai Nominal					Nominal Value
- 7 hari	815.000.000.00	7.881.050	0	0	- 7 days
- 14 hari	670.000.000.00	6.478.900	0	0	- 14 days
- 30 hari	1.410.000.000.00	13.634.700	0	0	- 30 days
Bunga Term Deposit Valas YMHD		1.263		0	Term Deposit Interest in USD
		27.995.913		0	
	31 Desember 2012 December 31, 2012		31 Desember 2011 December 31, 2011		
Tingkat Diskonto					Discount Rate
- 1 hari <i>overnight</i>		-		-	- <i>Overnight</i>
- 2 s.d. 30 hari		0,12% - 0,15%		-	- 2 - 30 days

22. Penempatan Dana

Penempatan Dana (*Deposit Facility*) yang berjangka waktu *overnight* pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing tercatat sebesar Rp69.024.266 juta dan Rp152.474.286 juta. Rincian Penempatan Dana adalah sebagai berikut:

22. Deposit Facilities

Deposit Facility with overnight term as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR69,024,266 million and IDR152,474,286 million respectively, with the details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Nilai nominal	69.039.600	152.512.400	Nominal Value
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	15.334	38.114	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
Jumlah	69.024.266	152.474.286	Total

23. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang berjangka waktu *overnight* pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 tercatat masing-masing sebesar Rp15.582.200 juta dan Rp17.403.100 juta.

23. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities

Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (Fasilitas Bank Indonesia Syariah - FASBIS) with *overnight* term as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR15,582,200 million and IDR17,403,100 million respectively.

24. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali dengan jangka waktu satu hari s.d. satu tahun, pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 tercatat masing-masing sebesar Rp99.591.644 juta dan Rp68.752.428 juta.

24. Securities Sold Under Repurchase Agreement

Securities Sold Under Repurchase Agreement with *overnight* term up to one year as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR99,591,644 million and IDR68,752,428 million respectively.

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
a. SUN yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali			a. SUN sold under repurchase agreement
- <i>Outstanding</i>	100.094.969	68.857.208	- <i>Outstanding</i>
- Dikurangi: bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi	561.249	313.693	- Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	99.533.720	68.543.515	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
b. SBSN yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali			b. SBSN sold under repurchase agreement
- Outstanding	58.087	209.325	- Outstanding
- Dikurangi: bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi	163	412	- Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
	57.924	208.913	
Jumlah	99.591.644	68.752.428	Total

25. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari:

25. Loans from Government

Loans from Government consist of:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Dalam Rupiah	89.900	103.731	- In Rupiah
- Dalam valas	8.186	15.353	- In Foreign Currency
Jumlah	98.086	119.084	Total

Pinjaman dari Pemerintah dalam rupiah adalah pinjaman Pemerintah dalam rangka program TSL, yang berasal dari ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF). Pinjaman tersebut diteruskanpinjamkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Bank Pelaksana telah melunasi seluruh pinjaman TSL pada tahun 2007. Bank Indonesia telah mengajukan percepatan pelunasan (*prepayment*) kepada Pemerintah sejak Oktober tahun 2009, terakhir dengan surat Nomor 14/2/GBI/DKBU tanggal

Loans from Government in Rupiah consist of Government loans revenue due to Two Step Loan (TSL) from ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF). The loans have been channeled by Bank Indonesia to the implementing banks for Major Commercial Plantations (Perkebunan Besar Swasta Nasional - PBSN). The implementing banks have settled the overall loans in 2007. Bank Indonesia had made some efforts by proposing prepayment to the Government since October 2009 and the last was by a letter Number 14/2/GBI/DKBU dated July 30,

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

30 Juli 2012, namun Pemerintah belum memberikan tanggapan. Pinjaman Pemerintah dalam rupiah per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp89.364 juta dan bunga sebesar Rp536 juta.

Pinjaman dari Pemerintah dalam valas per 31 Desember 2012 adalah pinjaman dari Pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD846.540 atau setara dengan Rp8.186 juta. Pinjaman tersebut merupakan sisa dari pinjaman Bank Indonesia yang diperoleh berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

2012. Yet, a response on this matter has not been given by the Government. Loans from Government in Rupiah as at December 31, 2012 amounted to IDR89,364 million with the interest of IDR536 million.

Loans from Government in foreign currencies as at December 31, 2012 is the TSL from Asian Development Bank (ADB) amounted to USD846,540 or equivalent to IDR8,186 million. The said amount represents the outstanding balance on a loan obtained by Bank Indonesia based on Act Number 13 of 1968 concerning the Central Bank.

26. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

26. Foreign Borrowings

Foreign borrowings consisted of:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	3.425.771	4.445.423	a. Syndicated loans from foreign banks
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	0	29.365	b. Non-syndicated loans from foreign banks
c. Bunga yang masih harus dibayar	1.933	2.815	c. Deferred interest payable
Jumlah	3.427.704	4.477.603	Total

Pinjaman Luar Negeri tersebut merupakan sisa dari pinjaman Bank Indonesia yang diperoleh berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yaitu:

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

The above amounts represent the outstanding balance on a loan obtained by Bank Indonesia based on Act Number 13 of 1968 concerning the Central Bank and consisting of:

a. Syndicated Loans from Foreign Banks

Syndicated loans from Foreign Banks represent syndicated loans from international banks to Bank Indonesia on behalf on the Government for monetary reserve purpose. The Syndicated loans consisted of:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	223.517	650.955	1) <i>Syndicated loan of 1994</i>
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	3.202.254	3.794.468	2) <i>Syndicated loan of 1995</i>
Jumlah	3.425.771	4.445.423	Total

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hong Kong *Branch* yang bertindak sebagai *agent*, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00. Pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994.

Dalam kesepakatan *London Club II* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000, yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 s.d. 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar USD15,873,900.05 atau setara dengan Rp153.501 juta dan JPY625,329,473.00 atau setara dengan Rp70.016 juta.

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore *Branch* yang bertindak

1) *Syndicated Loan of 1994*

Represents a syndicated loan from foreign creditors with Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hong Kong Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.00. The loan agreement was signed on March 28, 1994.

Under the London Club II agreement, the second amendment took place on September 28, 2000 to reschedule the loan principal amounted to USD150,000,000.00 for the payment period of March 28, 2002 to March 28, 2013. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.

The balance as at December 31, 2012 amounted to USD15,873,900.05 or equivalent to IDR153,501 million and JPY625,329,473.00 or equivalent to IDR70,016 million.

2) *Syndicated Loan of 1995*

Represents a syndicated loan from foreign banks with The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch as the agent, amounted

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

sebagai *agent*, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00. Pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

Dalam kesepakatan *London Club III* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002, yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 s.d. 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar USD252,595,200.00 atau setara dengan Rp2.442.596 juta dan JPY6,784,674,484.00 atau setara dengan Rp759.658 juta.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Pinjaman Non Sindikasi diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun. Terhadap pinjaman ini telah dilakukan pelunasan pada tanggal 27 April 2012 sebesar USD3,295,902.01 terdiri dari pokok sebesar USD3,238,287.48 dan bunga sebesar USD57,614.53.

Dengan demikian, posisi pinjaman non sindikasi per 31 Desember 2012 adalah nihil, sedangkan per 31 Desember 2011 sebesar USD3,238,287.48 atau setara dengan Rp29.365 juta.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

to USD500,000,000.00. The loan agreement was signed on June 14, 1995.

Under the *London Club III* agreement, the second amendment took place on September 6, 2002 to reschedule the loan principal amounted to USD300,000,000.00 for the payment period of December 14, 2008 to December 14, 2019. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.

The balance as at December 31, 2012 amounted to USD252,595,200.00 or equivalent to IDR2,442,596 million and JPY6,784,674,484.00 or equivalent to IDR759,658 million.

b. Non-Syndicated Loans from Foreign Banks

The non-syndicated loans was provided by the International Cooperation and Development Fund (was The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) with the upper limit amounted to USD10,000,000.00 and annual interest rate of 3.5%. The settlement of the loans has been done as at April 27, 2012 amounted to USD3,295,902.01, consisting of principal loans of USD3,238,287.48 and interest of USD57,614.53.

Thus, the balance for non-syndicated loans as at December 31, 2012 was zero, while as at December 31, 2011 was USD3,238,287.48 or equivalent to IDR29,365 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

c. Bunga yang Masih Harus Dibayar

Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh tempo adalah sebesar Rp1.933 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rp2.815 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

27. Alokasi Hak Tarik Khusus

IMF mempunyai kewenangan mengalokasikan Hak Tarik Khusus atau SDR (*Article XV Section 1 dan Article XVIII*) untuk menambah likuiditas global jika dibutuhkan dan untuk menambah cadangan devisa negara-negara anggota dengan biaya relatif murah. Keputusan Alokasi SDR tersebut memerlukan dukungan 85% hak suara negara anggota IMF. Tidak seperti halnya fasilitas pinjaman IMF pada umumnya, Alokasi SDR tidak mengandung *conditionality*. Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR, dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi yang besarnya kurang dari 0,01% per tahun.

Sejak diciptakannya SDR pada tahun 1969, IMF telah tiga kali memberikan Alokasi Umum SDR kepada negara anggota yaitu: 1) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1970-1972; 2) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1979-1981; dan 3) Alokasi SDR yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2009. Di samping Alokasi Umum SDR, IMF juga telah memberikan Alokasi Khusus SDR yang dilakukan satu kali pada tahun 1997, namun baru dialokasikan kepada negara anggota pada tanggal 9 September 2009 karena persetujuan 85% hak

c. Accrued Interests

The interests of foreign borrowings which have already become expenditures but yet paid due to the due dates as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR1,933 million and IDR2,815 million respectively.

27. Allocations of Special Drawing Rights

The IMF has the authority to allocate Special Drawing Rights (SDR) on Article XV(1) and Article XVIII to add global liquidity if needed and augment the foreign reserves of member countries at minimum cost. A decision to allocate SDRs needs the voting support of 85% of IMF member countries. SDR allocations are not subject to conditionality. The interest on SDR allocations is the same as interest on SDR so that member countries will get interest income if their SDR balance which is bigger than their SDR allocation. On the other hand, members will have to pay interest when their SDR balance is smaller than their SDR allocation. The IMF charges an administration fee for managing SDRs less than 0.01% per annum.

Since the inception of SDRs in 1969, the IMF has allotted SDR General Allocations to member countries three times: 1) SDR allocations allotted in several phases during 1970-1972; 2) SDR allocations allotted in several phases during 1979-1981; and 3) SDR allocations allotted on August 28, 2009. Besides SDR General Allocations, the IMF also added Special SDR Allocations in 1997, but these were only allotted to member countries on September 9, 2009 after getting approval from 85% of the voting rights of IMF member countries in August 2009. This special allotment was intended to provide SDR allocations

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

suara negara anggota baru diperoleh pada bulan Agustus 2009. Alokasi khusus ini dilakukan untuk memberikan alokasi SDR kepada negara-negara anggota yang bergabung dengan IMF setelah alokasi umum tahun 1981 dan untuk menyeimbangkan alokasi negara-negara anggota lainnya sejalan dengan perkembangan ekonominya.

Berdasarkan surat IMF tanggal 3 September 2009, pencatatan Alokasi SDR diklasifikasikan sebagai *other debt liabilities* dalam kelompok *long-term liabilities* sesuai *Balance of Payment Manual 6* (BPM6). Klasifikasi ini sesuai dengan karakteristik Alokasi SDR yang memiliki jangka waktu panjang sehingga dikategorikan sebagai utang jangka panjang.

Saldo Alokasi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2012 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau setara dengan Rp29.520.637 juta dan per 31 Desember 2011 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau setara dengan Rp27.483.875 juta.

to countries that joined the IMF after the general allocation of 1981, and to bring the allocations of other countries into line with their economic growth.

Based on the IMF letter dated September 3 2009, SDR Allocations are classified as other debt liabilities in the long-term liabilities section according to the guidance in the Balance of Payment Manual 6 (BPM6). This classification is in accordance with the characteristics of SDR allocations, which are long-term and categorized as long-term liabilities.

The Special Drawing Rights balance as at December 31, 2012 amounted to SDR1,980,438,720.00 or equivalent to IDR29,520,637 million and as at December 31, 2011 amounted to SDR1,980,438,720.00 or equivalent to IDR27,483,875 million.

28. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 terdiri dari:

28. Other Liabilities

Other liabilities as at December 31, 2012 and December 31, 2011 consisted of:

Uraian	31 Desember 2012 <i>December 31, 2012</i>	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>	Description
	Rp juta <i>IDR Million</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	
- Cash Collateral	55.094.624	16.841.761	- Cash Collateral
- Setoran Dana Pembukaan L/C dalam valas	603.460	17.501	- Collateral for Opening L/C in Foreign Currency
- Kewajiban Imbalan Kerja	3.139.453	2.085.926	- Employee Benefits Liabilities
- Utang Pajak	47.150	123.323	- Tax Payable
- Lainnya	2.456.613	2.693.751	- Other
Jumlah	61.341.300	21.762.262	Total

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

1) Cash Collateral

Cash collateral merupakan jaminan yang diterima oleh Bank Indonesia atas transaksi peminjaman SSB milik Bank Indonesia (*Third Party Securities Lending*) kepada pihak ketiga (*borrower*) melalui *securities lending agent*. Selanjutnya *cash collateral* direinvestasikan sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.6 dan Catatan C.13.

2) Kewajiban Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perhitungan kewajiban imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2012.

Program imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola oleh YKKBI. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan program imbalan pascakerja antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai, serta program Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Bantuan Cuti Besar dan Penghargaan Masa Pengabdian.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 14/8/PDG/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai dan Nomor 14/9/PDG/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Dewan Gubernur, ditetapkan bahwa THT terdiri dari Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT). PDG tersebut untuk memayungi pelaksanaan THT yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Anggota Dewan Gubernur dan Pegawai sesuai

1) Cash Collateral

Cash collateral is collateral received by Bank Indonesia in respect of Third Party Securities Lending to borrowers through securities lending agent. Such cash collateral is then reinvested as explained in Notes C.6 and C.13.

2) Employee Benefits

Bank Indonesia provides post and long-term employment benefit program. The actuarial calculation on post and long-term employment benefit program was at-formed by an independent actuary for the position as at December 31, 2012.

The Post Employment Programs consist of Defined Benefit Pension Plan managed by DAPENBI, and Retirement Benefit Program managed by YKKBI. In addition Bank Indonesia also provides other post employment benefits programs such as Employee Farewell Paid Leave and other long-term employee benefits program i.e. include extended Leave and Long Service Payments.

Based on the Board of Governors Regulation 14/8/PDG/2012 dated May 3, 2012 concerning Post Employment Program for Employee and Number 14/9/PDG/2012 dated May 3, 2012 concerning Post Employment Program for the Board of Governors, it is stated that Post Employment Programs consist of Housing Ownership Program (Tuperum) and Post Employment Health Benefits (TKHT). The regulation is intended to safeguard the implementation of Post Employment Program

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

UU Bank Indonesia tahun 1968, yaitu terdiri dari Tuperum dan Bantuan Kesehatan Pensiun (BKP). PDG tersebut mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/141/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1993 tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia yang menyatakan bahwa THT hanya terdiri dari Bantuan Pemilikan Rumah. PDG tersebut juga mengatur bahwa Tuperum dikelola dengan skema manfaat pasti, sedangkan TKHT dikelola dengan skema manfaat terukur, dimana Bank Indonesia dapat menyesuaikan besarnya persentase iuran dalam hal terdapat penyesuaian target manfaat sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Dengan pemberlakuan PDG tersebut, Bank Indonesia harus mengakui kewajiban imbalan kerja untuk TKHT sebesar Rp706.095 juta.

Mutasi aktiva, kewajiban, dan beban imbalan kerja pada periode Januari s.d. Desember 2012 adalah sebagai berikut:

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

provided by Bank Indonesia to the employees and the Board of Governors as per Bank Indonesia Act of 1968, consisting of Housing Ownership Program and Post Employment Health Benefits. The regulation revoked the Bank Indonesia Director Decree Number 25/141/KEP/DIR dated March 22, 1993 concerning the Post Employment Benefits regulation of Bank Indonesia stating that the Post Employment Benefits only consisted of Housing Ownership Program. The regulation also sets the Housing Ownership Program is under defined benefit schemes while Post Employment Health Benefits is under measureable benefit schemes. Bank Indonesia can also demand premium adjustments based on benefits target as set by the actuarial calculations.

With the enactment of the said regulations, Bank Indonesia should declare the employee benefits liabilities for Post Employment Health Benefits amounted to IDR706,095 million.

The balances of assets, liabilities and employee benefits expenses in period of January to December 2012 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	Manfaat Pensiun	Tunjangan Pemilikan Rumah	Tunjangan Hari Tua	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Jumlah	Description
	<i>Pension Benefits</i>	<i>Housing Allowance</i>	<i>Retirement Benefit Program</i>	<i>Other Post Employment Benefits</i>	<i>Other Long-Term Benefits</i>	<i>Tax</i>		
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2011	(420.113)	46.206	-	(336.794)	(1.193.010)	(182.215)	(2.085.926)	<i>Assets/(Liabilities) Balance as per December 31, 2011</i>
Beban Imbalan Kerja	(490.009)	(243.745)	(37.769)	(72.874)	(165.528)	(21.791)	(1.031.716)	<i>Employee Benefit Expenses</i>
Pendapatan Imbalan Kerja	-	-	-	-	147.936	-	147.936	<i>Employee Benefit Income</i>
Pendanaan Bank Indonesia	115.233	85.876	46.253	-	-	-	247.362	<i>Bank Indonesia's Contribution</i>
Pembayaran Manfaat				41.613	200.207	47.166	288.986	<i>Benefit Payments</i>
Pengakuan Kewajiban Imbalan TKHT	-	-	(706.095)	-	-	-	(706.095)	<i>Retirement Benefit Liabilities</i>
Saldo Aktiva / (Kewajiban) 31 Desember 2012	(794.889)	(111.663)	(697.611)	(368.055)	(1.010.395)	(156.840)	(3.139.453)	<i>Assets (liabilities) Balance as per December 31, 2011</i>

Adapun total kewajiban imbalan kerja manfaat pensiun, THT, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pajak untuk imbalan pascakerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.139.453 juta.

Total Employee benefits liabilities for pension benefits, post employment, other long-term services, tax on employee benefits and other long-term services as at December 31, 2012 amounted to IDR3,139,453 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

3) Lainnya

Bagian terbesar dari kewajiban lainnya adalah pembayaran kumulatif *Domestic Market Obligation (DMO) fee* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas sebesar Rp2.260.254 juta, yang masih harus diselesaikan oleh Bank Indonesia terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai kasir Pemerintah.

3) Others

The biggest part of Other Liabilities consisted of the cumulative payment of Domestic Market Obligation (DMO) fee for production sharing contractors of oil and gas sector (KKKS migas) amounted to IDR2,260,254 million, still must be settled by Bank Indonesia in relations with its duty as the Government cashier.

29. Perpajakan

a. Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan

Penerimaan (Beban) pajak penghasilan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

29. Taxation

a. Income Tax Revenues (Expenses)

Income tax revenues (expenses) for the period of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 were as follows:

Uraian	Jan – Des 2012 Jan – Dec 2012	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Pajak Kini	0	0	- Current Tax
- Pajak Tangguhan:			- Deferred Tax:
Penerimaan Pajak Tangguhan	262.986	64.291	Deferred Tax Income
Beban Pajak Tangguhan	(2.539.523)	0	Deferred Tax Expenses
Jumlah Penerimaan (Beban) Pajak Tangguhan	(2.276.537)	64.291	Total Deferred Tax Income (Expenses)

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan dan Penerimaan (Beban) pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2012:

b. Reconciliation

The reconciliation between Surplus (Deficit) before income tax and the income tax revenues (expenses) as shown in the Annual Financial Statements as at December 31, 2012 was as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	Jan – Des 2012	Jan – Des 2011	Description
	Jan – Dec 2012	Jan – Dec 2011	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan	8.096.230	(25.213.004)	Surplus (deficit) before income tax
Koreksi Fiskal Positif			Positive Fiscal Correction
Beda Tetap:			Permanent Differences:
1) Natura dan Kenikmatan	586.075	551.916	1) Benefits
2) Bantuan atau Sumbangan	46.310	47.958	2) Grants and Assistance
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	181.571	24.201	3) Fixed Assets and Inventory Depreciation
4) Lainnya	199.564	124.064	4) Others
Jumlah	1.013.520	748.139	Total
Beda Waktu:			Temporary Differences:
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	1.555.167	704.404	1) Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(7.255)	2.159	2) Fixed Assets and Inventory Depreciation
Jumlah	1.547.912	706.563	Total
Koreksi Fiskal Negatif			Negative Fiscal Corrections
Beda Tetap:	(3.601)	(3.102)	Permanent Differences:
Jumlah	(3.601)	(3.102)	Total
Beda Waktu:			Temporary Differences:
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(481.859)	(433.566)	1) Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(14.110)	(15.832)	2) Fixed Assets and Inventory Depreciation
Jumlah	(495.969)	(449.398)	Total
Surplus (Defisit) Fiskal	10.158.092	(24.210.802)	Fiscal Surplus (Deficit)
Selisih Lebih Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	0	0	Difference After Revaluation of Fixed Assets
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya:			Fiscal Losses from Previous Years:
Rugi Fiskal Tahun 2009 Rp171.713 juta	(171.713)	0	Fiscal Loss Year 2009 IDR171,713 million
Rugi Fiskal Tahun 2010 Rp26.931.000 juta	(9.986.379)	0	Fiscal Loss Year 2010 IDR26,931,000 million
Rugi Fiskal Tahun 2011 Rp24.210.802 juta	0	0	Fiscal Loss Year 2011 IDR24,210,802 million
Kompensasi Kerugian Fiskal	(10.158.092)	0	Fiscal Losses Compensation
Surplus (Defisit) Kena Pajak	0	0	Taxable Surplus (Deficit)
Perhitungan Pajak Terutang:			Calculation of Current Tax:
25% x Rp0	0	0	25% x Rp0
Jumlah Pajak Terutang	0	0	Current Tax
Kredit Pajak:			Tax Credit:
Angsuran PPh pasal 25	0	0	Article 25 Income tax installments
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	0	0	Income Tax Payable

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Pada periode Januari s.d. Desember 2012 Bank Indonesia memperoleh surplus fiskal sebesar Rp10.158.092 juta, namun Bank Indonesia memiliki hak kompensasi kerugian fiskal tahun 2009 s.d. 2011 yang masih mencukupi untuk dikompensasikan sehingga pajak penghasilan terutang tahun 2012 adalah nihil.

Defisit fiskal tahun 2011 sebesar Rp24.210.802 juta, setelah memperhitungkan selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap sebesar Rp9.266.042 juta maka defisit kena pajak tahun 2011 menjadi sebesar Rp14.944.760 juta. Setelah menerima penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-601/PJ.031/2012 tanggal 7 Juni 2012 perihal Tanggapan atas surat Bank Indonesia Nomor 14/35/DKI tanggal 15 Mei 2012 perihal Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap Bank Indonesia, selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap sebesar Rp9.266.042 juta dikoreksi dari penerimaan fiskal sehingga defisit kena pajak tahun 2011 disajikan kembali menjadi Rp24.210.802 juta. Terkait hal tersebut, pada tahun 2012 Bank Indonesia telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011.

c. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Posisi Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 merupakan pengaruh beda waktu dan kompensasi kerugian fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

In the period of January to December 2012 Bank Indonesia gained the fiscal surplus of IDR10,158,092 million, yet Bank Indonesia reserves the compensation right on the fiscal deficits from 2009-2011 which is can be compensated so that the payable income tax as at 2012 is zero.

The fiscal deficit of 2011 amounted to IDR24,210,802 million. After calculating the surplus of fixed assets revaluation amounted to IDR9,266,042 million, the taxable deficit of 2011 has become amounting to IDR14,944,760 million. After the receipt of confirmation from the Directorate General of Taxation with the letter Number S-601/PJ.031/2012 dated June 7, 2012 on the response to letter from Bank Indonesia Number 14/35/DKI dated May 15, 2012 concerning Revaluation on Bank Indonesia's Fixed Assets, the surplus difference of fixed assets revaluation amounted to IDR9,266,042 million has been adjusted from the fiscal income. Thus, the taxable deficit is now presented at IDR24,210,802 million. In relation to this matter, in 2012 Bank Indonesia has made the adjustment on Entities Annual Income Tax Notice of 2011.

c. Deferred Tax Assets (Liabilities)

The balance of Deferred tax Assets (Liabilities) as at December 31, 2012 and December 31, 2011 was the result of time differences as shown below:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
1) Imbalan Pasca Kerja	28.162	23.393	1) Post Employment Benefits
2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(185.110)	221.382	2) Other Long-Term Employment Benefits
3) Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun	374.776	26.063	3) Post Employment Benefits – Pension
4) Tunjangan Hari Tua	855.480	0	4) Retirement Benefits
5) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(21.365)	(13.673)	5) Fixed Assets and Inventory Depreciation
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu	1.051.943	257.165	Total Temporary Differences Fiscal Correction
Rugi Fiskal	0	24.210.802	Fiscal Loss
Jumlah	1.051.943	24.467.967	Total
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan tahun berjalan	262.986	64.291	Deferred Tax Assets (Liabilities) in current year
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan tahun sebelumnya	7.014.689	6.950.398	Deferred Tax Assets (Liabilities) in previous year
Saldo Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan	7.277.675	7.014.689	Deferred Tax Assets (Liabilities) Balance
Penyesuaian APT karena kompensasi atas rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya	(2.539.523)	0	APT Adjustment due to compensation of previous years' fiscal losses
Saldo Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan Setelah Penyesuaian	4.738.152	7.014.689	Deferred Tax (Liabilities) Balance After Adjustment

Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2011 sebesar Rp64.291 juta hanya memperhitungkan perbedaan temporer, dengan pertimbangan aktiva pajak tangguhan sudah memadai untuk dikompensasi dengan surplus fiskal pada masa mendatang.

Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2012 sebesar Rp262.986 juta berasal dari perbedaan temporer yaitu 25% x Rp1.051.943 juta. Selain itu, saldo aktiva pajak tangguhan (tahun berjalan dan tahun sebelumnya) juga disesuaikan dengan kerugian fiskal tahun 2009 dan 2010 yang

Deferred Tax Assets of 2011 amounted to IDR64,291 million only included time differences based on the consideration that deferred tax assets were already sufficient to be compensated for fiscal surplus in the future.

Deferred Tax Assets in 2012 of IDR262,986 million also included time differences of 25% x IDR1,051,943 million. Besides, the balance of Deferred Tax Assets (current year and previous year) has also been compensated with fiscal losses in 2009 and 2010 and also compensated

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

dikompensasikan dengan surplus fiskal tahun 2012 sebesar Rp2.539.523 juta, yaitu 25% x surplus fiskal tahun 2012 sebesar Rp10.158.092 juta. Dengan demikian, saldo aktiva pajak tangguhan setelah penyesuaian menjadi Rp4.738.152 juta – lihat Catatan C.13.e.

with fiscal surplus amounting to IDR2,539,523 million, namely 25% x fiscal surplus of 2012 amounting to IDR10,158,092 million. Thus, the balance of Deferred Tax Assets after the compensation was IDR4,738,152 million – see Note C.13e.

d. Utang Pajak

d. Tax Liabilities

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
PPh Pasal 25/29	0	0	Article 25/29
Pasal 21	11.559	16.851	Article 21
Pasal 22	0	24	Article 22
Pasal 23	1.451	1.309	Article 23
Pasal 26	128	218	Article 26
Pasal 4 ayat 2	31.961	25.415	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.051	79.506	Value Added Tax (VAT)
Jumlah	47.150	123.323	Total

30. Modal

Berdasarkan UU Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Modal pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp17.114.024 juta dan Rp16.876.926 juta.

30. Capital

Based on Bank Indonesia Act, the capital of Bank Indonesia shall be at least IDR2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah). This capital must be increased to up to 10% (ten percent) of total monetary liabilities, with funds to be derived from general reserves or assets revaluation reserves. The capital as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR17,114,024 million and IDR16,876,926 million respectively.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

31. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Pasal 62 UU Bank Indonesia mengatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Pada penjelasan Pasal 62 UU Bank Indonesia disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan periode Januari s.d. Desember 2012 adalah sebesar Rp738.006 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembaruan/penggantian harta tetap sebesar Rp678.222 juta.
- b. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp59.784 juta.

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp17.145.069 juta dan Rp13.168.140 juta.

31. General and Statutory Reserves

Article 62 of Bank Indonesia Act states that surplus arising from Bank Indonesia's operations shall be distributed as follows:

- a. 30% for statutory reserves; and*
- b. The remainder to be reinvested as General Reserves so that the sum of capital and General Reserves become 10% of the overall monetary liabilities as referred to in article 6 (2).*

Further, as stated in article II Number 3, as long as the settlement of BLBI has not been completed, the statutory reserves shall be set at 10%.

According to the elucidation on Article 62 of the Bank Indonesia Act, Statutory Reserves are to be used for, among other things, financing the replacement and or renewal of fixed assets, procurement of equipment, and organizational and human resources development as part of the implementation of the duties and authorities of Bank Indonesia, as well as the investments needed to implement the duties of Bank Indonesia. The Statutory reserves utilized in the period of January to December 2012 amounted to IDR738,006 million with the following details:

- a. Replacement/renewal of fixed assets amounted to IDR678,222 million.*
- b. Organizational and human resources development amounted to IDR59,784 million.*

The balances of General Reserves and Statutory Reserves as at December 31, 2012 amounted to IDR17,145,069 million and IDR13,168,140 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

32. Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi

Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp113.221.542 juta dan Rp42.382.140 juta yang terdiri atas:

32. Unrealized Gains/Losses

The balances of Unrealized Gains/Losses as at December 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to IDR113,221,542 million and IDR42,382,140 million respectively, with the details being as follows:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Revaluasi harga emas	36.919.460	32.667.619	- Revaluation of gold price
- Revaluasi SSB dalam valas	26.216.218	18.516.019	- Revaluation of marketable securities in foreign currency
- Revaluasi SSB dalam Rupiah	14.037.119	8.727.030	- Revaluation of marketable securities in Rupiah
- Selisih kurs valas	36.048.745	(17.528.528)	- Differences in foreign exchange rate
	113.221.542	42.382.140	

Peningkatan keuntungan yang belum direalisasi dari sebesar Rp42.382.140 juta menjadi Rp113.221.542 juta terutama karena kenaikan jumlah dan harga pasar emas, kenaikan revaluasi harga SSB dalam valas, dan kenaikan selisih kurs valas akibat melemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap valas USD, AUD, NZD, GBP, dan CAD.

The increase in unrealized gains from IDR42,382,140 million to IDR113,221,542 million was due to an increase in market price and amount of gold, an increase in foreign currencies marketable securities, and an increase in the exchange rate differential as a result of Rupiah weakness mainly against the USD, AUD, NZD, GBP, and CAD.

33. Penerimaan Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 terdiri atas:

33. Revenues from Foreign Reserves Management

Revenues from foreign reserves management for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	Jan – Des 2012 Jan – Dec 2012	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Bunga Sektor Valas	16.911.402	16.855.434	- Interest in foreign exchange sector
- Provisi Sektor Valas	163.443	142.235	- Provisions in foreign exchange sector
- Penerimaan Valas Lainnya	7.623.068	6.423.676	- Other foreign exchange revenues
	24.697.913	23.421.345	

Penerimaan valas lainnya tahun 2012 terutama berasal dari keuntungan atas transaksi SSB dan *External Portfolio Manager* sebesar Rp7.579.658 juta.

Other foreign exchange revenues in 2012 primarily consisted of securities capital gains and External Portfolio Manager amounted to IDR7,579,658 million.

34. Penerimaan Pengelolaan SSB dalam Negeri

Penerimaan dari Pengelolaan SSB Dalam Negeri pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp7.074.621 juta dan Rp3.756.152 juta. Peningkatan penerimaan pengelolaan SSB Dalam Negeri terkait dengan meningkatnya penerimaan kupon dari SBN yang dimiliki Bank Indonesia.

34. Revenues from Domestic Securities

Revenues from Domestic Securities for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR7,074,621 million and IDR3,756,152 million respectively. The increase in revenues from Domestic Securities related with the increase of coupons revenue of SBN owned by Bank Indonesia.

35. Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp289.421 juta dan Rp515.888 juta. Penerimaan sebagian besar berasal dari bunga surat berharga yang dikeluarkan Pemerintah sebesar Rp242.765 juta.

35. Revenues from Credit and Financing

Revenues from credit and financing for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR289,421 million and IDR515,888 million respectively. Included in that amount were accrued revenues from Government Bond interests amounted to IDR242,765 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

36. Selisih Kurs karena Transaksi Valas

Selisih kurs karena transaksi valas pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp7.416.842 juta dan negatif Rp11.693.801 juta.

Keuntungan selisih kurs dari transaksi valas karena melemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap valuta EUR, AUD, USD, dan CAD.

37. Penerimaan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp241.272 juta dan Rp223.897 juta.

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 antara lain berasal dari Jasa Penyelenggaraan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) sebesar Rp128.234 juta yang merupakan penerimaan atas transaksi RTGS sebanyak 856.038 transaksi dengan total nominal Rp4.848.584.392 juta. Selain itu, terdapat penerimaan Jasa Penyelenggaraan kliring sebesar Rp110.520 juta yang merupakan penerimaan atas transaksi kliring sebanyak 106.101.218 transaksi dengan total nominal sebesar Rp2.170.341.300 juta.

38. Penerimaan Pengawasan Perbankan

Penerimaan dari Pengawasan Perbankan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp26.264 juta dan Rp17.467 juta.

39. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp289.262 juta dan Rp1.108.197 juta.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

36. Exchange Differences

The value of Exchange Differences for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR7,416,842 million and negative IDR11,693,801 million respectively.

Revenues from Exchange Differences due to an increase in the exchange rate differential as a result of Rupiah weakness mainly against the EUR, AUD, USD, and CAD.

37. Revenues from Payment System Services

Revenues from Payment System Services for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR241,272 million and IDR223,897 million respectively. Revenues from payment system services for the period of January 1 to December 31, 2012 were derived, among other things, from Real Time Gross Settlement (RTGS) services amounted to IDR128,234 million which came from RTGS transactions of 856,038 times with the total nominal of IDR4,848,584,392 million. In addition, revenues from clearing services amounted to IDR110,520 million which came from clearing transactions of 106,101,218 times with the total nominal of IDR2,170,341,300 million.

38. Revenues from Banking Supervision

Revenues from Banking Supervision for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR26,264 million and IDR17,467 million respectively.

39. Other Revenues

Other revenues for the periods of January 1 to December 31, 2012 and 1 January to December 31, 2011 amounted to IDR289,262 million and IDR1,108,197 million respectively.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Dalam penerimaan lainnya tahun 2011, terdapat penerimaan dari keuntungan uang kertas/uang logam yang ditarik dari peredaran sebesar Rp840 miliar sedangkan penerimaan lainnya tahun 2012, termasuk penerimaan lainnya dalam rupiah sebesar Rp183.895 juta dan penerimaan sanksi administratif sebesar Rp98.471 juta.

Other revenues in 2011 included gains from the withdrawal of banknotes/coins in the amount of IDR840 billion, while other revenues in 2012 were revenues in Rupiah amounted of IDR183,895 million and revenues from administrative sanctions amounted to IDR98,471 million.

40. Beban Operasi Moneter

Beban Operasi Moneter terdiri atas:

40. Monetary Operations Expenses

Monetary Operations Expenses consisted of:

Uraian	Jan – Des 2012 Jan – Dec 2012	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Pengembangan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar	18.982.704	30.074.985	- Policy Development, Endorsement and Execution for Base Money
- Penelitian Uang Beredar	20.820	17.030	- Research on Base Money
- Pengelolaan Informasi Uang Beredar	2.755	0	- Information Management on Base Money
	19.006.279	30.092.015	

Pengembangan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar merupakan bagian pengeluaran terbesar Bank Indonesia. Beban Operasi Moneter terhadap total beban untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp19.006.279 juta (59,51%) dan Rp30.092.015 juta (70,70%).

The Development, Establishment and Implementation of Currency in Circulation was the largest expense of Bank Indonesia. The Monetary Operations Expenses to total expenses for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR19,006,279 million (59.51%) of total expenses and IDR30,092,015 million (70.70%).

Beban Pengembangan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar tahun 2012 sebesar Rp18.982.704 juta antara lain terdiri dari Beban Operasi Moneter sebesar Rp17.151.584 juta dan Jasa Giro Bank rupiah dan valas sebesar Rp1.233.510 juta. Beban Operasi Moneter sebesar Rp17.151.584

The expenses on The Development, Establishment and Implementation of Currency 2012 was IDR18,982,704 million, among other things, consisted of Monetary Operations expenses of IDR17,151,584 million and Demand Deposits Services expenses in Rupiah and foreign currencies of IDR1,233,510

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

juta, terutama terdiri dari Diskonto SBI sebesar Rp4.271.096 juta, Diskonto Penempatan Dana sebesar Rp4.063.432 juta, bunga Penempatan Berjangka sebesar Rp5.318.543 juta, dan bunga Reverse Repo SBN sebesar Rp3.479.038 juta – lihat Catatan A.3.

41. Beban Pengelolaan Devisa

Beban Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp143.487 juta dan Rp67.827 juta.

42. Beban Pinjaman Luar Negeri

Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp92.384 juta dan Rp178.422 juta.

43. Beban Jasa Giro Pemerintah

Beban Jasa Giro Pemerintah pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp4.156.871 juta dan Rp4.666.712 juta. Jasa Giro diberikan terhadap Rekening Giro Kementerian Keuangan yang termasuk dalam kategori Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Penempatan. Tingkat bunga Jasa Giro Rekening Giro Kementerian Keuangan sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tanggal 30 Januari 2009 Tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara (PUN) diterapkan untuk RKUN Rupiah dan valuta asing adalah sebesar 0,1% per tahun. Adapun tingkat bunga Jasa Giro untuk rekening penempatan dalam rupiah adalah sebesar 65% dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI rate) per tahun, untuk rekening penempatan dalam USD adalah sebesar 65% dari Fed Fund rate per tahun, untuk rekening penempatan

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

million. Monetary Operations expenses of IDR17,151,584 million, mainly consisted of SBI discounts of IDR4,271,096 million, Placement Account discounts of IDR4,063,432 million, Term Deposits interests of IDR5,318,543 million, and Reverse Repo SBN interests of IDR3,479,038 million – see Note A.3.

41. Foreign Reserves Management Expenses

Foreign Reserves Management Expenses for the periods of 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR143,487 million and IDR67,827 million respectively.

42. Foreign Loans Management Expenses

Foreign Loans Management Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR92,384 million and IDR178,422 million respectively.

43. Government Account Interest Expenses

Government Account Interests Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR4,156,871 million and IDR4,666,712 million respectively. Such interest was attributed to the Ministry of Finance's Account Interest which under General State Cash Account and Placement Accounts. The interest rate of the account due to the Letters of the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 17/KMK.05/2009 and Number 11/3/KEP.GBI/2009 dated January 30, 2009 concerning the Coordination of State Funds Management for State Funds Accounts in Rupiah and Foreign Currencies is 0.1% per annum. In addition, the interest rate for Account Interest Expenses for Placement Accounts in Rupiah is 65% of BI rate per annum, for Placement Accounts in USD is 65% of Fed Fund rate per annum, and for Placement Account in

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

dalam valuta asing non USD adalah sebesar 65% dari *home currency* per tahun.

other foreign currencies is 65% of home currency rate per annum.

44. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.464.402 juta dan Rp2.010.016 juta. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran tahun 2012 antara lain terdiri dari Beban Pelaksanaan Pencetakan Uang sebesar Rp893.930 juta dan Beban Pelaksanaan Pengadaan Bahan Uang sebesar Rp437.922 juta.

44. Payment System Operating Expenses

Payment System Operating Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR1,464,402 million and IDR2,010,016, respectively. Payment system services expenses for 2012 included, among other things, included currency printing expenses amounted to IDR893,930 million and currency procurement expenses amounted to IDR437,922 million.

45. Beban Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

Beban Pengaturan dan Pengawasan Perbankan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp183.002 juta dan Rp174.917 juta.

45. Banking Regulation and Supervision Expenses

Banking Regulation and Supervision Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR183,002 million and IDR174,917 million respectively.

46. Beban Umum dan Lainnya

Pos Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 terdiri atas:

46. General and Other Expenses

General and Other Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 consisted of:

Uraian	Jan – Des 2012 Jan – Dec 2012	Jan – Des 2011 Jan – Dec 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Sumber Daya Manusia	4.674.059	3.401.743	- Human resources
- Logistik dan Pengamanan	949.326	878.532	- Logistics and security
- Sistem Teknologi Informasi	102.782	14.564	- IT system
- Lainnya	1.135.248	1.058.056	- Other
	6.861.415	5.352.895	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Sesuai dengan UU Bank Indonesia, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Dalam beban SDM termasuk juga imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 sebesar Rp3.139.453 juta sebagaimana dijelaskan dalam pos Kewajiban Lain-lain. Selain itu, termasuk juga gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan, dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp15.619 juta dan Rp17.184 juta.

Di dalam beban SDM tersebut, termasuk juga THT berupa Tuperum dan TKHT serta Program Jamsostek sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

47. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Surplus tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2012 adalah 3,14%.

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2012 masing-masing adalah Rp39.496.817 juta dan Rp1.257.699.156 juta. Modal, Kewajiban Moneter, dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Under Bank Indonesia Act, the salary, other income and facilities of the Governor, Senior Deputy Governor, and Deputy Governors shall be prescribed by the Board of Governors. The amount of such salary and other income of the Governor shall be determined at a maximum of two times the salary and other income of an employee of the highest grade in Bank Indonesia.

Included in Human Resources expenses were post employment and long-term employment expenses for the period of January 1 to December 31, 2012 amounted to IDR3,139,453 million as explained in the Other Liabilities item, as well as salaries, incentives, holiday bonuses (tunjangan hari raya) and annual leave payments to the Board of Governors for the period of January 1 to December 31, 2012 and January 1 to December 31, 2011 amounted to IDR15,619 million and IDR17,184 million respectively.

Included in the Human Resources expenses are Bank Indonesia's membership expenses in Housing Ownership Program and Social Man Power Benefits program (Jamsostek) are compulsory under the Jamsostek Act Number 3 of 1992 on work accident insurance, life insurance and retirement insurance.

47. Capital Ratio

The ratio of capital (Capital, General Reserves and Current Year Surplus) to Monetary Liabilities as at December 31, 2012 was 3.14%.

The capital and monetary liabilities used in the Capital Ratio calculation as at December 31, 2012 amounted to IDR39,496,817 million and IDR1,257,699,156 million, respectively. The Capital, Monetary Liabilities and Capital Ratio as at December 31, 2012 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	Description
	Rp juta IDR Million	
a. Modal		a. Capital
- Modal	17.114.024	- Capital
- Cadangan Umum	17.145.069	- General Reserves
- 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	5.237.724	- 90% Current Year Surplus (after tax)
Jumlah	39.496.817	Total
b. Kewajiban Moneter		b. Monetary Liabilities
- Uang dalam Peredaran	439.730.814	- Currency in Circulation
- Giro Pemerintah	53.919.048	- Government Demand Deposits
- Giro Bank	290.364.048	- Bank Demand Deposits
- Giro Lainnya (kecuali Giro IMF, Bank Dunia, dan ADB)	139.725	- Other Demand Deposits (excluding IMF, World Bank, and ADB Demand Deposits)
- Kewajiban yang timbul dari operasi moneter (SBI, SBIS, Penempatan Berjangka, Penempatan Dana, FASBIS, Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali)	473.447.435	- Liabilities arising from Monetary Operations (SBI, SBIS, Long-Term Placements, Fund Placements, FASBIS, Securities Sold Under Repurchase Agreements)
- Pinjaman dari Pemerintah	98.086	- Loans from Government
Jumlah	1.257.699.156	Total
c. Rasio Modal		c. Capital Ratio
$\frac{\text{Modal} + \text{Cadangan Umum} + 90\% \text{ Surplus Tahun Berjalan}}{\text{Kewajiban Moneter}} =$	3,14%	$\frac{\text{Capital} + \text{General Reserves} + 90\% \text{ Current Year Surplus}}{\text{Monetary Liabilities}}$

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

D. PENJELASAN LAINNYA

1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

D. OTHERS

1. Related Party Transactions

Related Party transactions consisted of:

Uraian	31 Desember 2012 December 31, 2012	31 Desember 2011 December 31, 2011	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- Tagihan pada Indover Bank	535.761	501.044	- Claims on Indover Bank
- Pinjaman Pegawai	411.623	439.704	- Employee Loans
	947.384	940.748	

Tagihan pada Indover Bank per 31 Desember 2012 sebesar Rp535.761 juta sebagaimana dijelaskan pada C.13.

The claims to Indover Bank as at December 31, 2012 amounted to IDR535,761 million as explained in C.13.

Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada karyawan dan Anggota Dewan Gubernur berdasarkan PDG Nomor 6/15/PDG/2004 jo. PDG Nomor 8/11/PDG/2006 tentang Pinjaman Multiguna bagi Pegawai Bank Indonesia dan PDG Nomor 4/9/PDG/2002 jo. PDG Nomor 8/12/PDG/2006 tentang Pinjaman Multiguna bagi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia provides loans to employees based on Board of Governors Decisions Number 6/15/PDG/2004 and Number 8/11/PDG/2006 concerning Multi Purpose Loans to Bank Indonesia Employees and PDG Number 4/9/PDG/2002 and Number 8/12/PDG/2006 concerning multipurpose loans for the members of the Board of Governors of Bank Indonesia.

Disamping itu, terdapat tanah/bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)/Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI)/Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI)/Persatuan Istri Pegawai

In addition, there are lands/buildings used by the Indonesia Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia - YPPI), Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia - YKKBI), Bank Indonesia Retired Employees Association

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/sewa/bangun guna serah.

(Persatuan Pensiunan Bank Indonesia - PPBI), Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation (Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia - YASPORBI), and Bank Indonesia Employees' Wives Foundation (Persatuan Isteri Pegawai Bank Indonesia - PIPEBI) under loan, rental or Build Operate Transfer (BOT) agreements.

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Pasal 47 ayat 6 UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). Saat ini sebagian dana yang terhimpun dalam DKP digunakan sebagai sumber pinjaman bagi pegawai dan selebihnya ditempatkan dalam bentuk deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

Posisi DKP per 31 Desember 2012 adalah Rp878.496 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp417.003 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp20.457 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp441.036 juta.

2. Employee Welfare Funds

Under Article 47(6) of the Republic of Indonesia Central Bank Act Number 13 of 1968, Bank Indonesia is obliged to allocate 7.5% of its after tax profit which has been validated to the employee welfare fund (Dana Kesejahteraan Pegawai – DKP). The DKP is used as a source of employee loans. Meanwhile, idle funds are placed in time deposits and Government bonds. Based on the Governor of Bank Indonesia Number 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 dated June 29, 2001, YKKBI was appointed as the fund manager of the DKP.

As at December 31, 2012 the DKP balance amounted to IDR878,496 million, which consisted of Bank Indonesia employee loans amounted to IDR417,003 million, undistributed funds for employee amounted to IDR20,457 million and funds managed by YKKBI amounted to IDR441,036 million.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan mulai tanggal 31 Desember 2013 beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Financial Services Authority

Under Article 55(2) of Act Number 21 of 2011 dated November 22, 2011 concerning Financial Services Authority, the function, duty and powers of regulating and supervising financial services in the banking sector will be transferred from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) on December 31, 2013.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Dalam rangka persiapan pembentukan OJK, BI dan Kementerian Keuangan membentuk tim bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 43/KMK.010/2012 dan Nomor 14/6/KEP.GBI/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 152/KMK.010/2012 dan Nomor 14/32/KEP.GBI/2012 tanggal 14 Mei 2012. Untuk mendukung pembentukan OJK dan penyiapan Organisasi Bank Indonesia pasca pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, Bank Indonesia membentuk dua *Task Force*, yaitu *Task Force* OJK yang bertugas menyiapkan hal-hal terkait dengan pembentukan OJK berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/17/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 26 Maret 2012. *Task Force* lainnya adalah mengenai Penyiapan Bisnis Proses Stabilitas Sistem Keuangan dan Bank Indonesia ke depan sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/14/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Selain itu atas permintaan Ketua Dewan Komisiner OJK, Bank Indonesia juga telah menugaskan 77 orang pegawai pada satuan kerja *shared functions*, fungsi audit internal dan manajemen risiko, serta fungsi edukasi dan perlindungan konsumen di OJK, sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/72/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 27 Desember 2012. Pegawai Bank Indonesia tersebut di atas ditugaskan di OJK untuk jangka waktu empat tahun, mulai 31 Desember 2012 s.d. 31 Desember 2016. Remunerasi pegawai tersebut dibayarkan oleh Bank Indonesia sebesar hak yang diterima pegawai tersebut sesuai dengan jabatannya di Bank Indonesia,

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

The preparation required for the establishment of the OJK area provided for in the Joint Decision of the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 43/KMK.010/2012 and Number 14/6/KEP.GBI/2012 dated February 14, 2012, which have been amended by Joint Decision of the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 152/KMK.010/2012 and Number 14/32/KEP.GBI/2012 dated May 14, 2012. In supporting the establishment of the OJK and the preparations of Bank Indonesia's Organization after the transfer of bank supervisory duty to the OJK, Bank Indonesia has established 2 (two) Task Forces. The Two Task Forces consist of OJK Task Force with its duty to prepare related matters concerning the establishment of OJK based on the Governor of Bank Indonesia's Decree Number 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 dated February 10, 2012 which has been amended by the Decree Number 14/17/KEP.GBI/INTERN/2012 dated March 26, 2012. The other Task Force is for preparing the Business Process of Future Financial System Stability and Bank Indonesia's Future based on the Governor of bank Indonesia's Decree Number 14/14/KEP.GBI/INTERN/2012 dated March 19, 2012.

In addition, based on the request of the OJK board of commissioner chairman, Bank Indonesia has appointed 77 (seventy seven) employees in shared functions work force with the duties in internal auditing and risk management, and education and consumer protection. This was based on the Governor of Bank Indonesia's Decree Number 14/72/KEP.GBI/INTERN/2012 dated December 27, 2012. The said Bank Indonesia's employees are to serve the OJK for 4 (four) years of tenor effective from December 31, 2012 to December 31, 2016. Remuneration for the employee will be paid by Bank Indonesia up to the amount received as per their

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

sedangkan OJK membayarkan selisih remunerasi apabila remunerasi yang ditetapkan di OJK lebih besar dari jumlah yang diterima pegawai di Bank Indonesia.

4. Hibah

Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/11/PDG/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Surat Edaran Nomor 14/37/INTERN tanggal 27 September 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Luar Negeri Bank Indonesia.

Hibah yang dikelola Bank Indonesia pada tahun 2012 adalah:

- a. Alliance for Financial Inclusion (AFI) atau Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH untuk proyek berupa *Implementation of Financial Identity Project to Promote Financial Inclusion in Indonesia* sebesar EUR460,000.00, telah dicairkan sebesar EUR420,000.00 sedangkan realisasinya sebesar EUR314,471.39, sisa sebesar EUR105,528.61 dalam proses pengembalian kepada GIZ. Hibah tersebut telah diselesaikan pada bulan November 2012.
- b. Jasa konsultasi (*expertise*) dari International Finance Corporation (IFC) untuk proyek berupa *The Development of Branchless Banking (Mobile Banking) Regulation* senilai USD245,250.00, telah diselesaikan pada bulan Juni 2012.
- c. Bantuan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk proyek berupa *Capacity Development for Supporting Industry Development: Credit Guarantee System* senilai JPY85,662, telah diselesaikan pada bulan April 2012.

positions and ranks in Bank Indonesia, while the OJK will pay the differences if the remuneration set by the OJK is more than what's been paid by Bank Indonesia.

4. Grants

Grants was regulated under the Bank Indonesia's Board of Governors Decree Number 14/11/PDG/2012 dated June 7, 2012 on Management of Foreign Borrowings and Grants and Circular Number 14/37/INTERN dated September 27, 2012 on Bank Indonesia's Foreign Grants Guidance.

Grants which were managed by Bank Indonesia in 2012 were as follows:

- a. *Implementation of Financial Identity Project to Promote Financial Inclusion in Indonesia project from Alliance for Financial Inclusion (AFI) or Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH amounted to EUR460,000.00, of which EUR420,000.00 has been disbursed and the realization was at EUR314,471.39 and the balance at EUR105,528.61 was in refund process to GIZ. The grant has been completed in November 2012.*
- b. *The Development of Branchless Banking (Mobile Banking) Regulation Assistance from International Finance Corporation (IFC). Bank Indonesia received a consultation expertise amounted to USD245,250.00 and the project has been completed in June 2012.*
- c. *Capacity Development for Supporting Industry Development Technical Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) in the form of Credit Guarantee System amounted to JPY85,662 which has been completed in April 2012.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

5. *Letter of Consent* kepada IMF

Pada saat dilakukan International Monetary Fund (IMF) 14th *General Review of Quotas* pada tahun 2010, negara-negara anggota IMF menyepakati untuk meningkatkan kuota IMF sebesar 100%.

Adanya kenaikan kuota tersebut menyebabkan kuota Indonesia, sebagai salah satu anggota IMF, akan meningkat sebesar SDR2,569 juta menjadi SDR4,648 juta dan *Quota share* Indonesia akan meningkat menjadi 0,975%. Peningkatan kuota hasil IMF 14th *General Review of Quotas* akan berlaku efektif apabila:

- (i) Negara-negara anggota yang memiliki setidaknya 70% pangsa kuota telah menyampaikan persetujuan (*consent*) kenaikan kuota kepada IMF,
- (ii) Negara anggota yang mewakili setidaknya 85% hak suara telah meratifikasi perubahan (*amendment*) *Article of Agreement* IMF tentang *Board Reform*. Negara anggota diminta segera menyampaikan persetujuan kenaikan kuota dan meratifikasi perubahan *Article of Agreement* IMF tentang *Board Reform*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan mengirimkan Surat kepada Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor Surat S-871/MK.011/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Persetujuan Pemerintah atas kenaikan kuota IMF dalam rangka 14th *General Review of Quotas* yang berisi antara lain atas nama Pemerintah RI, Menteri Keuangan menyetujui kenaikan Kuota IMF dan mengingatkan Gubernur Bank Indonesia adalah Governor di IMF untuk Indonesia dapat mengirimkan *letter of consent* kepada IMF. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, pada tanggal 12 April 2012 Gubernur Bank Indonesia mengirimkan *letter of consent* kepada IMF yang merupakan salah satu syarat penambahan kuota Indonesia di IMF.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

5. *Letter of Consent* to IMF

In the IMF 14th General Review of Quotas of 2010, it has been agreed by the IMF member countries that the IMF quota was to be increased by 100%. Such increases caused the quota for Indonesia as the member of the IMF has been increased by SDR2,569 million to become SDR4,648 million. Quota share of Indonesia was increased to 0.975%. The increase of quota as per IMF 14th General Review of Quotas to be in effect when:

- (i) The member countries with at least 70% of quota share submit consent for the increase of quota to the IMF,*
- (ii) The member countries with at least 85% of vote right ratify the amendment of IMF Article of Agreement concerning Board Reform. The member countries to be requested to submit approvals of quota increase and ratify the amendment of IMF Article of Agreement concerning Board Reform.*

In respect with this, the Minister of Finance's letter Number S-871/MK.011/2011 dated December 28, 2011 was submitted to the Governor of Bank Indonesia concerning the Government's approval on the IMF quota increase in the frame of 14th General Review of Quotas with, among other things, consisted of the approval from the Minister of Finance representing the Government of the Republic of Indonesia on the IMF quota increase and bearing in mind that the Governor of Bank Indonesia is a Governor in IMF for Indonesia can also submit the letter of consent to the IMF. As a follow up of the above letter, in April 12, 2012 the Governor of Bank Indonesia submitted the letter of consent to the IMF as one of the requirements for Indonesia's quota increase in the IMF.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

6. Penyelesaian Aset Eks BPPN

Dalam rangka penyelesaian aset eks bank-bank yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Pemerintah, saat ini Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia sedang melakukan pembahasan atas dokumen yang ada di Bank Indonesia.

6. Ex BPPN Assets Resolution

In the frame of assets resolution of ex Banks Take Over from BBPN to the Government, at present the Ministry of Finance and Bank Indonesia are in discussion on the documents which are in Bank Indonesia.

E. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**E. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES****1. Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans)**

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, JICA, dan ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

1. Two Step Loans

Two Step Loans (TSL) are loans from financial foreign institutions such as the World Bank, Japan Bank for International Cooperation (JICA) and the Asian Development Bank (ADB) to the Government of the Republic of Indonesia to be channeled to banks through Bank Indonesia. The role of Bank Indonesia in these credit schemes is as the account holder of the Government, to distribute the loans and to collect payments from the national banks. Thus, these national banks bear the credit risk and distribute the loans to qualified borrowers.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini, oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

The letter of the Minister of Finance S-2147/LK/2000 dated May 16, 2000 states that Bank Indonesia only acts as the executing agent of these schemes and therefore bears no credit risk.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskan kepada Bank Bukopin.

The borrower in a TSL is the Government of Republic of Indonesia, except for the borrower of loans from EXIM Taiwan, which is Bank Indonesia, with the loan in turn being channeled to Bank Bukopin.

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2012 setara dengan Rp644.117 juta.

TSL are distributed to recipient banks in Rupiah, USD, and EUR with the balance as at December 31, 2012 of IDR644,117 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Di samping itu, terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar surat kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per 31 Desember 2012 setara dengan Rp271.006 juta.

Saldo pinjaman masing-masing skim tersebut diatas merupakan sisa saldo penerusan pinjaman sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan penatausahaannya tidak dicatat dalam Neraca Bank Indonesia namun dicatat pada rekening *off balance sheet* Bank Indonesia.

2. Transaksi Valas

Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah komitmen surat-surat berharga, deposito, dan transaksi forex Bank Indonesia setara dengan Rp14.780.638 juta.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK)

Bank Indonesia atas dasar Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang "Perlindungan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia" telah memberikan perlindungan hukum kepada tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia terkait dengan kasus BLBI. Selanjutnya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 10 Juni 2005, tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

There are also Governments claims against State Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara – BUMN)/Local Government-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah – BUMD) where the Subsidiary Loan Agreement (SLA) was signed by Bank Indonesia based on authorization from the Minister of Finance for the purpose of project aid. The funds originated from Foreign Exchange Loans (FEL) and Investment Fund Accounts (Rekening Dana Investasi – RDI) with the outstanding as at December 31, 2012 of IDR271,006 million.

The loan balances for each of the above schemes represents the balances which were channeled prior to the entry into effect of the Bank Indonesia Act Number 23 of 1999. Their administration is not recorded on the Bank Indonesia Balance Sheet but rather on Bank Indonesia Off-Balance Sheet Account.

2. Foreign Currencies Transactions

As at December 31, 2012, commitment receivables and commitment payables of marketable securities, time deposits, and forex transaction of Bank Indonesia were equal to IDR14,780,638 million.

3. Legal Protection for Persons Performing Official Duties (PTK)

In accordance with the Board of Governors Regulation (PDG) Number 4/13/PDG/2002 dated October 22, 2002 concerning "Bank Indonesia Legal Protection for Persons Performing Official Duties", Bank Indonesia provides legal protection to three ex- members of Bank Indonesia's Board of Governors in connection with the Bank Indonesia's Liquidity Assistance (BLBI) case. With the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated June 10, 2005, and the said three ex members of the Board of Governors were found guilty.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Sejalan dengan PDG Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 Juni 2005 telah menyetujui agar seluruh biaya penanganan perkara yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk dikembalikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya dalam RDG tanggal 11 April 2006 telah disetujui secara prinsip bagi tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan penundaan kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara sampai adanya putusan PK.

Upaya hukum PK dimaksud hingga saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut mengajukan permohonan penundaan pengajuan upaya hukum PK, terakhir s.d. akhir bulan Desember 2013. Permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi dan kondisi Bank Indonesia saat ini dirasakan belum mendukung upaya hukum PK dimaksud.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (*emergency measures*) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Based on PDG Number 4/13/PDG/2002 dated October 22, 2002, Bank Indonesia's Board of Governors at the meeting dated June 20, 2005, resolved that all of the costs involved in the handling of the case on behalf of the three former members of Bank Indonesia's Board of Governors must be returned. Furthermore, the Board of Governors at the meeting dated April 11, 2006 agreed in principle that the three ex members of Bank Indonesia's Board of Governors seek a Final Review (Peninjauan Kembali - PK) of their case, and suspended the obligation to return all court expenses until the process of Final Review had been completed.

Until now, the process of Final Review has not been completed as the three ex members of Bank Indonesia's Board of Governors sought a suspension of the Final Review process until, at the latest, the end of December 2013. Their grounds for doing so were that the circumstances and condition of Bank Indonesia at present were not conducive to the Final Review.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Since October 6, 2008, emergency measures have been applied to Indover Bank due to a shortage of liquidity. On December 1, 2008, Indover Bank was declared bankrupt by the Amsterdam Court and its status was being liquidated in the Netherlands. The reason for Indover Bank's liquidation was its negative equity and a lack of additional capital that could be expected to cover the negative equity, by way of additional capital from Bank Indonesia as the sole shareholder of Indover Bank or from other investors.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Amsterdam Belanda.

Per 31 Desember 2012 saat ini, masih terdapat *dispute* antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditur terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Dalam perkembangannya, sebagaimana yang disampaikan Stibbe dalam *Fourteenth Public Liquidation Report* tanggal 31 Januari 2013 untuk periode pelaporan tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 2012, proses penyelesaian *dispute* tersebut masih berlangsung di Pengadilan Amsterdam.

5. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2012, Bank Indonesia menangani lima perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam. Selain itu, Bank Indonesia juga

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

With the declaration of bankruptcy of Indover Bank by the Amsterdam Court, Indover Bank was placed under the control and supervision of Trustees appointed by the Amsterdam Court, Netherlands.

As at December 31, 2012 there is still a dispute outstanding between Bank Indonesia and the Trustees concerning the right and liabilities of Bank Indonesia as the sole shareholder and the creditors in the liquidation of Indover Bank. In March 2010, Bank Indonesia as a creditor filed a statement of claim to its time and demand deposits with Indover Bank to the Amsterdam Court. Based on that claim, on April 2010 the trustees filed a statement of counterclaim to the Amsterdam Court, arguing that Bank Indonesia as the sole shareholder of Indover Bank must bear the deficit in Indover Bank and set off Bank Indonesia's claims against Indover Bank. In this respect, Bank Indonesia is of the opinion that based on company law, Bank Indonesia's responsibility as the sole shareholder of Indover Bank is limited to Bank Indonesia' equity in Indover Bank.

In the latest development as reported by Stibbe in Fourteenth Public Liquidation Report dated January 31, 2013 for reporting period of October 1 to December 31, 2012, the process of resolving the dispute is still underway at the Amsterdam Court.

5. Legal Matters

As at January 1 to December 31, 2012, Bank Indonesia was dealing with 5 overseas legal cases related to the Indover Bank bankruptcy settlement in the Netherlands at Amsterdam District Court and 55 domestic cases consisting of 52 civil cases, and

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

menangani 55 (lima puluh lima) perkara di dalam negeri, yang terdiri dari perkara Perdata sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara, dan perkara Tata Usaha Negara sebanyak tiga perkara. Selama Tahun 2012, terdapat 45 (empat puluh lima) perkara yang telah diputus oleh pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka dari 52 (lima puluh dua) perkara perdata yang ditangani dapat dirinci berdasarkan sektornya sebagai berikut:

- a. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Perbankan sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara (mengenai Fungsi Pengawasan Bank, Sistem Informasi Debitur, dan proses Likuidasi Bank).
- b. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Sistem Pembayaran sebanyak lima perkara terkait Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), yaitu sengketa antara nasabah dengan bank, dan Bank Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut karena Bank Indonesia adalah sebagai otoritas perbankan dan sistem pembayaran.
- c. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Manajemen Intern sebanyak tiga perkara, yaitu terkait dengan kepemilikan hak atas tanah (aset Bank Indonesia) dan kelogistikan.

Sementara tiga perkara Tata Usaha Negara terkait dengan hasil proses *Fit and Proper Test* Pengurus Bank.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

3 (three) administrative law cases. During the year 2012, 45 cases have been decided by the courts.

If related with Bank Indonesia's duties, the 52 civil cases may be classified as follows:

- a. *44 civil actions related to the duties of Bank Indonesia in the banking sector (bank supervision, debtor, information system, and bank liquidation process).*
- b. *5 cases related to the duties of Bank Indonesia in the Payment System sector. The cases concern Card-Based Payment System (APMK) and involve disputes between banks and their customers, with Bank Indonesia being joined as a defendant due to its duties as the payment system holder and banking regulator.*
- c. *3 cases related to the duties of Bank Indonesia in the Internal Management sector. The cases involve disputes over land ownership (Bank Indonesia assets) and logistic matters.*

The 3 administrative law cases related with the outcomes of Fit and Proper Test for bank executives.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

6. Aset Bank Indonesia yang Dalam Proses Penyelesaian

a. Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992. Adapun putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta
Sesuai keputusan MARI tersebut ditetapkan bahwa terdakwa Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat harus membayar uang pengganti kepada negara c.q. Bank Indonesia sebesar Rp85.000 juta.

Dalam amar putusan MARI tidak ada klausula denda apabila uang pengganti tidak dibayar dan tidak ada batas waktu pembayaran uang pengganti dimaksud. Eksekusi putusan pengadilan tersebut merupakan kewenangan pihak Kejaksaan, sedangkan Bank Indonesia hanya menerima penyerahan uang pengganti hasil eksekusi dari Kejaksaan.

Sejak putusan MARI tanggal 21 Maret 1992 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga April 2011, Bank Indonesia belum menerima hasil eksekusi uang pengganti. Bank Indonesia telah mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 12/193/DHK tanggal 24 Mei 2010 dan Nomor 12/400/DHK tanggal 6 Oktober 2010 yang isinya menanyakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

6. Safeguarding Bank Indonesia's Assets

a. Bank Indonesia's Assets Secured by Judicial Decision

In the corruption case involving convicted defendant Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has handed down Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992 with the following rules:

- 1) *Execution of Payment of Compensation amounted to IDR85,000 million.
The Supreme Court stated that the defendant Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat should pay compensation to the Republic of Indonesia, in this case Bank Indonesia, in the amount of IDR85,000 million.*

The court order, however, does not impose penalties if compensation is not paid and sets no time limit for the payment of compensation. Execution of the decisions the responsibility of the Prosecution Service, while Bank Indonesia only receives the compensation funds from the execution by the Execution Service.

Since the decision of the Supreme Court on March 21, 1992 which has had a permanent legal force since April 2011, Bank Indonesia has not received the proceeds of the execution. Bank Indonesia has submitted letters Number 12/193/DHK dated May 24, 2010 and Number 12/400/DHK dated October 6, 2010 to the head of West Jakarta District Prosecution Office, asking the compensation order to be enforced.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dengan surat Nomor B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010, menyatakan bahwa terkait eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sejumlah Rp1.384 juta. Pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp83.616 juta dari putusan uang pengganti yang ditetapkan MARI.

Melalui surat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada Direktur UKPA Nomor B-2661/O.1.12/Ft1/05/2011 tanggal 27 Mei 2011, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menginformasikan bahwa hasil eksekusi atas aset terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat sebesar Rp4.263 juta telah disetor ke Kas Negara.

Melalui surat Bank Indonesia Nomor 13/4/DpG/UKPA tanggal 30 Desember 2011 kepada Dirjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia meminta agar hasil eksekusi sebesar Rp4.263 juta yang merupakan hak Bank Indonesia disetorkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan rapat di Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Januari 2012 yang dihadiri Kementerian Keuangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Bank Indonesia serta surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-910/PB/2012 tanggal 27 Januari 2012,

The Head of West Jakarta District Prosecution Office through the letter Number B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 dated October 20, 2010, stated that in connection with the payment of compensation of IDR85,000 million in the corruption case of the convicted Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, the convicted defendant Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat has made cash payments into the State Cash Account amounted to IDR1,384 million, leaving a shortfall of IDR83,616 million with respect of the compensation the Supreme Court ordered to be paid.

The Head of West Jakarta District Prosecution Office through the letter to the Director of UKPA Number B-2661/O.1.12/Ft1/05/2011 dated May 27, 2011, informed Bank Indonesia that IDR4,263 million had been raised from execution against the assets of the convicted Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, and the funds had been paid to the State Cash Account.

Through the Letter of Bank Indonesia Number 13/4/DpG/UKPA dated December 30, 2011 to the Director General of State Treasury at the Ministry of Finance, Bank Indonesia requested that the above mentioned of IDR4,263 million to which Bank Indonesia is entitled, be paid over to Bank Indonesia.

Following a meeting at the Ministry of Finance dated January 16, 2012 which were attended by the Minister of Finance, East Jakarta District Prosecutor, and Bank Indonesia's representatives, and based on the letter of the Minister of Finance Number S-

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

diinformasikan bahwa uang pengganti atas kasus Lee Darmawan yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat dikembalikan kepada pihak yang menderita kerugian (Bank Indonesia). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melalui surat Nomor 14/53/DPA tanggal 1 Mei 2012, Nomor 14/122/DPA tanggal 4 Oktober 2012 dan Nomor 14/136/DPA tanggal 23 November 2012 telah mengajukan permohonan pengembalian atas uang pengganti tersebut kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan.

- 2) Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah dan/atau Bangunan
Sesuai keputusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk Negara c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan mencapai ±1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ±1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya. Aset rampasan tersebut tersebar di beberapa lokasi, dan pada posisi 31 Desember 2012, Bank Indonesia telah melakukan penjualan aset rampasan sebanyak 68 bidang senilai Rp4.768 juta.

910/PBI/2012 dated January 27, 2012, it was informed that the funds which had been paid into the State Cash Account by the West Jakarta District Prosecution Office should be handed over to the party which suffered of loss (Bank Indonesia). In respect to this matter, Bank Indonesia with its letters Number 14/53/DPA dated May 1 2012, Number 14/122/DPA dated October 4, 2012 and Number 14/136/DPA dated November 23, 2012 had submitted a request for the handover of the funds to the West Jakarta Prosecution Office but up to present there are no responses on this matter.

- 2) Confiscation of Evidence in the Form of Land and/or Buildings
Supreme Court Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992 ordered that the evidence in the form of lands and/or buildings be forfeit to the state, in this case. The land extends to approximately 1,193 Ha. Further, on March 30, 1993, the West Jakarta Prosecution Office handed over some of the seized evidence to Bank Indonesia in the form of land documents for approximately 1,001 Ha. At present, the process of resolving problems related to these assets is still underway in collaboration with Tridaya Foundation. The said assets are located in a number of different places and as at December 31, 2012, Bank Indonesia had sold 68 lots of the assets amounted to IDR4,768 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

b. Aset Bank Indonesia yang Masih Perlu Diselesaikan dengan Pihak Lain

Per 31 Desember 2012, Bank Indonesia masih memiliki tiga aset yang perlu diselesaikan.

b. Bank Indonesia Assets Under Resolution With Third Parties

As at December 31, 2012, Bank Indonesia still has 3 assets to be resolved.

7. Tagihan Kepada PT Bank IFI

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia mencabut izin usaha PT Bank IFI terhitung sejak tanggal 17 April 2009. Bank Indonesia mempunyai tagihan atas dana kelolaan PT Ustraindo yang ada di PT Bank IFI sebesar Rp50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp38.850 juta dan bunga sebesar Rp11.967 juta. Hingga saat ini Bank Indonesia masih mengupayakan pengembalian atas tagihan dimaksud.

7. Claims on PT Bank IFI

Through Governor of Bank Indonesia's Decree Number 11/19/KEP.GBI/2009 dated April 17, 2009, Bank Indonesia has revoked the license of PT Bank IFI effective on April 17, 2009. Bank Indonesia has a claims on funds managed by PT Ustraindo from PT Bank IFI amounted to IDR50,817 million consisting of principal of IDR38,850 million and interest of IDR11,967 million. Up to present Bank Indonesia continues with the efforts to acquire the said claims.

8. Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD)

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

8. FSD Interest Claims

In 1998/1999, Bank Indonesia provided Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) to banks experiencing liquidity problems at the time of the monetary crisis in Indonesia in 1998. The said assistance amounted to IDR144,536,094 million.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

As a follow up to the Joint Agreement between Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the BLBI position as at January 29, 1999 was transferred from Bank Indonesia to the Government through Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional – BPPN) in the amount of IDR144,536,094 million based on the Deed of Surrender and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 22, 1999 For its part, the Government issued Treasury Bond SU-001/MK/1998 amounted to IDR80,000,000 million and SU-003/MK/1999 amounted IDR64,536,094 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah q.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk didalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) yaitu PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

The BLBI of IDR144,536,094 million that was transferred to the Government through BPPN included FSD amounted to IDR54,460,896 million. This figure included FSD ex Bank Takeovers (BTO) of PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk. amounted to IDR20,129,741 million. In respect of this FSD of IDR20,129,741 million there is an accrued FSD interest of IDR5,322,248 million with the details being as follows:

Uraian	Pokok FSD FSD Principal	Bunga FSD FSD Interest	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
- PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861	- PT Bank Danamon Tbk.
- PT Bank PDFCI Tbk.	1.995.000	534.959	- PT Bank PDFCI Tbk.
- PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428	- PT Bank Tiara Asia Tbk.
	20.129.741	5.322.248	

Atas tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah karena tidak tercatat dalam pembukuan on balance sheet Bank Indonesia per tanggal 29 Januari 1999.

The claims in respect of the interest of IDR5,322,248 million were not transferred to the Government since they were not recorded on the Bank Indonesia balance sheet as at January 29, 1999.

Sesuai Pasal 6 Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999 dinyatakan bahwa pembayaran oleh Pemerintah atas tagihan BLBI yang timbul setelah tanggal 29 Januari 1999 masih dimungkinkan dilaksanakan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah. Sehubungan dengan itu, pada bulan Mei 1999 tagihan bunga FSD kepada eks. BTO dibukukan oleh Bank Indonesia sebagai "Tagihan kepada BPPN".

Article 6 of the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999 stated that payment by the Government of BLBI claims arising after January 29, 1999 could still be effected based on the submission of claims by Bank Indonesia to the Government. In this regard, In May 1999 the FSD interest claims of ex BTO were recorded by Bank Indonesia as "Claims on BPPN".

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

a. Penyajian tagihan bunga FSD pada LKTBI

1) Pada LKTBI Tahun 1999-2002 (*audited*), tagihan Bunga FSD disajikan sebagai bagian dari pos "Tagihan Kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya". Dalam CaLK LKTBI Tahun 2002 (*audited*) dijelaskan bahwa:

- a) Tambahan BLBI berupa tagihan kepada BPPN sebesar Rp9.125.397 juta dan tagihan karena saldo debit giro BBO/BBKU sebesar Rp5.324.396 juta atau seluruhnya sebesar Rp14.449.793 juta merupakan tambahan BLBI s.d. tanggal 13 Maret 1999 yang telah dijamin dengan Surat Utang Pemerintah Nomor SU-004/MK/1999, namun pengalihan secara *cessie* kepada Pemerintah atas tambahan BLBI tersebut belum dilaksanakan. Bank Indonesia, terakhir dengan surat Nomor 3/3/DG/BK tanggal 15 Februari 2001 menyatakan bahwa seluruh persyaratan pengalihan BLBI telah terpenuhi, yaitu Bank Indonesia telah melakukan penagihan dan Departemen Keuangan telah menunjuk BPPN sebagai kuasa Pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan isi Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa atas pengambilalihan hak tagih (*cessie*) akan dilakukan verifikasi yang disepakati kedua belah pihak. Demikian pula dengan akta *cessie* masing-masing bank yang menyatakan bahwa kegiatan verifikasi dimaksudkan dalam rangka kepastian hak tagih (*cessie*) disamping juga untuk kepastian hak jaminan, apabila ada.

a. Presentation of FSD Interests to the Bank Indonesia Annual Financial Statements

1) In the 1999-2002 audited Bank Indonesia Financial Statements, the FSD interest claims were presented as part of "Other Rupiah Claims of the Government". Yet in the 2002 audited Bank Indonesia Notes to the Financial Statements it was explained as follows:

- a) Additional BLBI in the form of claims on BPPN amounted to IDR9,125,397 million and claims of IDR5,324,396 million arising of BBO/BBKU demand deposit debit balance, or a total of IDR14,449,793 million represents the additional BLBI up to March 13, 1999 which has been guaranteed by Treasury Bond Number SU-004/MK/1999, yet the transfer of the additional BLBI by way of *cessie* to the Government has not been carried out. Most recently, Bank Indonesia with the letter Number 3/3/DG/BK dated February 15, 2001 stated that all of the requirements for the transfer of BLBI had been fulfilled, that is, Bank Indonesia had submitted a claim and the Ministry of Finance had appointed the BPPN as the Government representative. This is in accordance with Article 2(3) of the Joint Agreement dated February 6, 1999 which stated that verification of the *cessie* arrangements will be conducted as agreed by the parties. Thus, through the Deed of *Cessie*, each bank stated that verification was intended to ensure certainty of rights under the *cessie* and verify guarantees, if any.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

- b) Menteri Keuangan dengan Surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa pengalihan secara *cessie* atas BLBI BBKU sebesar Rp14,4 triliun oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi atas jumlah BLBI dan hal-hal lain. Adapun mengenai kewajiban atas bunga Fasilitas Saldo Debet sebesar Rp13,9 triliun masih menunggu hasil verifikasi atas jumlah BLBI sebesar Rp14,4 triliun.
- 2) Pada LKTBI Tahun 2003 (*audited*), terdapat pengalihan penyajian atas tagihan Bunga FSD yang semula disajikan sebagai bagian dari pos "Tagihan Kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya" menjadi bagian dari pos "Tagihan Kepada Bank dalam Rupiah". Hal ini dikarenakan adanya penyelesaian permasalahan tambahan BLBI antara Bank Indonesia dan Pemerintah serta pembubaran BPPN (sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 BPPN telah dibubarkan oleh Pemerintah karena masa kerjanya telah selesai).
- 3) Dalam LKTBI Tahun 2010 (*unaudited*), Bank Indonesia melakukan reklasifikasi penyajian tagihan bunga FSD dari semula sebagai bagian dari pos "Tagihan kepada Bank" menjadi bagian dari pos "Tagihan kepada Pemerintah". Hal ini sejalan dengan surat-surat yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BPPN dan Pemerintah, terakhir surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010. Namun demikian surat-surat Bank Indonesia tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Pemerintah.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- b) *By virtue of Letter Number S-174/MK.06/2001 dated April 3, 2001 the Minister of Finance stated that the assignment by the way of *cessie* of BLBI BBKU amounted to IDR14,4 trillion by Bank Indonesia could be carried out after verification of the BLBI amount and other matters had been conducted. However, as regards FSD interest of IDR13,9 trillion the process still awaiting to the verification results on BLBI amounted to IDR14,4 trillion.*
- 2) *In the Audited Bank Indonesia Financial Statements for 2003, the FSD interest was reclassified from "Other Rupiah Claims on Government" to Rupiah Claims on Banks". This was due to the fact that the problem of additional BLBI between Bank Indonesia and the Government had been resolved, and the dissolution of the BPPN (in accordance with Presidential Decree Number 15 of 2004 dated February 27, 2004, BPPN has been dissolved by the Government as its term of existence had come to an end).*
- 3) *In the 2010 unaudited Bank Indonesia Financial Statements, the presentation of FSD interest was the reclassified again from "Claims of Banks" to "Claims on the Government". This was in line with the letters conveyed by Bank Indonesia to the BPPN and the Government, most recently to the Minister of Finance by letter Number 12/1/GBI/DKBU dated April 30, 2010. Yet, no response was forthcoming from the Government to these letters.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- 4) Pada LKTBI Tahun 2011 Bank Indonesia menyajikan tagihan bunga FSD BTO tersebut dalam pos Aktiva Lain-Lain dan telah membentuk cadangan penyisihan aktiva yang memadai.

- 4) *In the 2011 Bank Indonesia Financial Statements, FSD BTO has been presented in "Other Assets" item and a sufficient provision has been established.*

b. Kronologis penyelesaian tagihan bunga FSD

- 1) Sesuai lampiran surat Menkeu Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999, bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah namun dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.
- 2) BPPN, dengan surat Nomor PB-443/BPPN/0799 tanggal 15 Juli 1999 tentang Pembebanan Bunga FSD menjawab surat Bank Indonesia Nomor 1/121/UK, Nomor 1/122/UK, Nomor 1/123/UK dan Nomor 1/24/UK tertanggal 6 Juli 1999, yang masing-masing ditujukan kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank PDFCI, Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank Danamon Tbk. tentang Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Dalam surat BPPN butir 3-5 menyatakan bahwa:
- a) "... beban bunga FSD PT Bank PDFCI Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk. dan PT Bank Danamon Tbk., yang dalam surat Saudara dinyatakan timbul selama Agustus 1998 s.d. Januari 1999, telah menjadi hak Pemerintah q.q. BPPN"
- b) Atas beban bunga tersebut, selanjutnya Pemerintah q.q. BPPN akan memperhitungkan dengan bank-bank tersebut secara terpisah.

b. Chronology of FSD Interest Claims

- 1) *In accordance with the attachment to Minister of Finance Letter Number SR-176/MK.01/1999 dated May 31, 1999, FSD interest was included in the interim bank liabilities amount that could be financed by Government guarantee, subject to the provision that payment implementation would be further discussed.*
- 2) *The BPPN through its letter Number PB-443/BPPN/0799 dated July 15, 1999 concerning FSD interest, responded the Bank Indonesia Letters Number 1/121/UK, Number 1/122/UK, Number 1/123/UK and Number 1/24/UK dated July 6, 1999, which were addressed respectively to PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank PDFCI, Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., and PT Bank Danamon Tbk. Concerning FSD Interest. In the said BPPN letter, items 3-5 stated that:*
- a) *"... the FSD interest in respect of PT Bank PDFCI Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk. and PT Bank Danamon Tbk., which in your letter was stated to have accrued between August 1998 to January 1999, has become the settlement of the Government through the BPPN"*
- b) *In respect of the said interest, the Government, in this case the BPPN, will calculate it separately with each of the banks involved.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

- c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan rekening atas beban bunga FSD bank-bank dimaksud kecuali terhadap PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).
- 3) Bank Indonesia dengan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 3/1/DGS/BKr tanggal 19 Februari 2001 meminta agar Pemerintah menyelesaikan kewajiban bunga FSD mengingat pokok FSD telah diakui dan menjadi beban Pemerintah.
- 4) Menanggapi surat Bank Indonesia tersebut, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa penyelesaian atas kewajiban bunga FSD menunggu hasil verifikasi atas jumlah tambahan BLBI sebesar Rp14,45 triliun.
- 5) Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia dengan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 3/6/DpG/DHk/Rahasia tanggal 30 April 2001 berpendapat bahwa penyelesaian bunga FSD tidak perlu menunggu pendapat Komisi IX DPR RI atas penyelesaian BLBI sebesar Rp144,5 triliun.
- 6) Bank Indonesia dengan surat kepada BPPN Nomor 6/32/BKr tanggal 6 Februari 2004 menyatakan bahwa mengingat BPPN telah memperhitungkan tagihan bunga FSD PT BDI dalam program rekapitalisasi, maka diharapkan agar BPPN membayar kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia.

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- c) *In the light of the above, Bank Indonesia should not debit the FSD interest for the said banks, save in the case of PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).*
- 3) *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 3/1/DGS/BKr dated February 19, 2001 requested that the Government resolve the matter of FSD interest obligations bearing in mind that the FSD principal had been recognized and taken over by the Government.*
- 4) *In response to the Bank Indonesia's letter, the Minister of Finance through Letter Number S-174/IMK.06/2001 dated April 3, 2001 stated that the settlement of FSD interest liabilities would have to wait verification of the additional BLBI of IDR14.45 trillion.*
- 5) *In response to the said letter from Bank Indonesia, the Minister of Finance through Letter Number 3/6/DpG/DHk/Confidential dated April 30, 2001, expressed the view that the settlement of FSD interest did not need to await for the opinion of Commission IX of the House of Representatives on BLBI amounted to IDR 144.5 trillion.*
- 6) *Bank Indonesia in its letter to the BPPN Number 6/32/BKr dated February 6, 2004 stated that bearing in mind the BPPN had calculated the FSD interest claim in respect of PT BDI in the recapitulation program, Bank Indonesia hoped that the BPPN would pay the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

- 7) Bank Indonesia dengan surat kepada Presiden RI Nomor 6/1/GBI/DPIP dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6/2/GBI/DPIP masing-masing tanggal 24 Februari 2004 antara lain menginformasikan bahwa masih terdapat tagihan bunga FSD kepada bank-bank yang merger ke PT Bank Danamon Tbk. sebesar Rp5,32 triliun yang telah diperhitungkan oleh BPPN secara *set off* dengan obligasi rekapitalisasi, sehingga mengurangi obligasi rekapitalisasi yang diterima oleh PT Bank Danamon Tbk.
- 8) Bank Indonesia dengan surat kepada Deputi Ketua Keuangan, Audit dan Likuidasi BPPN Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 meminta agar BPPN membayar kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia, mengingat BPPN telah memperhitungkan kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. dalam program rekapitalisasi.
- 9) Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 6/4/GBI/BKr tanggal 12 Mei 2004 menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tugas BPPN dan mengingat kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. telah diperhitungkan dalam program rekapitalisasi, maka Bank Indonesia mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan tanggapan dan penjelasan atas kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia.
- 7) *Bank Indonesia in its letters to the President of the Republic of Indonesia Number 6/1/GBI/DPIP and to the Coordinating Minister for Economy Number 6/2/GBI/DPIP dated February 24, 2004, respectively, among other things, informed there were still outstanding FSD interest claims in respect to the banks which merged with PT Bank Danamon Tbk. amounted to IDR5.32 trillion which had been calculated by the BPPN as a set off against recapitalization bonds, so as to reduce the recapitalization bonds received by PT Bank Danamon Tbk.*
- 8) *Bank Indonesia in its letter to the BPPN's Deputy of Finance, Auditing and Liquidations Number 6/63/BKr dated March 10, 2004 asked that the BPPN pay the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk. to Bank Indonesia bearing in mind that BPPN had calculated the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk. in the recapitalization program.*
- 9) *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 6/4/GBI/BKr dated May 12, 2004 stated that in relation with the expiry of the BPPN's mandate and the fact that FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk. had already been calculated in the recapitalization program, Bank Indonesia hoped that the Government would give a response and clarification upon the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk. to Bank Indonesia.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

- 10) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 mencakup permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja. Namun demikian s.d. SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD.
- 11) Bank Indonesia dengan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 9/8/DpG/BKr tanggal 1 Agustus 2007 meminta penjelasan apakah tagihan bunga FSD eks. BTO dapat dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- 12) Bank Indonesia dengan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 10/15/DpG/DKBU tanggal 12 Desember 2008 meminta penjelasan apakah tagihan bunga FSD eks. BTO dapat dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- 13) Bank Indonesia dengan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010 meminta bantuan mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO.
- 14) Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 menyatakan bahwa mengingat dalam LKTBI tahun 2009, tagihan FSD dicatat sebagai tagihan kepada bank (dan bukan tagihan kepada Pemerintah), dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berikut penjelasannya yang tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, hingga laporan

- 10) *The Joint Decision of the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 7/23/KEP.GBI/2005 dated April 29, 2005 included the issue of FSD interest as part of the agenda to be discussed between the Government and Bank Indonesia through a Working Committee. Nevertheless, by the expiry of the Joint Decision on December 31, 2005, there had still been no resolution to the FSD interest issue.*
- 11) *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 9/8/DpG/BKr dated August 1, 2007 requested clarification as to whether the claim on FSD interest ex BTO be paid by the Government to Bank Indonesia.*
- 12) *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 10/15/DpG/DKBU dated December 12, 2008 requested confirmation as to whether its claim to FSD interest ex BTO would be paid by the Government to Bank Indonesia.*
- 13) *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 12/1/GBI/DKBU dated April 30, 2010 requested assistance with regards to the resolution of the FSD interest ex BTO issue.*
- 14) *With its letter Number S-228/MK.01/2011 dated May 5, 2011 the Minister of Finance stated that bearing in mind that in the Bank Indonesia Financial Statements for 2009, the FSD claims had been recorded as Claims on Banks rather than Claims on Government. Up to the 2009 Central Government's Annual Financial Statements and the Notes to the Financial Statements there had been no*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011

tahun 2009 tidak terdapat pengakuan terhadap tagihan dimaksud, maka bunga FSD kepada BTO seyogyanya dibebankan kepada Bank Indonesia dan bukan APBN.

15) Menanggapi surat Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan surat Nomor 14/1/GBI/DKBU tanggal 26 Maret 2012. Dalam surat tersebut Bank Indonesia menyatakan bahwa:

- a) Dalam LKTBI Tahun 2009 dan 2010 (*audited*) tagihan bunga FSD kepada eks. BTO memang disajikan sebagai "Tagihan kepada Bank" sesuai angka 2 surat Kementerian Keuangan Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011. Namun demikian, berdasarkan catatan atas LKTBI dimaksud dijelaskan bahwa tagihan bunga FSD kepada eks. BTO telah diperhitungkan oleh Pemerintah c.q. BPPN dalam proses rekapitalisasi eks. BTO tersebut.
- b) Dengan telah diperhitungkannya tagihan bunga FSD kepada eks. BTO dalam proses rekapitalisasi oleh Pemerintah c.q. BPPN dan berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung yang diserahkan oleh PT Bank Danamon Tbk., maka tagihan bunga FSD kepada eks. BTO yang semula "Tagihan kepada Bank" menjadi "Tagihan kepada Pemerintah".

Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif.

recognition of the claims so that the FSD interest should be borne by Bank Indonesia rather than the National Budget.

15) *In response to the said letter Number S-228/MK.01/2011 dated May 5, 2011, Bank Indonesia had submitted a letter Number 14/1/GBI/DKBU dated March 26, 2012 in which Bank Indonesia stated the followings:*

- a) *That it was true that the Bank Indonesia Financial Statements for 2009 and 2010 (audited) presented the FSD interest ex BTO claim as "Claims to Banks" as stated in point 2 of letter from the Minister of Finance Number S-228/MK.01/2011 dated May 5, 2011. However, in the Notes to the Financial Statements it was explained that the FSD interest claims had been included by the Government (through the BPPN) in the recapitalization bonds.*
- b) *With the inclusion of the FSD interest claims in the recapitalization process by the Government (through the BPPN) and based on a study of supporting documents provided by PT Bank Danamon Tbk., the FSD interest claim on the ex BTO had been reclassified as "Claims on Government" rather than "Claims on Banks".*

Bank Indonesia will continue to perform its duty to manage the FSD interest claims, including endeavoring to ensure their recovery, based on the consideration that these claims constitute assets requiring comprehensive resolution.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011

9. Kerjasama Ekonomi Keuangan Regional

Bank Indonesia menjalin kerjasama keuangan regional seperti *ASEAN Swap Arrangement (ASA)* dengan negara-negara ASEAN, *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* dengan negara ASEAN beserta Cina, Korea, dan Jepang (ASEAN+3) dan *Bilateral Swap Agreement (BSA)* antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan (BoJ). Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menyediakan likuiditas jangka pendek kepada negara yang mengalami masalah neraca pembayaran.

Penyediaan kebutuhan tersebut bersumber dari komitmen kontribusi negara anggota yang pengelolaan dan kepemilikannya berada di masing-masing bank sentral negara anggota. Dalam ketiga kerjasama tersebut, sampai dengan per 31 Desember 2012 belum terdapat permintaan fasilitas dari negara anggota untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas.

*Notes to Financial Statements
As at December 31, 2012 and 2011*

9. Regional Financial and Economic Cooperation

Bank Indonesia has made some regional financial cooperations such as ASEAN Swap Arrangement (ASA) with the ASEAN member countries, Chiang Mai Initiative Multi lateralization (CMIM) with ASEAN countries and also China, South Korea, and JAPAN (ASEAN+3), and Bilateral Swap Agreement (BSA) between Bank Indonesia and Bank of Japan. The objective of the cooperations is to provide short term liquidity to the countries undergoing balance of payments problem.

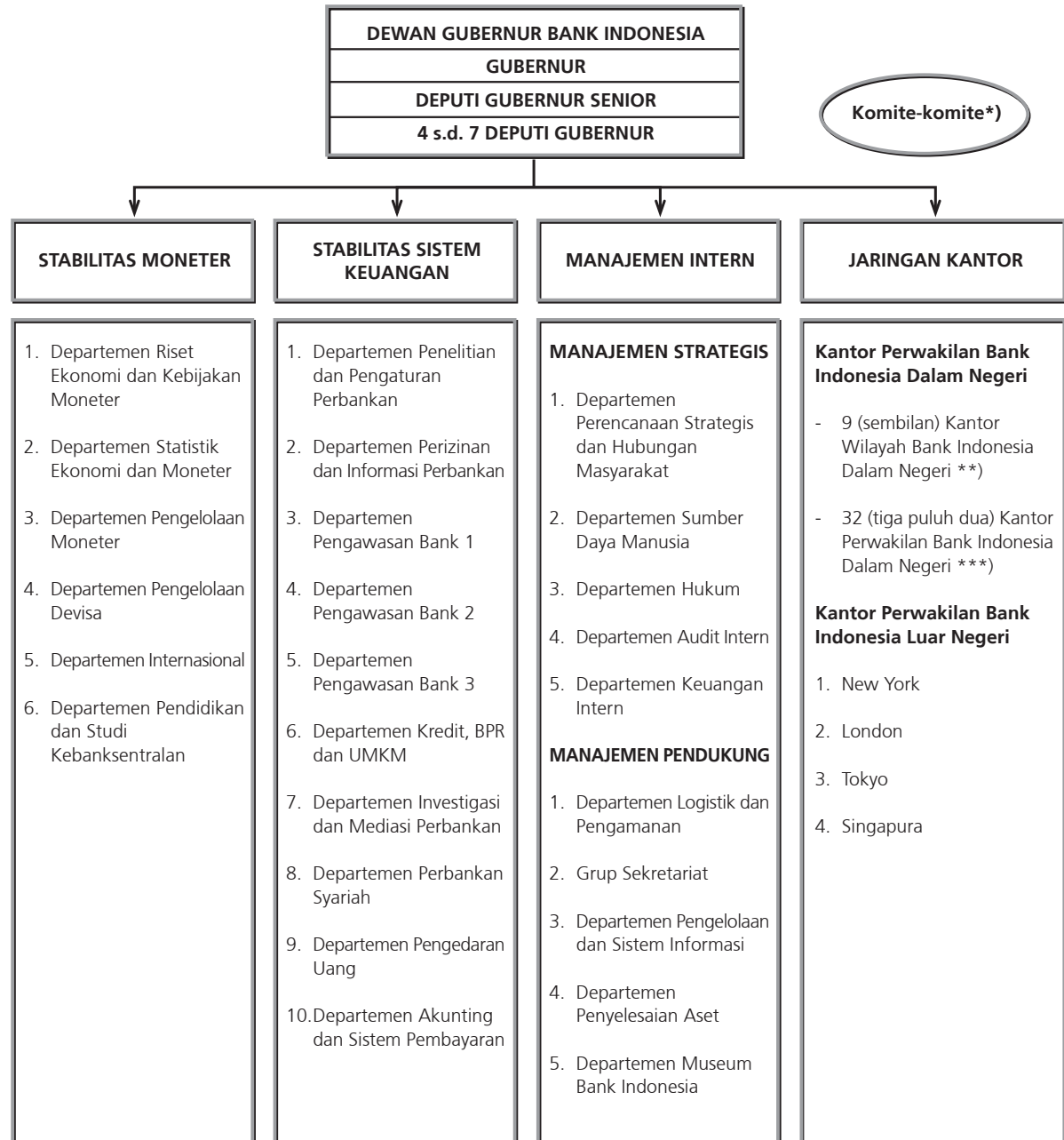
The provision of such needs is originated from the contribution commitments of the member countries. The ownership and management of the funds are in the central banks of member countries. In the above cooperations, as at December 31, 2012 there is no request of such facilities from the member countries.

LAMPIRAN

Appendixes



STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



***) KOMITE DI BANK INDONESIA**

1) Komite Kebijakan Moneter, 2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 3) Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, 4) Komite Internasional, 5) Komite Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK), 6) Komite Sumber Daya Manusia, 7) Komite Manajemen Krisis, 8) Komite Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

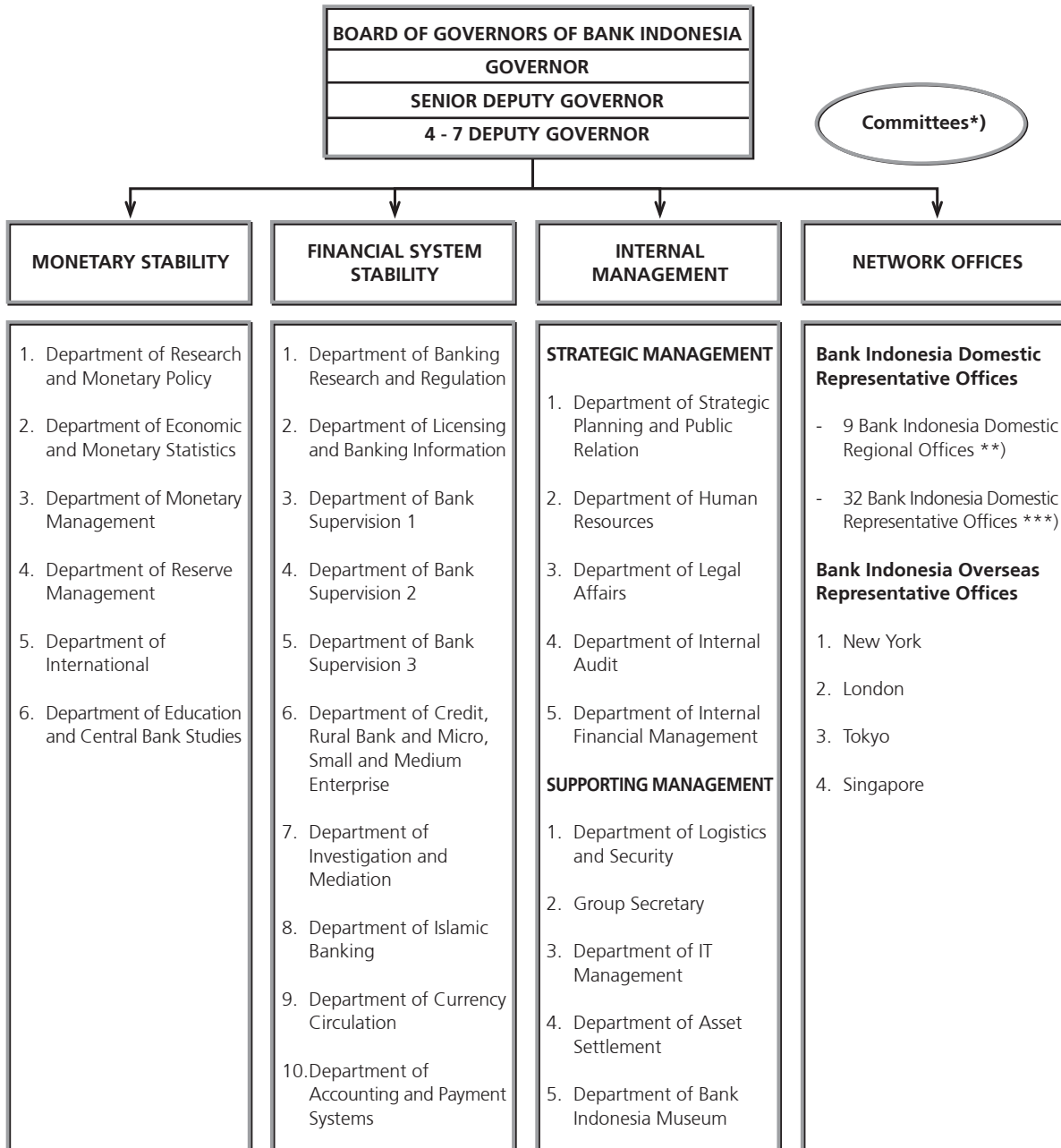
*****) 9 KANTOR WILAYAH BANK INDONESIA DALAM NEGERI**

1) Wilayah I (Sulawesi, Maluku dan Papua); 2) Wilayah II (Kalimantan); 3) Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara); 4) Wilayah IV (Jawa Timur); 5) Wilayah V (Jawa Tengah dan Yogyakarta); 6) Wilayah VI (Jawa Barat dan Banten); 7) Wilayah VII (Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung); 8) Wilayah VIII (Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi); 9) Wilayah IX (Sumatera Utara dan Aceh).

******) 32 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DALAM NEGERI**

1) Provinsi Maluku, 2) Provinsi Aceh, 3) Provinsi Lampung, 4) Provinsi Bengkulu, 5) Provinsi Gorontalo, 6) Provinsi Papua dan Papua Barat, 7) Provinsi Jambi, 8) Provinsi Sulawesi Tenggara, 9) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 11) Provinsi Sulawesi Utara, 12) Provinsi Kalimantan Tengah, 13) Provinsi Sulawesi Tengah, 14) Provinsi Riau, 15) Provinsi Kalimantan Barat, 16) Provinsi Kalimantan Timur, 17) Provinsi Banten, 18) Provinsi Maluku Utara, 19) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 20) Balikpapan, 21) Balikpapan, 21) Batam, 22) Cirebon, 23) Jember, 24) Kediri, 25) Lhokseumawe, 26) Malang, 27) Pematangsiantar 28) Purwokerto, 29) Sibolga, 30) Solo, 31) Tasikmalaya, 32) Tegal.

ORGANIZATION STRUCTURE OF BANK INDONESIA



***) BANK INDONESIA COMMITTEES**

1) Monetary Stability Committee, 2) Financial System Stability Committee, 3) Banking Regulation and Supervision Committee, 4) International Committee, 5) Budget Planning and Performance Management Committee (PAMK), 6) Human Resources Committee, 7) Crisis Management Committee, 8) Bank Indonesia Accounting Policy Committee.

*****) 9 DOMESTIC REGIONAL OFFICES BANK INDONESIA**

1) Regional I (Sulawesi, Maluku and Papua); 2) Regional II (Kalimantan); 3) Regional III (Bali and Nusa Tenggara); 4) Regional IV (East Java); 5) Regional V (Central Java and Yogyakarta); 6) Regional VI (West Java and Banten); 7) Regional VII (South Sumatera, Bangka Belitung Islands, Bengkulu and Lampung); 8) Regional VIII (West Sumatera, Riau, Riau Islands and Jambi); 9) Regional IX (North Sumatera and Aceh).

******) 32 BANK INDONESIA DOMESTIC REPRESENTATIVE OFFICES**

1) Maluku Province, 2) Aceh Province, 3) Lampung Province, 4) Bengkulu Province, 5) Gorontalo Province, 6) Papua and West Papua Province, 7) Jambi Province, 8) South East Sulawesi Province, 9) East Nusa Tenggara Province, 10) West Nusa Tenggara Province, 11) North Sulawesi Province, 12) Central Kalimantan Province, 13) Central Sulawesi Province, 14) Riau Province, 15) West Kalimantan Province, 16) East Kalimantan Province, 17) Banten Province, 18) North Maluku Province, 19) Yogyakarta Special Region Province, 20) Balikpapan, 21) Batam, 22) Cirebon, 23) Jember, 24) Kediri, 25) Lhokseumawe, 26) Malang, 27) Pematangsiantar 28) Purwokerto, 29) Sibolga, 30) Solo, 31) Tasikmalaya, 32) Tegal.

DAFTAR SINGKATAN

List of Abbreviations and Acronyms

ADB	: Asian Development Bank
AFI	: Alliance for Financial Inclusion
AJDF	: ASEAN Japan Development Fund for Indonesia
APMK	: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (<i>Card-Based Payment Equipment</i>)
AUD	: Australian Dollar
BBKU	: Bank Beku Kegiatan Usaha (<i>Suspended Bank Business Operations</i>)
BBO	: Bank Beku Operasi (<i>Operation-Suspended Bank</i>)
BI	: Bank Indonesia
BIS	: Bank for International Settlements
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Assistance</i>)
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia State Audit Board</i>)
BPM6	: Balance of Payment Manual 6
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (<i>Indonesia Banking Restructuring Agency</i>)
Bps	: basis point(s)
BTO	: Bank Take Over
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah (<i>Local Government-Owned Enterprise</i>)
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara (<i>State-Owned Enterprise</i>)
CAD	: Canadian Dollar
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan (<i>Notes to the Financial Statements</i>)
DAPENBI	: Dana Pensiun Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Pension Fund</i>)
DKBU	: Departemen Kredit, BPR, dan UMKM (<i>Credit, Rural Banks and Micro, Small and Medium Enterprise Department</i>)
DKP	: Dana Kesejahteraan Pegawai (<i>Employee Welfare Fund</i>)
DpG	: Deputy Gubernur (<i>Deputy Governor</i>)
DPK	: Dana Pihak Ketiga (<i>Third Party Deposits</i>)
DPM	: Departemen Pengelolaan Moneter (<i>Monetary Management Department</i>)
DPNP	: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (<i>Banking Research and Regulation Department</i>)
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia House of Representatives</i>)
EUR	: Euro
FASBIS	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>)
FPN	: Floating Principal Notes
FSD	: Fasilitas Saldo Debet (<i>Debit Balance Facility</i>)
GBP	: Great Britain Poundsterling
GWM	: Giro Wajib Minimum (<i>Minimum Reserve Requirement</i>)
HIPC	: Heavily Indebted Poor Countries
IAS	: International Accounting Standard
IBA	: Indover Bank Amsterdam
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
IILM	: International Islamic Liquidity Management
IFC	: International Finance Corporation

IMF	: International Monetary Fund
Indover Bank	: N.V. De Indonesische Overseeze Bank
IPBV	: Indo Plus Besloten Vennootschap
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja (<i>Social Security Workers</i>)
JIBOR	: Jakarta Interbank Offered Rate
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JPY	: Japanese Yen
Kakandepkop	: Kepala Kantor Departemen Koperasi (<i>Head of Department of Cooperatives Office</i>)
Kejari Jakbar	: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (<i>West Jakarta District Prosecution Office</i>)
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik (<i>Public Appraiser's Office</i>)
KLBI	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Credit</i>)
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan (<i>Minister of Finance Decree/Decision</i>)
KPMM	: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)
KPw DN	: Kantor Perwakilan Dalam Negeri (<i>Domestic Representative Office</i>)
KPw LN	: Kantor Perwakilan Luar Negeri (<i>Overseas Representative Office</i>)
KUT	: Kredit Usaha Tani (<i>Farm Credit Scheme</i>)
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan (<i>Audit Report</i>)
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia State Gazette</i>)
LIBOR	: London Inter-Bank Offered Rate
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (<i>Central Government Financial Statements</i>)
LKTBI	: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Statements</i>)
Ltd.	: Limited
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia Supreme Court</i>)
Menkeu	: Menteri Keuangan (<i>Minister of Finance</i>)
NCP	: Net Currency Position
NPL	: Non Performing Loan
N.V.	: Naamloze Vennootschap
NZD	: New Zealand Dollar
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (<i>Financial Service Authority</i>)
ON	: Obligasi Negara (<i>Treasury Bond</i>)
OPT	: Operasi Pasar Terbuka (<i>Open Market Operation</i>)
PAKBI	: Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines</i>)
PBI	: Peraturan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Regulation</i>)
PBSN	: Perkebunan Besar Swasta Nasional (<i>Major Domestic Private Sector Plantation</i>)
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur (<i>Board of Governors Regulation</i>)
PEMDA	: Pemerintah Daerah (<i>Regional Government</i>)
Persero	: Perusahaan Perseroan (<i>Limited Liability Company</i>)
Perum	: Perusahaan Umum (<i>Public Service Company</i>)
PIPEBI	: Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Employees Wives Association</i>)
PK	: Peninjauan Kembali (<i>Final Supreme Court Review</i>)
PKP	: Pengusaha Kena Pajak (<i>Taxable Enterprise</i>)
PPBI	: Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Pensioners' Association</i>)
PPh	: Pajak Penghasilan (<i>Income Tax</i>)
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai (<i>Value Added Tax</i>)
PRGF	: Poverty Reduction and Growth Facility (<i>Poverty Reduction and Growth Facilities</i>)

PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (<i>Statement of Financial Accounting Standards</i>)
PT	: Perseroan Terbatas (<i>Limited Liability Company</i>)
PT IFI	: PT Indonesia Finance and Investment
PTK	: Pelaksana Tugas Kedinasan (<i>Persons Performing Official Duties</i>)
RDG	: Rapat Dewan Gubernur (<i>Board of Governors' Meeting</i>)
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (<i>Final Plan of Farmer Group Need</i>)
Repo	: Repurchase Agreement
RI	: Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia</i>)
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara (<i>General State Cash Account</i>)
Rp	: Rupiah
RTGS	: Real Time Gross Settlement
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan (<i>Financial Accounting Standards</i>)
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Certificate</i>)
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Certificate</i>)
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara (<i>State Sharia Marketable Securities</i>)
SDM	: Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources</i>)
SDR	: Special Drawing Rights
SE	: Surat Edaran (<i>Circular</i>)
SGD	: Singapore Dollar
SKB	: Surat Keputusan Bersama (<i>Joint Decision</i>)
SLA	: Subsidiary Loan Agreement
SOL	: Subordinated Loan
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara (<i>Treasury Bill</i>)
SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (<i>Sharia Government Bonds</i>)
SSB	: Surat-Surat Berharga (<i>Marketable Securities</i>)
SU	: Surat Utang (<i>Treasury Bonds</i>)
SUN	: Surat Utang Negara (<i>Marketable Treasury Bonds</i>)
SUP	: Surat Utang Pemerintah (<i>Government Bond</i>)
THT	: Tunjangan Hari Tua (<i>Retirement Benefit Program</i>)
TIBOR	: Tokyo Inter-Bank Offered Rate
TOZ	: Troy Ounce
TPSL	: Third-Party Securities Lending
TSL	: Two Step Loan
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua (<i>Retirement Health Plan</i>)
Tuperum	: Tunjangan Pemilikan Rumah (<i>Housing Allowance</i>)
UFJ	: United Financial of Japan
UKPA	: Unit Khusus Penyelesaian Aset (<i>Special Unit for Asset Resolution</i>)
USD	: United States Dollar
Valas	: Valuta Asing (<i>Foreign Exchange</i>)
YASPORBI	: Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (<i>Indonesian State Employee Corps Education Foundation – Bank of Indonesia Unit</i>)
YKKBI	: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Employee Welfare Foundation</i>)
Yoy	: Year on Year
YPPI	: Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (<i>Indonesian Banking Development Foundation</i>)

